



PEMERINTAH
PROVINSI BALI



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

2025



PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2026





KATA PENGANTAR



Dengan menghaturkan *puja pangastuti angayubagia* kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dan atas *Asung Kerta Wara Nugraha-Nya* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 pada dasarnya dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Pasal 70, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 selanjutnya digunakan oleh pemerintah sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

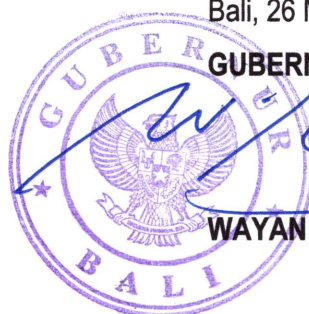
Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas, paradigma penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami pergeseran dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta memperhatikan aspirasi yang bermuara kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik walaupun masih dijumpai beberapa hambatan, namun berkat kerja keras dan kerja sama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sebagai akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Bali, yaitu: “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Visi ini merupakan implementasi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru Tahun 2025–2125 yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, serta dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Terimakasih.

Bali, 26 Maret 2026

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.1. Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Jumlah Penduduk	11
d. Jumlah Kabupaten/Kota	16
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah	17
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	22
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	26
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	26
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	30
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	37
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	55
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	152
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	155
2.1. Capaian Kinerja Makro	155
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	157
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan	157
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	184
2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	188
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	188

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	190
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	193
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	195
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	197
f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	199
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	243
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali	244
3.1.1. Target Kinerja	244
3.1.2. Realisasi	245
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota	250
3.2.1. Target Kinerja	250
3.2.2. Realisasi	250
3.3. Permasalahan dan Kendala	250
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	250
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	251
4.1. Urusan Pendidikan	253
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	253
4.1.2. Target Pencapaian	253
4.1.3. Realisasi	253
4.1.4. Alokasi Anggaran	256
4.1.5. Dukungan Personil	245
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	257
4.2. Urusan Kesehatan	258
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	258
4.2.2. Target Pencapaian	258
4.2.3. Realisasi	259

4.2.4. Alokasi Anggaran	262
4.2.5. Dukungan Personil	263
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	264
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	266
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	266
4.3.2. Target Pencapaian	268
4.3.3. Realisasi	268
4.3.4. Alokasi Anggaran	269
4.3.5. Dukungan Personil	270
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	270
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	273
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	273
4.4.2. Target Pencapaian	275
4.4.3. Realisasi	276
4.4.4. Alokasi Anggaran	276
4.4.5. Dukungan Personil	277
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	278
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	278
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	278
4.5.2. Target Pencapaian	278
4.5.3. Realisasi	279
4.5.4. Alokasi Anggaran	279
4.5.5. Dukungan Personil	279
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	279
4.6. Urusan Sosial	280
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	280
4.6.2. Target Pencapaian	281
4.6.3. Realisasi	284
4.6.4. Alokasi Anggaran	287

4.6.5. Dukungan Personil	287
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	288
4.7. Program dan Kegiatan	288
BAB V PENUTUP	296

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Bali lahir setelah terjadi penyatuan kembali wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pembentukan Provinsi Bali dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Era baru masyarakat Bali diawali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara Daerah Bali, lembaga Legislasi ini dilantik pada 25 September 1950 di Bali Hotel Denpasar. Sebelum itu, Pemerintahan Bali dilaksanakan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pelaksana Pemerintahan (BPP) di Bali, dengan Ketua BPP adalah AA. Gede Oka (Ketua Dewan Raja Raja) dengan anggota I Gusti Putu Merta (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Daging (urusan ekonomi), dan I Wayan Badra (urusan umum). Baru beberapa hari BPP menjalankan pemerintahan di Bali, Pemerintah NIT mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tertanggal 15 Juni 1950 untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur, sesuai dengan perubahan keadaan saat itu. Sebagai implementasi dari Undang-Undang itu, dibentuklah Panitia Penyelenggaraab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Panitia ini yang membentuk DPR sementara Daerah Bali. Jumlah Anggota DPRD Bali saat itu berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari wakil-wakli dari PNI, Masyumi, KNPI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani, dan orang-orang yang terikat oleh Partai/Organisasi. I Gusti Putu Merta dipilih sebagai Ketua dengan Wakil Ketua Ida Bagus Oka, dan Sekretaris I Gusti Putu Gde Kutri.

Sehari setelah pelantikan DPRD Bali, diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali. AA. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom Putra ditetapkan sebagai calon terpilih. Selain itu, diadakan pula pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Bali, yaitu I Gusti Made Mudra (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Daging (urusan ekonomi), dan I Gusti Bagus Sugriwa (urusan umum). Bersamaan dengan itu, diadakan pula perubahan struktur pemerintahan di masing-masing swapraja di Bali. Pada Bulan Mei 1951, semua daerah di Bali telah terbentuk DPRD Daerah Bagian (swapraja) serta dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah.

Pasca Pemilu Tahun 1951, munculah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pemberlakuan Undang-Undang ini diikuti dengan pembentukan Provinsi Bali pada 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali dibentuk, pelaksanaan Pemerintahan di Bali mengalami perubahan, Pemerintah Pusat menunjuk/mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Bagus Oka ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca dibentuknya Provinsi Bali, dan dilantik pada 1 Desember 1958. Setelah diangkatnya pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, terbentuklah DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru terbentuk dan memilih calon Kepala Daerah yang baru. Presiden Soekarno menetapkan AA. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959, jadi AA. Bagus Sutedja merupakan Kepala Daerah definitif pertama Provinsi Bali setelah dibentuk Tahun 1958.

Semula Ibukota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja mengikuti Ibukota Provinsi Sunda Kecil, tapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-B6 tanggal 23 Juni 1960, Ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar, pemindahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali, dan Denpasar menjadi Ibukota Provinsi Bali hingga saat ini.

Dalam menghadapi berbagai perkembangan yang ada, masyarakat Bali meyakini bahwa sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan adalah keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan hubungan antarsesama manusia, dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya sesuai dengan filosofi yang bersumber dari nilai kearifan lokal Bali. Filosofi dan kearifan lokal tersebut harus terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Kedudukan Provinsi Bali sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dimana Undang-Undang tersebut tidak lagi mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat Bali, terutama dalam memelihara kebudayaan yang bersumber dari adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus terus dipelihara baik oleh masyarakat maupun Negara.

Sehingga untuk menghadapi dan menjawab permasalahan kebudayaan yang dihadapi Provinsi Bali mencakup adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang terus mengalami kemunduran dari segi jumlah dan kualitas kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta sistem nilai dan pranata budaya, serta penyelenggaraan pembangunan Bali yang belum sepenuhnya menjamin

keajekan nilai budaya, adat istiadat, aura (taksu) Bali, dan kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Bali, maka pada tanggal 4 Mei 2023 diundangkan **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali** yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, pengakuan karakteristik Provinsi Bali serta kontribusi masyarakat dan negara dalam memberikan penguatan pemajuan kebudayaan dan desa adat di Bali.

b. Data Geografis Wilayah

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (The Island of God). Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 559.001,27 Ha, terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Thd Luas Daratan (%)
I	WILAYAH DARATAN PROVINSI BALI		559.001,27	100,00
1	Kota Denpasar	Denpasar Utara	2.659,99	0,48
		Denpasar Timur	2.609,20	0,47
		Denpasar Selatan	4.944,27	0,88

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Thd Luas Daratan (%)
		Denpasar Barat	2.357,98	0,42
JUMLAH			12.571,45	2,25
2	Kabupaten Badung	Abiansemal	6.636,28	1,19
		Kuta	2.219,43	0,40
		Kuta Selatan	10.145,30	1,81
		Kuta Utara	3.472,09	0,62
		Mengwi	8.181,88	1,46
		Petang	9.219,94	1,65
JUMLAH			39.874,92	7,13
3	Kabupaten Bangli	Bangli	5.740,80	1,03
No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Thd Luas Daratan (%)
		Kintamani	36.965,66	6,61
		Susut	5.045,00	0,90
		Tembuku	4.924,95	0,88
JUMLAH			52.676,41	9,42
4	Kabupaten Buleleng	Banjar	13.785,28	2,47
		Buleleng	4.624,84	0,83
		Busungbiu	14.065,41	2,52
		Gerokgak	40.581,10	7,26
		Kubutambahan	11.847,47	2,12
		Sawan	9.129,44	1,63
		Seririt	12.310,21	2,20
		Sukasada	16.096,30	2,88
		Tejakula	9.835,19	1,76
JUMLAH			132.275,24	23,66
3	Kabupaten Gianyar	Blahbatuh	3.804,07	0,68
		Gianyar	5.050,40	0,90
		Payangan	7.369,56	1,32
		Sukawati	5.345,60	0,96
		Tampaksiring	3.737,62	0,67
		Tegallalang	6.740,57	1,21
		Ubud	4.382,71	0,78
JUMLAH			36.430,53	6,52
4	Kabupaten Jembrana	Jembrana	8.957,87	1,60
		Melaya	22.962,32	4,11
		Mendoyo	29.740,68	5,32
		Negara	9.756,36	1,75
		Pekutatan	13.496,15	2,41

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Thd Luas Daratan (%)
JUMLAH			84.913,38	15,19
5	Kabupaten Karangasem	Abang	13.183,88	2,36
		Bebandem	8.201,38	1,47
		Karangasem	9.220,04	1,65
		Kubu	23.114,82	4,14
		Manggis	7.772,73	1,39
		Rendang	11.006,11	1,97
		Selat	7.184,52	1,29
		Sidemen	4.248,26	0,76
JUMLAH			83.931,74	15,01
6	Kabupaten Klungkung	Banjarangkan	3.832,60	0,69
		Dawan	3.626,39	0,65
		Klungkung	3.035,24	0,54
		Nusa Penida	20.901,77	3,74
JUMLAH			31.396,01	5,62
7	Kabupaten Tabanan	Baturiti	10.738,23	1,92
		Kediri	5.587,91	1,00
		Kerambitan	4.684,48	0,84
		Marga	4.481,32	0,80
		Penebel	14.356,92	2,57
		Pupuan	17.648,73	3,16
		Selemadeg	6.063,17	1,08
		Selemadeg Barat	10.870,11	1,94
		Selemadeg Timur	6.133,56	1,10
		Tabanan	4.367,16	0,78
JUMLAH			84.931,59	
II	WILAYAH PERAIRAN PESISIR PROVINSI BALI		915.254,10	
III	TOTAL LUAS WILAYAH PROVINSI BALI		1.474.255,37	

Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, , yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali

dinamakan *Desa Adat* atau *Desa Pakraman*. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat/Desa Pakraman di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat/Desa Pakraman yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat/Desa Pakraman diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat/Desa Pakraman merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 Pura, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 Pura, dan *Pura Sat Kahyangan* sebanyak 8 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama* Bali), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama* Bali yang berkebudayaan tinggi dan religius.

2. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan

gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan Nyegara-Gunung.

Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.142 m).

Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut:

- a) Lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 ha;
- b) Lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sampai bergelombang dengan luas 60.620,34 ha;
- c) Lahan dengan ketinggian 100-500 meter seluas 211.923,85 ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit;
- d) Lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha; dan
- e) Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha.

3. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo- Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api. Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut.

- a) Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di leher sepananjung Prapat Agung, wilayah pesisir dekat pantai di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli).
- b) Formasi Prapat Agung (TpSP), terdiri dari batugamping ter- kars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepananjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng.
- c) Formasi Palasari (QTSP), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana,

menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng.

- d) Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.

4. Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat danau alam, yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, serta Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Danau Batur merupakan danau terbesar dengan luas permukaan 10,22 km².

a) Sungai

Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Provinsi Bali dikelompokkan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdiri dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS).

DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 137 DAS, Zona Timur 67 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS dan Zona Barat 31 DAS. Dari 391 DAS yang ada 76 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (125 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (73 DAS) dan Kabupaten Klungkung (70 DAS).

b) Danau/Waduk/Embung/Embungan

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 1.007,85 juta m³. Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 80,90% dari total potensi air danau.

Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di

Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/ embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta m³.

c) Mata Air

Berdasarkan data dari Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, potensi mata air di Provinsi Bali adalah 1.023 miliar m³ dengan total debit 32.463,12 Lt/dt. Jumlah Mata Air yang tercatat di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.394 titik mata air dimana jumlah paling banyak berada di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 447 titik mata air. Namun untuk debit paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem dengan potensi air 13.023,48 Lt/dt meskipun jumlah mata air hanya 215 titik.

d) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut:

- 1) Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan Mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).
- 2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).
- 3) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoyo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Gerokgak, Seririt, dan Banjar).
- 4) Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
- 5) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung

(dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).

- 6) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng, dan Seririt).
- 7) Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng.
- 8) Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan.
- 9) Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.
- 10) Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklompok, Pejarakan dan Sumberkima).
- 11) Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem.

Berdasarkan data Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdata ada di Provinsi Bali adalah sebanyak 8 kawasan CAT. Adapun CAT tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) CAT Denpasar – Tabanan dengan luas 2.080 Km² yang meliputi kawasan di dalam 8 kabupaten/kota (Kecuali Kabupaten Jembrana)
- 2) CAT Singaraja dengan luas 505 Km² yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan.

- 3) CAT Amlapura dengan luas 200 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Karangasem.
- 4) CAT Negara dengan luas 418 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan.
- 5) CAT Gilimanuk dengan luas 131 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
- 6) CAT Nusa Penida dengan luas 198 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Klungkung.
- 7) CAT Nusa Dua dengan luas 99 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Badung.
- 8) CAT Tejakula dengan luas 750 Km2 yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem.

Penggunaan Lahan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
I	TERBUKA		
1	Danau	2.646,25	0,47
2	Hamparan Pasir Pantai	458,17	0,08
3	Hutan Lahan Rendah	43.321,47	7,75
4	Hutan Lahan Tinggi	81.263,71	14,54
5	Hutan Mangrove	1.912,87	0,34
6	Hutan Tanaman	15,00	0,00
7	Kolam	12,08	0,00
7	Ladang	71.000,04	12,70
8	Lahan Terbuka	252,44	0,05
9	Perkebunan	152.899,81	27,36
11	Sawah	74.724,94	13,37
12	Semak dan Belukar	26.201,65	4,69
13	Sungai	1.294,30	0,23
14	Tambak	936,21	0,17
15	Tegalan	94,66	0,02
JUMLAH		457.033,06	81,77
II	TERBANGUN		
1	Bandara	329,39	0,06
2	IPAL	3,33	0,00
3	Pelabuhan Laut	156,17	0,03
4	Permukiman	101.151,10	18,10
5	Tempat Penampungan Sampah/Deposit	3,33	0,00
6	Waduk	233,68	0,04
Jumlah		101.876,99	18,23
Total		558.910,59	100,00

Sumber: RTRW Provinsi Bali 2023-2043

c. Jumlah Penduduk

BPS Provinsi Bali telah merilis data perkiraan jumlah penduduk di Provinsi Bali selama tahun 2019-2024. Pada Tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk Provinsi

Bali adalah 4.461.270 Jiwa dimana Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 820,4 ribu jiwa yang disusul kemudian oleh Kota Denpasar dengan penduduk 762,4 ribu jiwa.

Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2025

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Jembrana	278,70	317,10	318,80	321,20	323,50	325,6	327,7
2	Kab. Tabanan	446,70	461,60	462,90	464,50	466,10	467,7	469,1
3	Kab. Badung	678,90	548,20	552,80	558,10	563,30	568,5	573,7
4	Kab. Gianyar	514,30	515,30	517,70	520,90	524,00	527,1	530,1
5	Kab. Klungkung	179,10	206,90	207,30	208,10	208,70	209,3	209,8
6	Kab. Bangli	227,60	258,70	259,30	260,40	261,40	262,3	263,1
7	Kab. Karangasem	417,00	492,40	494,90	497,50	500,00	502,3	504,6
8	Kab. Buleleng	661,90	791,80	796,40	802,80	808,90	814,8	820,4
9	Kota Denpasar	957,80	725,30	733,30	741,00	748,40	755,6	762,4
	Provinsi Bali	4.362,10	4.317,40	4.343,50	4.374,30	4.404,30	4.433,30	4.461,27

Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2025

1. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (dependency ratio).

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali tahun 2025, dapat dihitung rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2025 diperkirakan adalah sebesar 100,40. Kota Denpasar memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Provinsi Bali yaitu 102,10 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gianyar yaitu dengan rasio jenis kelamin 98,70.

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2025

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin			
	2020	2023	2024	2025
Jembrana	100,25	100,32	100,31	100,30
Tabanan	100,55	99,51	99,13	98,80
Badung	100,35	100,49	100,52	100,50
Gianyar	100,61	99,50	99,11	98,70
Klungkung	100,38	100,59	100,64	100,70

Bangli	101,47	101,32	101,23	101,10
Karangasem	102,71	100,80	100,34	99,80
Buleleng	101,13	100,87	100,77	100,70
Denpasar	102,03	102,03	102,09	102,10
Bali	101,16	100,69	100,53	100,40

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali 2025

2. Kepadatan Penduduk

Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2019-2024, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2019 hingga tahun 2024. Kepadatan penduduk ini menggunakan luas wilayah Provinsi Bali bukan merupakan luas kawasan permukimannya sehingga disebut sebagai Kepadatan Penduduk Bruto.

Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2019 hingga tahun 2024 adalah stagnan sekitar 8 Jiwa/Ha. Kota Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 60 Jiwa/Ha pada tahun 2024, 60 Jiwa/Ha pada tahun 2023, dan

59 Jiwa/Ha pada tahun 2022. Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 4 Ha pada tahun 2024.

Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	84.913,38	3	4	4	4	4	4
Tabanan	84.931,59	5	5	5	5	5	6
Badung	39.874,92	17	14	14	14	14	14
Gianyar	36.430,53	14	14	14	14	14	14
Klungkung	31.396,01	6	7	7	7	7	7
Bangli	52.676,41	4	5	5	5	5	5
Karangasem	83.931,74	5	6	6	6	6	6
Buleleng	132.275,24	5	6	6	6	6	6
Denpasar	12.571,45	76	58	58	59	60	60
Provinsi Bali	559.001,27	8	8	8	8	8	8

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2025

3. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di Provinsi Bali. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang

mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak.

Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian;
- b) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; dan
- c) Sektor tersier berupa jasa.

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	545.533	534.705	518.584	495.732	480.420
2	Pertambangan dan Penggalian	9.013	7.859	6.250	6.093	4.238
3	Industri Pengolahan	381.746	394.125	403.698	384.323	385.901
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.473	3.703	6.480	5.202	3.642
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.324	6.486	8.928	18.255	9.853
6	Konstruksi	159.554	155.461	176.488	174.496	200.275
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	495.533	511.721	553.557	559.836	538.267
8	Transportasi dan Pergudangan	59.540	57.669	85.949	99.521	107.848
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	236.386	233.811	314.733	357.657	381.501
10	Informasi dan Komunikasi	14.360	16.494	16.943	12.649	17.806
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	62.230	62.708	62.632	55.658	74.204
12	Real Estat	3.094	2.738	3.559	4.629	5.056
13	Jasa Perusahaan	42.832	33.764	51.297	46.330	48.496
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	114.051	136.969	125.737	114.436	114.961

No	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jaminan Sosial Wajib					
15	Jasa Pendidikan	103.537	109.449	97.073	109.176	115.856
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51.303	56.262	60.284	49.101	50.471
17	Jasa lainnya	130.910	117.930	114.878	124.722	126.617
	Jumlah	2.423.419	2.441.854	2.607.070	2.617.816	2.665.421

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di tahun 2024 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 20,19%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,02%; dan Industri Pengolahan sebesar 14,48%.

Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (quality of life) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (productive employment).

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur

15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,51 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,71 juta orang (77,11%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 805,70 ribu orang (22,89%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,66 juta orang penduduk yang bekerja dan 63,00 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 47,60 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 30,88 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 tercatat sebesar 77,11%, mengalami peningkatan sebesar 0,31 % poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 1,79 %. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang yang menganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,90 % poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3.455.127	3.509.090	3.563.142	3.490.205	3.519.886
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus (%)	74,32	73,54	76,86	77,08	77,11
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus (%)	5,63	5,37	4,80	2,69	1,79

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2025

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- a. Kabupaten Jembrana;
- b. Kabupaten Tabanan;
- c. Kabupaten Badung;

- d. Kabupaten Gianyar;
- e. Kabupaten Klungkung;
- f. Kabupaten Bangli;
- g. Kabupaten Karangasem;
- h. Kabupaten Buleleng; dan
- i. Kota Denpasar.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Ibu kota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

- 1. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
 - Jumlah Perangkat Daerah : 29
 - Jumlah Biro : 6
 - Jumlah Rumah Sakit : 4
 - Jumlah UPTD : 55

Referensi Peraturan SOTK:

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	BIRO/RS/UPTD
1	Sekretariat Daerah	1	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2	Biro Hukum
		3	Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian
		4	Biro Organisasi
		5	Biro Umum
		6	Biro Humas dan Protokol
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
3	Inspektorat Daerah		
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	1	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
		2	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
5	Dinas Kesehatan	3	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa
		4	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat
		5	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional
		6	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan
			RSUD Bali Mandara
			Rumah Sakit Mata Bali Mandara
			Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama
			Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	UPTD Pelayanan Sosial
		8	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
8	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	9	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital
		10	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		12	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		13	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
		14	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		15	UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
10	Dinas Perhubungan	16	UPTD Perlengkapan Jalan
		17	UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	BIRO/RS/UPTD
			Angkutan Jalan
		18	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita
		19	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		21	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
		23	UPTD Rumah Kreatif
13	Dinas Kebudayaan	24	UPTD Taman Budaya
		25	UPTD Museum Bali
		26	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
14	Dinas Pariwisata		
15	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	27	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja
		28	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata
16	Satuan Polisi Pamong Praja		
17	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat		
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	29	UPTD KPH Bali Utara
		30	UPTD KPH Bali Timur
		31	UPTD KPH Bali Selatan
		32	UPTD KPH Bali Barat
		33	UPTD TAHURA Ngurah Rai
		34	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
		35	UPTD Pengelolaan Sampah
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	36	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian
		37	UPTD Pengelolaan Air Minum
		38	UPTD Pengelolaan Air Limbah
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	39	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
		40	UPTD Produksi Perikanan Budidaya
		41	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali
		42	UPTD Pelabuhan Perikanan
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah		
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
		44	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah
26	Badan Pendapatan Daerah	46	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar
		47	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	BIRO/RS/UPTD
		48	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan
		49	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana
		50	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng
		51	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar
		52	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung
		53	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli
		54	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55	UPTD Pengendalian Bencana Daerah
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
29	Badan Penghubung		

2. Jumlah Pegawai Pemerintah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI PER JENIS JABATAN (DILUAR GURU DAN NAKES)			GURU	NAKES	PPPK
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA			
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17	62	37			53
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	7	24			17
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	40			39
4	Badan Pendapatan Daerah	47	10	242			422
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16	5	65			16
6	Badan Penghubung	5	0	10			4
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	19	23			65
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7	19	18			22
9	Biro Hukum	13	2	9			41
10	Biro Humas dan Protokol	9	3	16			0
11	Biro Organisasi	12	26	20			13
12	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10	7	13			30
13	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	13	41	13			30
14	Biro Umum	18	8	40			199
15	Dinas Kebudayaan	19	24	58			734

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI PER JENIS JABATAN (DILUAR GURU DAN NAKES)			GURU	NAKES	PPPK
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA			
16	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35	59	76			77
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	23	17	55			44
18	Dinas Kesehatan	30	20	57		76	254
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	21	57	33			41
20	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	15	18	17			145
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	16	8	29			36
22	Dinas Pariwisata	7	21	17			27
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	32	16	89			432
24	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	7	10	21			54
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	7	15	20			50
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	18	26			41
27	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	16	142	501	3788		4937
28	Dinas Perhubungan	33	1	57			107
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	14	34			25
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29	73	102			314
31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	16	10	55			61
32	Inspektorat Daerah	8	118	20			27
33	Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama	10	5	68		322	145
34	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	11	9	18		128	75
35	Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara	11	4	26		365	544
36	Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya	4	0	2		3	0
37	Satuan Polisi Pamong Praja	17	55	21			82
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5	6	34			78
TOTAL		580	939	2006	3788	894	9281

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4/3)*100	5
PENDAPATAN DAERAH	6.660.624.025.310,00	7.048.315.851.950,26	105,82	7.824.598.583.907,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.216.263.422.941,00	4.628.083.362.061,25	109,76	5.535.429.679.670,83
Pajak Daerah	2.767.839.352.516,00	2.865.836.401.524,00	103,54	4.520.332.643.486,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.002.357.827.000,00	1.069.465.642.900,00	106,69	1.844.964.341.717,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	748.070.632.825,00	798.076.710.700,00	106,68	1.694.519.308.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	639.365.501.000,00	630.972.809.013,00	98,68	639.365.501.400,00
Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	5.276.815.548,00	131,92	4.486.924.224,00
Pajak Rokok	354.875.391.691,00	343.585.515.178,00	96,81	336.996.567.645,00
Pajak Alat Berat	90.000.000,00	147.095.900,00	163,43	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	19.080.000.000,00	18.311.812.285,00	95,97	0,00
Retribusi Daerah	439.467.617.614,00	909.595.917.119,52	206,97	338.039.879.379,28
Retribusi Jasa Umum	340.889.890.000,00	312.473.157.763,18	91,66	296.109.115.165,28
Retribusi Jasa Usaha	93.177.727.614,00	588.375.816.326,34	631,45	34.988.817.314,00
Retribusi Perizinan Tertentu	5.400.000.000,00	8.746.943.030,00	161,98	6.941.946.900,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	253.603.839.112,00	253.603.839.116,43	100,00	197.369.947.623,03
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	253.382.756.690,00	253.382.756.694,43	100,00	196.751.692.444,03
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	221.082.422,00	221.082.422,00	100,00	618.255.179,00
Lain-lain PAD yang Sah	755.352.613.699,00	599.047.204.301,30	79,30	479.687.209.182,52
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.000.000,00	700.068.400,00	179,50	1.061.493.900,00
Hasil Kerja Sama Daerah	6.224.780.000,00	6.812.347.316,00	109,43	3.817.445.100,00
Jasa Giro	9.269.418.781,00	8.480.362.829,62	91,48	10.304.453.335,81
Pendapatan Bunga	2.645.833.333,00	15.267.241.419,64	577,02	9.555.179.227,40
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000,00	18.000.000,00	360,00	18.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	126.144.212,00	388.650.982,18	308,10	2.021.009.936,46
Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.500.100.000,00	17.892.730.336,00	35,43	71.236.784.994,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.773.340,00	20.433.146,04	736,77	23.266.408,00
Pendapatan dari Pengembalian	94.996.528.409,00	97.680.108.411,33	102,82	697.704.902,79
Pendapatan BLUD	91.192.035.624,00	82.679.933.999,49	90,66	63.071.871.378,06
Pungutan bagi Wisatawan Asing	500.000.000.000,00	369.021.750.000,00	73,80	317.880.000.000,00
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	0,00	85.577.461,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.216.263.422.941,00	4.628.083.362.061,25	109,76	5.535.429.679.670,83
PENDAPATAN TRANSFER	2.438.603.330.369,00	2.414.142.690.695,00	98,99	2.283.418.060.237,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4/3)*100	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.403.777.640.000,00	2.379.317.000.326,00	98,98	2.283.418.060.237,00
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	2.260.260.706.237,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	244.948.196.000,00	251.084.753.500,00	102,50	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.401.748.162.000,00	1.403.485.166.622,00	100,12	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	744.102.696.000,00	711.768.494.204,00	95,65	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2.390.799.054.000,00	2.366.338.414.326,00	98,97	2.260.260.706.237,00
Insentif Fiskal	12.978.586.000,00	12.978.586.000,00	100,00	23.157.354.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	12.978.586.000,00	12.978.586.000,00	100,00	23.157.354.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	34.825.690.369,00	34.825.690.369,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.438.603.330.369,00	2.414.142.690.695,00	98,99	2.283.418.060.237,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77	5.750.844.000,00
Pendapatan Hibah	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77	5.750.844.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.753.232.000,00	6.085.759.194,01	105,77	5.744.244.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00	6.600.000,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77	5.750.844.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	6.660.624.025.310,00	7.048.315.851.950,26	105,82	7.824.598.583.907,83
BELANJA DAERAH	7.412.970.277.983,60	6.554.652.991.551,62	88,42	7.293.051.849.998,07
BELANJA OPERASI	5.053.188.410.600,60	4.520.551.159.698,76	89,45	4.461.088.682.470,66
Belanja Pegawai	2.526.874.277.345,60	2.304.413.342.308,00	91,19	2.088.693.065.509,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.172.678.735.056,00	1.094.301.132.770,00	93,31	915.767.773.065,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.149.191.089.336,60	1.025.358.198.349,00	89,22	648.766.658.646,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	356.514.710.609,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	62.566.813.904,00	58.685.482.937,00	93,79	58.811.705.124,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.007.840.762,00	1.013.327.807,00	33,68	180.740.600,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	6.677.806.694,00	6.675.000.000,00	99,95	5.090.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.562.731.648.119,00	1.272.505.827.668,79	81,42	1.200.096.660.415,66
Belanja Barang	243.573.830.490,00	194.073.326.821,40	79,67	142.523.484.359,00
Belanja Jasa	524.480.110.880,00	462.105.370.947,70	88,10	498.947.019.991,30
Belanja Pemeliharaan	58.551.033.391,00	45.127.465.842,23	77,07	39.402.749.121,78
Belanja Perjalanan Dinas	171.410.619.300,00	70.854.483.596,00	41,33	98.258.652.122,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4/3)*100	5
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	123.254.194.950,00	95.380.073.712,58	77,38	21.182.298.130,09
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	188.119.656.792,61
Belanja Barang dan Jasa BOSP	185.639.814.002,00	179.240.131.088,00	96,55	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	255.822.045.106,00	225.724.975.660,88	88,23	211.662.799.898,88
Belanja Subsidi	10.009.000.000,00	10.009.000.000,00	100,00	2.525.000.000,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Belanja Hibah	953.461.885.136,00	933.511.389.721,97	97,90	1.169.523.956.546,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.859.625.000,00	6.470.508.238,00	94,32	157.039.446.676,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	824.332.380.136,00	805.989.221.824,97	97,77	899.482.561.466,00
Belanja Hibah Dana BOS	98.428.300.000,00	97.210.079.659,00	98,76	90.422.943.204,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	23.841.580.000,00	23.841.580.000,00	100,00	22.579.005.200,00
Belanja Bantuan Sosial	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	250.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	5.053.188.410.600,60	4.520.551.159.698,76	89,45	4.461.088.682.470,66
BELANJA MODAL	961.755.254.119,00	773.687.032.749,53	80,44	667.689.607.145,41
Belanja Modal Tanah	31.063.325.760,00	1.181.948.000,00	3,80	3.464.184.000,00
Belanja Modal Tanah	31.063.325.760,00	1.181.948.000,00	3,80	3.464.184.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.723.278.083,00	259.183.049.267,80	91,35	130.063.180.613,50
Belanja Modal Alat Besar	4.878.553.334,00	4.339.065.460,00	88,94	1.000.015.688,00
Belanja Modal Alat Angkutan	32.705.892.586,00	29.941.202.984,00	91,54	9.104.940.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.163.318.800,00	1.147.030.300,00	98,59	20.655.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	48.995.750,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.112.747.205,00	27.557.100.944,00	83,22	20.805.699.849,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.887.588.529,00	22.816.626.241,80	91,67	3.381.338.750,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	48.463.757.976,00	48.126.584.812,00	99,30	12.097.276.465,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	26.966.402.483,00	26.335.611.827,00	97,66	6.481.862.238,00
Belanja Modal Komputer	33.199.218.847,00	28.793.392.682,00	86,72	8.734.885.826,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	17.982.100,00	0,00	0,00	45.400.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	57.300.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	140.000.000,00	132.000.002,00	94,28	775.460.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	959.343.200,00	804.092.709,00	83,81	95.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	77.172.500,00	74.085.000,00	95,99	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4/3)*100	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	42.816.245.711,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	42.888.128.423,00	42.580.231.926,00	99,28	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	34.238.172.100,00	26.536.024.380,00	77,50	24.597.605.336,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.617.256.729,00	240.493.997.597,02	74,77	407.489.294.374,22
Belanja Modal Bangunan Gedung	312.766.552.324,00	233.401.336.963,35	74,62	398.486.846.224,00
Belanja Modal Monumen	60.000.000,00	24.719.700,00	41,19	5.651.346.599,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.418.527.580,00	3.100.165.659,00	90,68	14.818.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.372.176.825,00	3.967.775.274,67	73,85	3.336.283.051,22
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290.219.969.754,00	240.687.598.599,81	82,93	94.451.449.090,69
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	210.198.677.070,00	183.290.331.207,36	87,19	67.093.118.028,00
Belanja Modal Bangunan Air	22.508.489.772,00	19.653.582.341,00	87,31	11.454.013.321,00
Belanja Modal Instalasi	19.681.752.757,00	12.477.297.859,00	63,39	1.627.853.890,69
Belanja Modal Jaringan	34.846.550.155,00	24.854.390.901,45	71,32	10.212.120.985,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.984.500.000,00	411.996.291,00	13,80	4.064.342.866,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.418.774.193,00	31.596.980.320,00	91,80	31.382.599.067,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	45.000.000,00	44.799.600,00	99,55	98.531.370,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	300.000.000,00	298.680.549,00	99,56	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	28.752.067.697,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	32.013.774.193,00	31.211.500.171,00	97,49	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.060.000.000,00	42.000.000,00	2,03	2.532.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	712.649.600,00	543.458.964,90	76,25	838.900.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	176.649.600,00	153.536.964,90	86,91	838.900.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	536.000.000,00	389.922.000,00	72,74	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	961.755.254.119,00	773.687.032.749,53	80,44	667.689.607.145,41
BELANJA TIDAK TERDUGA	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
Belanja Tidak Terduga	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13	7.441.134.041,00
BELANJA TRANSFER	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03	92,72	2.156.832.426.341,00
Belanja Bagi Hasil	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	94,78	1.800.971.992.343,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.018.848.956.716,00	965.738.976.448,00	94,78	1.800.971.992.343,00
Belanja Bantuan Keuangan	325.315.879.304,00	280.600.433.855,03	86,25	355.860.433.998,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	236.296.079.304,00	192.057.433.855,03	81,27	269.381.700.098,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	89.019.800.000,00	88.543.000.000,00	99,46	86.478.733.900,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03	92,72	2.156.832.426.341,00
JUMLAH BELANJA	7.412.970.277.983,60	6.554.652.991.551,62	88,42	7.293.051.849.998,07
SURPLUS/DEFISIT	(752.346.252.673,60)	493.662.860.398,64	(65,61)	531.546.733.909,76

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4/3)*100	5
PEMBIAYAAN DAERAH	752.346.252.673,60	219.211.188.702,62	29,13	92.185.725.293,56
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.153.811.060.761,60	620.675.986.790,62	53,79	342.650.523.381,56
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	623.732.459.203,32	620.675.986.790,62	99,50	171.480.190.581,56
Pelampauan Penerimaan PAD	623.732.459.203,32	943.575.945.233,49	151,27	(413.705.102.485,34)
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	3.180.000.237,00	0,00	(11.191.766.664,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	6.600.000,00	0,00	(49.994.822.500,00)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	(832.932.027.174,44)	0,00	(670.757.862.495,00)
Penghematan Belanja	0,00	499.573.408.393,23	0,00	1.325.787.678.439,90
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.452.215.264,00	0,00	(8.657.933.714,00)
Sisa Belanja Lainnya	0,00	1.819.844.837,34	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	171.170.332.800,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	171.170.332.800,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	530.078.601.558,28	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	530.078.601.558,28	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.153.811.060.761,60	620.675.986.790,62	53,79	342.650.523.381,56
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	401.464.798.088,00	99,99	250.464.798.088,00
Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	243.464.798.088,00	99,99	243.464.798.088,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	243.464.808.088,00	243.464.798.088,00	99,99	243.464.798.088,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	401.464.798.088,00	99,99	250.464.798.088,00
PEMBIAYAAN NETTO	752.346.252.673,60	219.211.188.702,62	29,13	92.185.725.293,56
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	712.874.049.101,26	0,00	623.732.459.203,32

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis pemerintah Daerah

Dinamika kehidupan pada tingkat lokal, nasional, dan global memunculkan permasalahan dan tantangan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali ke depan. Hal ini telah dijabarkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan dan Tantangan Alam Bali ke Depan

Alam Bali mengalami perubahan secara signifikan karena faktor Alamiah dan dampak dinamika pembangunan.

- a. Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali, seperti: penodaan tempat suci; wisata pendakian gunung; pencurian pratima; serta polusi danau, sungai, dan laut.
- b. Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana-prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana Alam.
- c. Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan.
- d. Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas dan keanekaragaman hayati menurun.
- e. Sumber air yang aktif seperti Danau, Mata Air, dan Sungai berpotensi semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih untuk kehidupan masyarakat, irigasi, dan industri pariwisata.
- f. Ekosistem Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut berpotensi semakin rusak yang mengancam keanekaragaman hayati.
- g. Polusi dan kontaminasi dari berbagai sumber semakin meningkat yang mengancam ketersediaan udara bersih, air bersih, dan tanah berkualitas.
- h. Terjadinya perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan, bencana Alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit.
- i. Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan, sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan.

2. Permasalahan dan Tantangan Manusia Bali ke-Depan

Manusia Bali secara genologis memiliki keunggulan, namun telah mengalami degradasi akibat faktor internal dan eksternal, terutama kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika zaman.

- a. Karakteristik Manusia Bali yang dahulu dikenal jemet/rajin, ulet/tekun, jujur, tragia/perencana yang baik, lascarya/tulus ikhlas, dabdab (teratur, sopan, dan

matang), loyal, dan berdedikasi, mengalami degradasi, yang berimplikasi pada menurunnya identitas ke-Bali-an sebagai Nak Bali.

- b. Semangat hidup kebersamaan, gotong-royong, dan kohesi sosial sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal: *gilik-saguluk*, *para-sparo*, *salunglung sabayantaka*, *sarpana ya* (*se-ia sekata*, seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja), semakin menurun, yang berimplikasi pada menurunnya ketahanan sosial kehidupan Masyarakat Bali.
- c. Jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama karena migrasi dari luar Bali berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, dan papan serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk terutama pada wilayah perkotaan.
- d. Sistem kesehatan tradisional Bali (*Usadha*), yang merupakan warisan *adiluhung* *Leluhur* dan *Guru-Guru Suci Bali*, telah lama diabaikan sebagai bagian sistem kesehatan Masyarakat Bali.
- e. Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk lokal.
- f. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah (kurang dari dua) dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama Manusia Bali terutama *Nyoman/Komang* (anak ketiga) dan *Ketut* (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai pelaku utama Kebudayaan Bali.
- g. Pemanfaatan penduduk lokal Bali oleh warga negara asing semakin meningkat untuk kepentingan penguasaan aset, yang berimplikasi pada ancaman semakin tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan, serta terjadinya degradasi moral masyarakat.
- h. Kompetensi tenaga kerja Manusia Bali relatif rendah, yang berimplikasi pada daya saing dan produktivitas.
- i. Kebutuhan penyediaan lapangan kerja semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, yang berpotensi meningkatkan pengangguran, dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

- j. Tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan/perikanan cenderung menurun, dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun, yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian dan kelautan/perikanan, serta berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.

3. Permasalahan dan Tantangan Kebudayaan Bali ke-Depan

Kebudayaan Bali mencakup seluruh keluhuran dan keadiluhungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang berkembang melalui proses pewarisan dan penciptaan baru, menghadapi permasalahan dan tantangan sangat serius pada masa kini dan masa mendatang.

- a. Perkembangan berbagai aspek kehidupan akibat globalisasi, berimplikasi pada menurunnya budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan Masyarakat Bali, seperti tata krama, kesopanan dan kesantunan, serta etika dan budi pekerti.
- b. Menurunnya populasi penduduk lokal Bali, berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan, pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), serta persaingan pasar global yang tidak sehat dan kejahatan ekonomi, berimplikasi pada menurunnya produk budaya Bali, seperti seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat.
- d. Bali memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali.
- e. Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali.
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pesatnya teknologi digital, berimplikasi kepada menurunnya orisinalitas produk budaya Bali.
- g. Bali sebagai tujuan utama wisata dunia, sangat rentan terhadap terjadinya akulturasi budaya, di satu sisi memberi manfaat positif, namun sekaligus juga membawa ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan Kebudayaan Bali.
- h. Masifnya perkembangan pariwisata dan perkembangan teknologi, berimplikasi pada penurunan ragam budaya agraris dan budaya bahari tradisional Bali secara drastis.

- i. Keberadaan lembaga tradisional Subak semakin berkurang karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi.
- j. Keberadaan Puri dalam fungsinya sebagai lembaga pelestarian adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali tidak optimal.
- k. Perkembangan kuliner global menjadi ancaman terhadap kuliner tradisional lokal Bali.
- l. Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

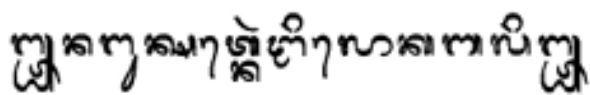
Visi dan misi pembangunan Bali 5 (lima) tahun ke depan merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi ini turut menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah. Visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih yang disampaikan dalam masa kampanye sebelumnya.

Visi merupakan rumusan umum yang berkaitan dengan keadaan yang hendak dicapai atau diinginkan dalam periode perencanaan tertentu. Visi merupakan hal yang fundamental dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah. Visi ini juga mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan arah pembangunan yang strategis dan berkelanjutan.

Visi Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada akhir periode sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Bidang Prioritas Pembangunan Bali 5 Tahun ke depan (2025-2029) merupakan momentum 5 tahun pertama yang menjadi awal pelaksanaan pembangunan Bali sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Visi pembangunan Bali 5 Tahun ke depan, yaitu:



**Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta
Berencana dalam Bali Era Baru**

Yang bermakna; “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala-Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Visi ini juga mengandung makna; “Membangun Kehidupan Krama Bali yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban Berlandaskan Nilai–Nilai Luhur Kearifan Bali”.

Memantapkan dan mempercepat pewujudan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) Misi Pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Bali sebagai strategi untuk menjaga, memperkuat, dan memajukan Alam, Manusia, serta Kebudayaan Bali. Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali adalah:

Misi 1. Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.

Misi 2. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Misi 3. Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.

Misi 4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.

Misi 5. Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Misi 6. Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

Misi 7. Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Misi 8. Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalyaya dan Pasraman di Desa Adat.

Misi 9. Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali.

Misi 10. Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional.

Misi 11. Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali.

Misi 12. Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.

Misi 13. Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali.

Misi 14. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.

Misi 15. Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.

Misi 16. Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.

Misi 17. Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.

Misi 18. Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Misi 19. Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.

Misi 20. Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.

Misi 21. Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.

Misi 22. Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.

Misi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dirumuskan tidak hanya sebagai penjabaran visi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengelola isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Setiap misi memiliki relevansi dan kontribusi langsung terhadap isu-isu utama pembangunan daerah, sehingga implementasi misi

dapat memberikan arah yang jelas dalam mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan. Adapun keselarasan antara misi dengan isu strategis dijelaskan sebagai berikut.

1. **Misi 1:** Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi; **Misi 2:** Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan; dan **Misi 3:** Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali diarahkan untuk menjawab isu strategis Belum optimalnya pemeliharaan kesucian alam Bali yang berimplikasi pada ancaman menurunnya Taksu Bali.
2. **Misi 4:** Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas; **Misi 5:** Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali; **Misi 6:** Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi; **Misi 7:** Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi; **Misi 8:** Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Widyalyaya dan Pasraman di Desa Adat; **Misi 9:** Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali; **Misi 10:** Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional; **Misi 11:** Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali diarahkan untuk menjawab isu strategis: Menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia meliputi degradasi karakteristik tradisional masyarakat Bali, rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, dan ancaman punahnya identitas lokal akibat rendahnya tingkat fertilitas dan tingginya migrasi penduduk.
3. **Misi 12:** Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali; **Misi 13:** Mempercepat

penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali; Misi 14: Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur; Misi 15: Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi; dan Misi 17: Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat diarahkan untuk menjawab isu strategis: Kesenjangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan mencerminkan ketimpangan distribusi infrastruktur pariwisata, sementara pemerataan pembangunan ekonomi terhambat oleh dominasi sektor pariwisata dan belum optimalnya pemberdayaan.

4. **Misi 16:** Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital dan Misi 18: Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan diarahkan untuk menjawab isu strategis: Keterbatasan sarana dan prasarana dasar, infrastruktur pendukung ekonomi, dan pengembangan teknologi digital yang menghambat percepatan pembangunan daerah.
5. **Misi 19:** Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah; dan Misi 20: Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih diarahkan untuk menjawab isu strategis: Menurunnya kualitas lingkungan akibat belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati, penanganan lahan kritis, dan pengembangan energi baru serta terbarukan.
6. **Misi 21:** Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu; dan
7. **Misi 22:** Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah diarahkan untuk menjawab isu strategis: Ancaman stabilitas keamanan dan tergerusnya tradisi-budaya Bali menjadi tantangan dalam mempertahankan identitas kultural di tengah dinamika globalisasi, risiko bencana dan dampak perubahan iklim, dan Aspek tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan dalam koordinasi antarwilayah dan penyediaan layanan publik.

Seluruh 22 misi tersebut dipetakan ke dalam 6 (enam) bidang prioritas pembangunan, sebagai berikut:

Bidang 1. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.

Bidang 2. Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.

Bidang 3. Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata.

Bidang 4. Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi.

Bidang 5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.

Bidang 6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

Visi dan 22 misi pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 telah dirancang secara menyeluruh dan dijabarkan dalam 6 bidang prioritas yang mencerminkan upaya terpadu dalam menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melindungi warisan budaya, memberdayakan masyarakat, dan memulihkan harmoni ekologi sebagai dasar peradaban Bali Era Baru. Tabel berikut ini menggambarkan keterkaitan 22 misi dengan 6 bidang prioritas.

Keterkaitan 22 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali dengan 6 Bidang Prioritas Pembangunan

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029
Misi 1	Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara <i>Niskala-Sakala</i> berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> , yaitu: <i>Atma Kerthi</i> , <i>Segara Kerthi</i> , <i>Danu Kerthi</i> , <i>Wana Kerthi</i> , <i>Jana Kerthi</i> , dan <i>Jagat Kerthi</i> .	Bidang 1. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.
Misi 2	Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi <i>Parahyangan</i> , <i>Pawongan</i> , dan <i>Palemahan</i> .	
Misi 3	Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.	
Misi 4	Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	Bidang 2. Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan.
Misi 5	Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh	

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	
	yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.		
Misi 6	Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.		
Misi 7	Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.		
Misi 8	Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk <i>Widyalyaya</i> dan <i>Pasraman</i> di Desa Adat.		
Misi 9	Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali		
Misi 10	Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional		
Misi 11	Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali	Bidang 3. Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata. Bidang 4. Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi.	
Misi 12	Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang- papan bagi kehidupan Krama Bali.		
Misi 13	Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali.		
Misi 14	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan Krama Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.		
Misi 15	Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi		
Misi 17	Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat		
Misi 18	Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan		
Misi 19	Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	Bidang 5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.	
Misi 20	Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih		
Misi 16	Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan	Bidang 6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.	

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2025-2029		Bidang Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029
	inovasi digital.	
Misi 21	Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.	
Misi 22	Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.	

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pada Tanggal 27 November Tahun 2024, seluruh wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Bali serta kabupaten dan kota di dalamnya telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Pilkada serentak ini bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk periode jabatan Tahun 2025-2029. Pada Bulan Februari Tahun 2025, Provinsi Bali secara resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode jabatan Tahun 2025-2029, dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur terpilih memiliki tugas untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang diantaranya adalah Rancangan Perda tentang RPJMD dan dokumen RKPD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, telah merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali hingga tahun 2030.

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pendidikan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indeks SPM Pendidikan	Pendidikan
			Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Pendidikan
3	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	Pendidikan
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi	Pendidikan
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kesehatan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Balita	Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan TBC	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Kesehatan
			Tingkat Kelulusan peserta pelatihan sumber daya kesehatan	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar	Kesehatan
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 15% penduduknya menerapkan perilaku hidup sehat	Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Persentase Cakupan	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		Ruang
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Persentase cakupan pelayanan air minum layak	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Persentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi di Provinsi Bali	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Nilai kinerja penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Persentase berkurangnya luasan	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kawasan permukiman kumuh		
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kapasitas SDM Pol PP	Persentase SDA/M Pol PP yang ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pengetahuan, mitigasi dan kesiapsiagaan Sumber Daya dalam Pengurangan Risiko Bencana	Persentase kapasitas yang ditingkatkan dalam menghadapi bencana	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya kapasitas respons tanggap bencana	Persentase penanganan darurat bencana terhadap setiap kejadian	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana terhadap setiap kejadian	ketenteraman dan ketertiban umum serta

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				perlindungan masyarakat
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PPKS	Sosial
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Sosial
4	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS dalam panti yang mendapatkan pelayanan dasar	Sosial
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Sosial
6	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Sosial
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase penanganan Taman Makam Pahlawan sesuai standar	Sosial
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Tenaga Kerja
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten	Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Tenaga Kerja
5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Tenaga Kerja
		Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan K3	Persentase pengujian hiperkes dan keselamatan kerja di perusahaan	Tenaga Kerja
6	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja lintas sektor	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya Kepuasan	Nilai Evaluasi Manajemen	Sosial

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerintahan Daerah Provinsi	Pelayanan Kesekretariatan	Kinerja	
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang tertangani	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur Pendukung Cadangan Pangan	Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Pengembangan Kelompok Pangan Lokal	Pangan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Pangan
			Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	Pangan
			Persentase Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pangan
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
2	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya Persentase data informasi pertanahan yang andal	Persentase data informasi pertanahan yang andal	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
3	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya Persentase data informasi pertanahan yang andal	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Lingkungan Hidup
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak lingkungan	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Lingkungan Hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	• Indeks kualitas air laut • Indeks kualitas udara • Indeks kualitas air	Lingkungan Hidup
			Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	Lingkungan Hidup
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Lingkungan Hidup
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan B3 dan limbah B3	Persentase limbah B3 yang terkelola	Lingkungan Hidup
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	Lingkungan Hidup
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam PPLH	Persentase partisipasi masyarakat dalam PPLH	Lingkungan Hidup
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Sampah	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu	Administrasi Kependudukan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Se-Provinsi Bali	Identitas Anak (KIA) sesuai target	dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil Se-Provinsi Bali	Persentase Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak 0-4 Tahun sesuai target	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa melalui Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antardesa dan kemitraan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Desa	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Perhubungan
2	Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya infrastruktur layanan transportasi	Persentase perencanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang telah memiliki kriteria kesiapan	Perhubungan
3	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	Persentase manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindak lanjuti	Perhubungan
		Meningkatnya Cakupan Layanan Angkutan Umum	Persentase jaringan transportasi darat yang terlayani	Perhubungan
		Meningkatnya Kepuasan	Indeks kepuasan masyarakat	Perhubungan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Masyarakat atas Layanan Angkutan Umum	atas layanan angkutan umum	
		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Tingkat pelayanan simpang (tundaan) pada simpang ATCS	Perhubungan
		Meningkatnya Perlengkapan Keselamatan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dan terpelihara terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	Perhubungan
4	Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Persentase Pembangunan/ Lanjutan/ Penyelesaian dan Pengembangan Pelabuhan Laut	Perhubungan
		Meningkatnya pengawasan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Persentase Pelabuhan Pengumpulan Regional yang sudah Menerapkan SPM	Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Komunikasi dan Informasi
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Informasi Publik yang disebarluaskan	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Komunikasi dan Informasi
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika	Nilai Pilar Pemerintah Indeks Transformasi Digital	Komunikasi dan Informasi
		Meningkatnya Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital	Persentase implementasi atas Pengembangan, Inovasi dan Interoperabilitas Layanan Digital	Komunikasi dan Informasi
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi izin usaha	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat dan Aktif	Persentase koperasi sehat	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kompetensi SDM Koperasi dan Pelaku UMKM yang terampil dan andal	Persentase pengelola KUMKM yang berkompeten	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN,BUMD/Swasta	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Program Pemberdayaan Usaha	Meningkatnya kapasitas	Persentase pertumbuhan	Koperasi, Usaha

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	UMKM yang tangguh dan mandiri	kewirausahaan	Kecil dan Menengah
7	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Kelas Usaha UMKM	Persentase UMKM naik kelas	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Penanaman Modal
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya potensi dan peluang penanaman modal dan kemudahan berusaha	Jumlah Peta Potensi Investasi Jumlah UMKM yang difasilitasi Bekerja sama dengan Usaha Besar	Penanaman Modal Penanaman Modal
3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya pemasaran penanaman modal di Provinsi Bali	Persentase Peningkatan Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	Penanaman Modal
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan serta penanganan pengaduan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Penanaman Modal
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Realisasi Investasi	Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya data dan informasi penanaman modal dan Perizinan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penanaman Modal
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
2	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	Kepemudaan dan Olahraga
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	Kepemudaan dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Statistik
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya kualitas keamanan Informasi Pemerintah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Statistik
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Tradisi Budaya	Persentase Tradisi dan Warisan Budaya yang terfasilitasi dan berkembang secara berkelanjutan	Kebudayaan
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Taman Budaya	Kebudayaan
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kesenian Bali yang terfasilitasi, dilestarikan, dan ditampilkan secara aktif	Kebudayaan
4	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya Akses Informasi Sejarah	Persentase Objek Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan yang terdokumentasi dan terakses publik	Kebudayaan
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Eksplorasi Objek Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman yang teregistrasi, terkelola, dan difungsikan	Kebudayaan
6	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permuseuman	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD, Museum Bali & UPTD, Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Kebudayaan
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kebudayaan
8	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Meningkatnya Desa Adat yang mandiri Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Provinsi Bali	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	Perpustakaan (Biro Organisasi Setda Provinsi Bali)
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Provinsi Bali	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	Perpustakaan (Biro Organisasi Setda Provinsi Bali)
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	- Nilai Evaluasi Kearsipan - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	Kearsipan (Biro Umum Setda Provinsi Bali)
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kelautan dan Perikanan
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau	Kelautan dan Perikanan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	kecil	
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali)	Kelautan dan Perikanan
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Kelautan dan Perikanan
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pariwisata
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Berkualitas	Persentase Destinasi Pariwisata yang berstandar	Pariwisata
3	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pariwisata
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kapasitas usaha ekonomi kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang memenuhi standar	Pariwisata
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi	Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Fasilitas Penyuluran Sarana Pertanian	Pertanian
			Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Pertanian
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Pertanian
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Pertanian
			Persentase Peningkatan	Pertanian

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Populasi Ternak	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Prasarana Pertanian	Pertanian
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	Pertanian
			Persentase Pengujian Penyakit Hewan dan Pangan Asal Hewan	Pertanian
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pertanian
6	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Pertanian yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Pertanian
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Lingkungan Hidup
2	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya perlindungan hutan dan produktivitas hasil hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Kehutanan
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem	Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove	Kehutanan
4	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok	Kehutanan
5	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya kelestarian dan kualitas lahan di sepanjang aliran sungai	Indeks Kualitas Lahan	Kehutanan
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Meningkatnya usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan	Persentase usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berwawasan lingkungan	Energi Sumber Daya Mineral
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Mitigasi Kerusakan Alam Bali melalui Pengendalian Eksploitasi Air Tanah yang berlebihan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Air Tanah sesuai dengan Dokumen Ijin dan Penetapan Nilai Perolehan Air tanah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Energi Sumber Daya Mineral
3	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya Kapasitas EBT (Energi Baru Terbarukan)	Jumlah Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan)	Energi Sumber Daya Mineral
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya Pengusahaan Ketenagalistrikan	Persentase Pengusahaan Ketenagalistrikan	

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kepuasan terhadap fasilitas sarana distribusi	Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang Pokok	Perdagangan
4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang berhasil masuk ke pasar ritel modern atau e-commerce	Perdagangan
5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Nilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan perizinan dan pendaftaran	Perdagangan
6	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor industri pengolahan	Perdagangan
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks Keberdayaan Konsumen	Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya industri kreatif lokal yang terkorelasi pada penyediaan pangan	Jumlah Penumbuhan industri kreatif	Perindustrian
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase pelaku industri yang mematuhi ketentuan izin usaha	Perindustrian
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Jumlah pelaku usaha industri yang telah terdaftar dalam SIINas	Perindustrian
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tercapainya Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD	Transmigrasi
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Umum)
				Pendukung Urusan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
				Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
				Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)
				Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
				Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokol)
		Meningkatnya kepuasan layanan informasi publik dan layanan keprotokolan	Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Keprotokolan	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokol)
2	Program Penataan Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
3	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Pendukung Urusan Pemerintahan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian)
6	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
8	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Ditindaklanjuti	
4.02	SEKRETARIAT DPRD			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penganggaran, pengawasan serta kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)
5.01	PERENCANAAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
5.02	KEUANGAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Keuangan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kesekretariatan		
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran disusun Tepat Waktu	Keuangan
			Persentase Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota disusun tepat waktu	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah disusun Tepat Waktu	
			Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Provinsi disusun Tepat Waktu	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Keuangan
			Persentase pendapatan pemanfaatan BMD terhadap total PAD	Keuangan
			Jumlah terbit buku sertifikat tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi Bali	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sekretariatan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	Keuangan
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keuangan
6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan PAD	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target PAD	Keuangan
5.03	KEPEGAWAIAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Kepegawaian
2	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Indeks NSPK	Kepegawaian
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan (diklat)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Penelitian dan Pengembangan
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan yang Digunakan Sebagai Landasan Rekomendasi dalam Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
3	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan terkait	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Terkait Riset dan	Penelitian dan Pengembangan

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH YANG MENGAMPU URUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		riset dan inovasi daerah	Inovasi Daerah	
		Meningkatnya fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual	Persentase Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Pendaftarannya	Penelitian dan Pengembangan
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan (Penghubung)
2	Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya komunikasi pemerintahan secara vertikal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	Penunjang Urusan Pemerintahan (Penghubung)
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pengawasan
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan	Pengawasan
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Pengawasan
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pemerintahan Umum
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Deteksi Dini dan Cegah Dini	Indeks Kewaspadaan Nasional di Daerah	Pemerintahan Umum
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik masyarakat di daerah	Persentase terlaksananya kebijakan fasilitasi politik dalam negeri	Pemerintahan Umum
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama di masyarakat	Indeks Pemahaman ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Pemerintahan Umum
6	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Pemerintahan Umum

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2025. Program-program diatas akan di break down ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
20	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Mebel Sekolah
24	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
26	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
27	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
31	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
32	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
33	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			Kejuruan	Pendidikan
36	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
37	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
39	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
41	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
42	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
43	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
44	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
46	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
47	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
48	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
49	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
51	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
52	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
53	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
54	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
55	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
56	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
57	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
58	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
59	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
60	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
61	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
62	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
63	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
64	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
66	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
67	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
68	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
69	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
70	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
71	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
72	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
73	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
74	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75	Dinas Pendidikan,	Program Penunjang	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Komunikasi,

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumber Daya Air dan Listrik
76	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
77	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
79	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
80	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
81	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
82	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel
83	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
84	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
86	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
87	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
88	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
89	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
90	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Kepemudaan	dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pelopor Tingkat Provinsi
91	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
92	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
93	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
94	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
95	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
96	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
97	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
98	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
99	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
101	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit
102	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	Pengembangan Rumah Sakit

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Masyarakat	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
103	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
104	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
105	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
106	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
107	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
108	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
109	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
110	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
111	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
112	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
113	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
114	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
115	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
116	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
117	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
118	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
119	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
120	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
121	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
122	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
123	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
124	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
125	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
126	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
127	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
128	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
129	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
130	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
131	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
132	Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
133	Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
134	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
135	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
136	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
137	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
138	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
139	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi		
140	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
141	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
142	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
143	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
144	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
146	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
147	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
148	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
149	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
151	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
152	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
153	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
154	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
155	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
156	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
157	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
158	Dinas Kesehatan	Program Penunjang	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	Penggandaan
159	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
160	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
161	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
162	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
163	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
164	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
165	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
166	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
167	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
168	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
169	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
170	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
171	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
172	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
173	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
174	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
175	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
176	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
177	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
178	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
179	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
180	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
181	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
182	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
183	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
184	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
185	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
186	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
187	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
188	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
189	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
190	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
191	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
192	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
193	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
194	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
195	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel
196	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
197	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
198	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
199	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
200	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
201	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
202	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
203	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
204	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
205	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
206	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
207	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
208	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
209	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
210	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
211	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
212	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
213	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
214	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah	Pembangunan Tanggul Sungai

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			Kabupaten/Kota	
215	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
216	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
217	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
218	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
219	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
220	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
221	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
222	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
223	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
224	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
225	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
226	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
227	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
228	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
229	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
230	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
231	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
232	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
233	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
234	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
235	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
236	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan
237	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan
238	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan
239	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
240	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar
241	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
242	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan
243	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
244	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengelolaan Leger Jalan
245	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
246	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
247	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
248	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
249	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi
250	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
251	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
252	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
253	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
254	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
255	Dinas Pekerjaan Umum,	Program	Koordinasi dan Sinkronisasi	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
256	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
257	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
258	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
259	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
260	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
261	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
262	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
263	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
264	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
265	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
266	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
267	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
268	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
269	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
270	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Permukiman			
271	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
272	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
273	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
274	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
275	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
276	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
277	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
278	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
279	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
280	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
281	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
282	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
283	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
284	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
285	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
286	Dinas Pekerjaan Umum,	Program Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lainnya
287	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
288	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
289	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
290	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
291	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
292	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
293	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
294	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
295	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
296	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
297	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
298	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
299	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
300	Dinas Pekerjaan Umum,	Program	Perencanaan Penggunaan	Koordinasi dan Sinkronisasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penatagunaan Tanah	Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perencanaan Penggunaan Tanah
301	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
302	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
303	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
304	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
305	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
306	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
307	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
308	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
309	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
310	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
311	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
312	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
313	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
314	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
315	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
316	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
317	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
318	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
319	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
320	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
321	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
322	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
323	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
324	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
325	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
326	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
327	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
328	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
329	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
330	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
331	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
332	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
333	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
334	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
335	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
336	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi
337	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
338	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
339	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
340	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
341	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
342	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
343	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
344	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Provinsi
345	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi
346	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi
347	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
348	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
349	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
350	Badan Penanggulangan	Program	Penataan Sistem Dasar	Pembinaan dan Pengawasan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
351	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
352	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
353	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
354	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
355	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
356	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
357	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
358	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
359	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
360	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
361	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
362	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
363	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
364	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
365	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
366	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
367	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
368	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			Pemerintahan Daerah	
369	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
370	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
371	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
372	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
373	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
374	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
375	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
376	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
377	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
378	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
379	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
380	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
381	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
382	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
383	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu
384	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
385	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
386	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan
387	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan
388	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan
389	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
390	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
391	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
392	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
393	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
394	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
395	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
396	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan
397	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan
398	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
399	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
401	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
402	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
403	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
404	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan
405	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan
406	Dinas Sosial,	Program Rehabilitasi	Rehabilitasi Sosial Dasar	Penyediaan Makanan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Sosial	Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
407	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal
408	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Pengangkatan Anak antar WNI
409	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
410	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
411	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
412	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
413	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial
414	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
415	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
416	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
417	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
418	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
419	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
420	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
421	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
422	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
423	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
424	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
425	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
426	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
427	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
428	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
429	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
430	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
431	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
432	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
433	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
434	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
435	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
436	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
437	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
438	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
439	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
440	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
441	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
442	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
443	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
444	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
445	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
446	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
447	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
448	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
449	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
450	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
451	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			Kabupaten/Kota	
452	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
453	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
454	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
455	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
456	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
457	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
458	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
459	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
460	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
461	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
462	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
463	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja
464	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
465	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			Daerah Provinsi	
466	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
467	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
468	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
469	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
470	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
471	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
472	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
473	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
474	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
475	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
476	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
477	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
478	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
479	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
480	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
481	Dinas Ketenagakerjaan dan	Program Penunjang	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Energi Sumber Daya Mineral	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	Penggandaan
482	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
483	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
484	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
485	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
486	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
487	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
488	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
489	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
490	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
491	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
492	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
493	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
494	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
495	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
496	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
497	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
498	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
499	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
500	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
501	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
502	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
503	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
504	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
505	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
506	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
507	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
508	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
509	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
510	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
511	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
512	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
513	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
514	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
515	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Pencatatan Sipil		Pemerintahan Desa	
516	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
517	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
518	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
520	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
521	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
522	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
523	Dinas Pemberdayaan	Program Penunjang	Perencanaan,	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
524	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
525	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
526	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
527	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
528	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
529	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
530	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
531	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
532	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
533	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
534	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
535	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
536	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
537	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
538	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Pencatatan Sipil		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dan KIE Program Bangga Kencana
539	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
540	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
541	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
542	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
543	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
544	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
545	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
546	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
547	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
548	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
549	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
550	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
				Elektronik
551	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
552	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
553	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
554	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
555	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
556	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
557	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
558	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
559	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
560	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
561	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
562	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
563	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
564	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
565	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
566	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
567	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
568	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
569	Dinas Perhubungan	Program Penunjang	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	Penggandaan
570	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
571	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
572	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
573	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
574	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
575	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
576	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
577	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
578	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
579	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
580	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
581	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
582	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
583	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
584	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
585	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
586	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
587	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
588	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
589	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	
590	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
591	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
592	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
593	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
594	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
595	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
596	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
597	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
598	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
599	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
600	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
601	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
602	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
603	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
604	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Penyusunan Konten
605	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi
606	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
607	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi Dan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Komunikasi Publik	Pemerintah Daerah Provinsi	
608	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pelayanan Informasi Publik
609	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
610	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
611	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
612	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
613	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
614	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
615	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi penyusunan proses bisnis
616	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
617	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
618	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
619	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
620	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
621	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
622	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
623	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
624	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
625	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
626	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
627	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
628	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
629	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
630	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
631	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
632	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
633	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
634	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
635	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
636	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel
637	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
638	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
639	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
640	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
641	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
642	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
643	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
644	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
645	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Persandian untuk	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
646	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
647	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
648	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
649	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
650	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
651	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
652	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
653	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
654	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
655	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
656	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
657	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
658	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
659	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
660	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil
661	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
662	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
663	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
664	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
665	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
666	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
667	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
668	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
669	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
670	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
671	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
672	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
673	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
674	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
675	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
676	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
677	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
678	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
679	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
680	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
681	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
682	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
683	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
684	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
685	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
686	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
687	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
688	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
689	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
690	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Program Pengembangan Iklim	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Satu Pintu	Penanaman Modal		
691	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
692	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
693	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
694	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pengawasan Penanaman Modal
695	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
696	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
697	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
698	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
699	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
701	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
702	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
703	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
704	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
705	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
706	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
707	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
708	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
709	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
710	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
711	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
712	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
713	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
714	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
715	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
716	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
717	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
718	Dinas Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
719	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Penetapan Cagar Budaya
720	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pelindungan Cagar Budaya
721	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengembangan Cagar Budaya
722	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pemanfaatan Cagar Budaya
723	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian	Pengelolaan Cagar Budaya	Pembinaan dan Peningkatan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Peringkat Provinsi	Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
724	Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
725	Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
726	Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
727	Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
728	Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
729	Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
730	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
731	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
732	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
733	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
734	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
735	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
736	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
737	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
738	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
739	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
740	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
741	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
742	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
743	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
744	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
745	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
746	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
747	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
748	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
749	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
750	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
751	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
752	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
753	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
754	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
755	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
756	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
757	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
758	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
759	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
760	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
761	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
762	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
763	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
764	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Komunikasi,

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumber Daya Air dan Listrik
765	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
766	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
767	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
768	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
769	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
770	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
771	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
772	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
773	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
774	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
775	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
776	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
777	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
778	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
779	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
780	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
781	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
782	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
783	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lainnya
784	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
785	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
786	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
787	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
788	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
789	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
790	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
791	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat
792	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Penyelenggaraan Desa Adat	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
793	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
794	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
795	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
796	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
797	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
798	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
799	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
800	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
801	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
802	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
803	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
804	Dinas Kelautan dan	Program Pengelolaan	Pengelolaan Ruang Laut	Pengelolaan Kawasan Konservasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Perikanan	Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
805	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
806	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
807	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
808	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
809	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
810	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
811	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
812	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
813	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
814	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
815	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
816	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
817	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
818	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
819	Dinas Kelautan dan	Program Penunjang	Perencanaan,	Penyusunan Dokumen

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Perikanan	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah
820	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
821	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
822	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
823	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
824	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
825	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
826	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
827	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
828	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
829	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
830	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
831	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
832	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
833	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
834	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
835	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
836	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
837	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
838	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
839	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Perikanan	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	dan Konsultasi SKPD
840	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
841	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
842	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
843	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
844	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
845	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
846	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
847	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
848	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
849	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
850	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
851	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
852	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
853	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
854	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
855	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
856	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
857	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
858	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
859	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
860	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
861	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
862	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
863	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
864	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
865	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
866	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
867	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
868	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
869	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata
870	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
871	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
872	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
873	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
874	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
875	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
876	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
877	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
878	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
879	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
880	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
881	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
882	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
883	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
884	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
885	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
886	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
887	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
888	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
889	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
890	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
891	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
892	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
893	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
894	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
895	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
896	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
897	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
898	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
899	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
901	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
902	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
903	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
904	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
905	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
906	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Sarana Pertanian	Benih Tanaman	Pangan, dan Perkebunan
907	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
908	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
909	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
910	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
911	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
912	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
913	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
914	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
915	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
916	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
917	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
918	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
919	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesejahteraan Hewan	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
920	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
921	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
922	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
923	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
924	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
925	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
926	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
927	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
928	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
929	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
930	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
931	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
932	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
933	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
934	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
935	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
936	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
937	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
938	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
939	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
940	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	
941	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
942	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
943	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
944	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
945	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
946	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
947	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
948	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
949	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
950	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
951	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
952	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
953	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
954	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
955	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
956	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
957	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
958	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
959	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
960	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
961	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
962	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
963	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
964	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
965	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
966	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
967	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
968	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
969	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
970	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
971	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
972	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi KLHS
973	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
974	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
975	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
976	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
977	Dinas Kehutanan dan	Program	Pengumpulan Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Lingkungan Hidup	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
978	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
979	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
980	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
981	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
982	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
983	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
984	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
985	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
986	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
987	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
988	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
989	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
990	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
991	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
992	Dinas Kehutanan dan	Program Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
993	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
994	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
995	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
996	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
997	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
998	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
999	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1001	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1002	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1003	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1004	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1005	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1006	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1007	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1008	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1009	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1010	Dinas Kehutanan dan	Program Penunjang	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	Perlengkapan Kantor
1011	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1012	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1013	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1014	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1015	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1016	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1017	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1018	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1019	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1020	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1021	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1022	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1023	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1024	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1025	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1026	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1027	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1028	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1029	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1030	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	
1031	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1032	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1033	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1034	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1035	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1036	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1037	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1038	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1039	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1040	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1041	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1042	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1043	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1044	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1045	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1046	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1047	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1048	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1049	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1050	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1051	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1052	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1053	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
1054	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
1055	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
1056	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Peningkatan Citra Produk Ekspor
1057	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
1058	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
1059	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian
1060	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
1061	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1062	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1063	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1064	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1065	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1066	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1067	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1068	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1069	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1070	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1071	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1072	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1073	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1074	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1075	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1076	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1077	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1078	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1079	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1080	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1081	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1082	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1083	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1084	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
1085	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
1086	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
1087	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
1088	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1089	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1090	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1091	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1092	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1093	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1094	Sekretariat Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
1095	Sekretariat Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1096	Sekretariat Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
1097	Sekretariat Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
1098	Sekretariat Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			Provinsi	
1099	Sekretariat Daerah	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
1100	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis
1101	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
1102	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
1103	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
1104	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
1105	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penataan Analisis Jabatan
1106	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1107	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1108	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
1109	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
1110	Sekretariat Daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
1111	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
1112	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Penataan Wilayah
1113	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1114	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
1115	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
1116	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
1117	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
1118	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
1119	Sekretariat Daerah	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1120	Sekretariat Daerah	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
1121	Sekretariat Daerah	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan
1122	Sekretariat Daerah	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
1123	Sekretariat Daerah	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
1124	Sekretariat Daerah	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum
1125	Sekretariat Daerah	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
1126	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
1127	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
1128	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
1129	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
1130	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1131	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
1132	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
1133	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
1134	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
1135	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
1136	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1137	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
1138	Sekretariat Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1139	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1140	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1141	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1142	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1143	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1144	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1145	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1146	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1147	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1148	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1149	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1150	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1151	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1152	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1153	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1154	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1155	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1156	Sekretariat Daerah	Program Penunjang	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	Penggandaan
1157	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1158	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1159	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1160	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1161	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1162	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1163	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1164	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1165	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1166	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1167	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1168	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1169	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1170	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1171	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1172	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1173	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1174	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan Mebel

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	
1175	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1176	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1177	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1178	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1179	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1180	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1181	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1182	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1183	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1184	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
1185	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
1186	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
1187	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Penyiapan Materi Pimpinan
1188	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
1189	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
1190	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
1191	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1192	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Keprotokolan	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
1193	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Keprotokolan	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
1194	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Dan Fungsi Dprd		Daerah
1195	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda
1196	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
1197	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS
1198	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1199	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD
1200	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Perubahan APBD
1201	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
1202	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
1203	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
1204	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
1205	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
1206	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1207	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
1208	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1209	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
1210	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD
1211	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
1212	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
1213	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1214	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1215	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD
1216	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
1217	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Fasilitasi Tugas DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
1218	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
1219	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1220	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1221	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1222	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1223	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
1224	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1225	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1226	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1227	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1228	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1229	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1230	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1231	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1232	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1233	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1234	Sekretariat DPRD	Program Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1235	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1236	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1237	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
1238	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
1239	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
1240	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD
1241	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1242	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
1243	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
1244	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
1245	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1246	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
1247	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
1248	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1249	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
1251	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1252	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
1253	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1254	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
1255	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1256	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
1257	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1258	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
1259	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1260	Badan Perencanaan	Program Koordinasi	Koordinasi Perencanaan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Pembangunan Daerah	Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Infrastruktur dan Wilayah	dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
1261	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
1262	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah
1263	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1264	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1265	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1266	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1267	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1268	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1269	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1270	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1271	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1272	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1273	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1274	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1275	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1276	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1277	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
1278	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1279	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1280	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1281	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1282	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1283	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1284	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1285	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
1286	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1287	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
1288	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
1289	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1290	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1291	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
1292	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
1293	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1294	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1295	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
1296	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
1297	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1298	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
1299	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
1300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1301	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
1302	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
1303	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
1304	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
1305	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
1306	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah
1307	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah
1308	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
1309	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
			Daerah	
1310	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1311	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1312	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1313	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1314	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1315	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1316	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1317	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1318	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1319	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1320	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1321	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1322	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1323	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1324	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1325	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1326	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1327	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1328	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1329	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1330	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel
1331	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1332	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1333	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1334	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1335	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
1336	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1337	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
1338	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1339	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1340	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1341	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1342	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1343	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1344	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1345	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1346	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1347	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1348	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
1349	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
1350	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
1351	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
1352	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
1353	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
1354	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
1355	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1356	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah
1357	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1358	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1359	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1360	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1361	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1362	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1363	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1364	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1365	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1366	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1367	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1368	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1369	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1370	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1371	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1372	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1373	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1374	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1375	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1376	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	Perlengkapan Kantor
1377	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1378	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1379	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1380	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1381	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1382	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1383	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1384	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1385	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1386	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1387	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1388	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1389	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1390	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1391	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1392	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1393	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1394	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1395	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1396	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi		
1397	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1398	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1399	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1400	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1401	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1402	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1403	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1404	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1405	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1406	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1407	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1408	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1409	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1410	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1411	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1412	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1413	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1414	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1415	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1416	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1417	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1418	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1419	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1420	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1421	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1422	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1423	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1424	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1425	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1426	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1427	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1428	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1429	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1430	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1431	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1432	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1433	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1434	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1435	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1436	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1437	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1512	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1513	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1514	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
1515	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
1516	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
1517	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
1518	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
1519	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
1520	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
1521	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
1522	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN
1523	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center
1524	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
1525	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
1526	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
1527	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
1528	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
1529	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1530	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
1531	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
1532	Badan Kepegawaian dan	Program	Penilaian dan Evaluasi	Pembinaan Disiplin ASN

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian Daerah	Kinerja Aparatur	
1533	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
1534	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1535	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1536	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1537	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1538	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1539	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1540	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1541	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1542	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1543	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1544	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1545	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1546	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1547	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1548	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1549	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1550	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1551	Badan Kepegawaian dan	Program Penunjang	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor
1552	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1553	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1554	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1555	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1556	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1557	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1558	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1559	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
1560	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
1561	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1562	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
1563	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
1564	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1565	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
1566	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
1567	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
1568	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
1569	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
1570	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
1571	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
1572	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
1573	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
1574	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
1575	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
1576	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
1577	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
1578	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1579	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1580	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1581	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1582	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1583	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1584	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1585	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1586	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1587	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
1588	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1589	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1590	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1591	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1592	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1593	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1594	Badan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
1595	Badan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
1596	Badan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
1597	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1598	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1599	Badan Penghubung	Program Penunjang	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1600	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1601	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1602	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1603	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1604	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1605	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1606	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1607	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1608	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1609	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1610	Badan Penghubung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1611	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
1612	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
1613	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja
1614	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan
1615	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
1616	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal
1617	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
1618	Inspektorat	Program Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Pengawasan	Tujuan Tertentu	
1619	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
1620	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
1621	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
1622	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
1623	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
1624	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1625	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
1626	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1627	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1628	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1629	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1630	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1631	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1632	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1633	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1634	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1635	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1636	Inspektorat	Program Penunjang	Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Sarana dan Prasarana

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1637	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1638	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1639	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1640	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1641	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1642	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1643	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1644	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Paskibraka
1645	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1646	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1647	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1648	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		Sosial		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1649	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
1650	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1651	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1652	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1653	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1654	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1655	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1656	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1657	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1658	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1659	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
1660	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1661	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1662	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1663	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1664	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1665	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
1666	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1667	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) sosial.

Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN			
1.1	Pendidikan menengah	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
1.2	Pendidikan khusus	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara	100%	

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
		pemenuhan standar.		
2	KESEHATAN			
2.1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2.2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
3	PEKERJAAN UMUM			
3.1	penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara.
3.2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara.
4	PERUMAHAN RAKYAT			
4.1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
		b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
4.2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
		b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
5	TRANTIBUMLIMNAS			
5.1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	100%	warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi.
6	SOSIAL			
6.1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penyandang disabilitas telantar.

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
6.2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.	b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.	100%	anak telantar.
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Bali Tahun 2025 menggunakan indikator kinerja makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,63	79,37	0,94	-
2	Angka Kemiskinan	3,80	3,42	-0,38	Persentase penduduk miskin September 2025
3	Angka Pengangguran	1,79	1,49	-0,30	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 (%)
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,48	5,82	0,35	Pertumbuhan Ekonomi (%)
5	PDRB perkapita (juta Rp/orang)	67,32	72,66	7,93	Tidak tersedia penghitungan Pendapatan perkapita Provinsi Bali, didekati dengan PDRB perkapita (juta Rp/orang)
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,35	0,33	-0,015	Gini Rasio September 2025

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat 0,74 poin atau 0,94 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian ini, IPM Provinsi Bali berada pada status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Pada Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,46 tahun. Kondisi ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan akan hidup 0,36 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang lahir pada

tahun 2024. Pada Dimensi Pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2025 sebesar 13,63 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,75 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Rata-rata Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun (yang disesuaikan) meningkat 463 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2024. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Angka Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada September 2025 tercatat sebesar 3,42 persen, turun 0,30 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 0,38 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada September 2025 tercatat sebanyak 160,09 ribu orang, turun 13,15 ribu orang terhadap Maret 2025 dan turun 16,12 ribu orang terhadap September 2024. Garis Kemiskinan di Provinsi Bali pada September 2025 tercatat sebesar Rp642.986,- per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp445.225,- per kapita per bulan (69,24 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp197.761,- per kapita per bulan (30,76 persen). (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Angka Pengangguran. Pada Agustus 2025, angkatan kerja di Bali tercatat sebanyak 2,74 juta orang, meningkat 28,62 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama, TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin menjadi 77,31%. Pada Agustus 2025, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,70 juta orang, meningkat 36,31 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang meningkat sebanyak 23,38 ribu orang. Sementara sektor dengan penurunan terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkurang sebesar 16,25 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Agustus 2025 sebesar 1,49%, turun 0,30 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024. TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Karangasem sebesar 1,80%, sedangkan TPT terendah tercatat di Kabupaten Bangli sebesar 0,73%. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita. Perekonomian Bali pada triwulan IV-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp85,05 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100) sebesar Rp46,40 triliun. Ekonomi Bali selama periode triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 3,33 persen jika dibandingkan dengan triwulan III-2025 (q-to-q). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,86 persen. Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2025 sampai dengan triwulan IV-2025, maka ekonomi Bali pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan IV-2025 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

yang berkontribusi sebesar 22,10 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 51,68 persen. (Sumber BPS Provinsi Bali)

Gini Ratio. Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali yang diukur dengan menggunakan Gini Rasio tercatat sebesar 0,333. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,020 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,353 dan turun 0,015 poin jika dibandingkan kondisi September 2024 yang tercatat sebesar 0,348. Gini Rasio perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,338. Capaian ini turun 0,014 poin dibandingkan kondisi Maret 2025 maupun September 2025 yang nilainya tercatat sama sebesar 0,352. Gini Rasio perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,269. Capaian ini turun 0,008 poin dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,277 dan turun 0,016 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2024 yang tercatat sebesar 0,285.. (Sumber BPS Provinsi Bali)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
1.a.1	Pendidikan	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan menengah	191.875	93.82	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-
			Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan	204.515				
1.a.2	Pendidikan	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan khusus	2.762	58.37	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-
			Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai	4.732				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
			dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan					
1.a.3	Pendidikan	Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	1.973	74.68	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-
			Jumlah seluruh toilet	2.642				
1.a.4	Pendidikan	Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	4.303	71.57	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-
			Jumlah seluruh ruang kelas	6.012				
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung Rumah Sakit Rujukan di seluruh provinsi	8.968	2.04	Per 1000 Penduduk	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
			Jumlah penduduk provinsi	4.404.281				
1.b.2	Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna	Jumlah Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna	77	96.25	%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	-
			Jumlah Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi	80				
1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	446.127	100.00	%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	-
			Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	446.127				
1.b.4	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	53.314	82.99	%	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	-
			Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa	64.242				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik (Ha)	142.074,3	82.14	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	-
			Luas daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	172.972				
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan provinsi (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang)	659.2	81.85	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Cuaca ekstrem dan kejadian bencana alam seperti hujan deras, tanah longsor, serta banjir menyebabkan kerusakan fisik pada jalan dan struktur jembatan, terutama di wilayah dengan kondisi topografi rawan bencana.
			Panjang jalan kewenangan provinsi (Km)	805.35				
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir kewenangan provinsi (Ha)	130.74	0.09	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Untuk data dukung Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir kewenangan provinsi (Ha) ada pada Pergub Kajian Resiko Bencana Banjir Tahun 2025-2029 (Halaman : 78) atau pada Link KRB Provinsi Bali 2025-2029 https://balikom.info/KRBProvinsiBali2025-2029
			Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir kewenangan provinsi (Ha)	143.756,42				
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran	Jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	408	89.08	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	Banjir Bandang pada bulan september mengakibatkan rusaknya beberapa

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	pada tahun N (L/s)				dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	infrastruktur di SPAM Petanu dan Penet, hal ini mengakibatkan terganggunya pelayanan air curah kepada pelanggan (oftaker) dalam waktu yang cukup lama.
			Jumlah kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan pada tahun N (non kumulatif) (L/s)	458				
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	Total volume limbah yang masuk dalam Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Regional	38.995,8789122	76.46	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	-
			Total kapasitas pengolahan limbah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Regional	51.000				
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja ahli konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	105	100.00	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Jumlah tenaga kerja ahli konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebanyak 280 orang namun tidak bisa dimasukan angka tersebut dikolom elemen pembilang.
			Jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah provinsi	105				
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai	352	9.67	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	Jumlah KKPR yang sudah dinilai dan yang sudah diterbitkan merupakan data hasil rekapitulasi 9

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi	pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun				dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Kota/Kabupaten
			Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	3.641				
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	300	100.00	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	Telah dilakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Bali dengan hasil sesuai tabel terlampir
			Jumlah rencana warga negara korban bencana provinsi yang akan ditangani pada tahun N	300				
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah warga negara terkena relokasi program provinsi yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun N	0	0.00	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	-
			Jumlah rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun N	1				
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	1.98	100.00	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	-
			Target luas kawasan kumuh 10-15 Ha pada	1.98				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
			tahun N					
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	2	66.67	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	Dokumen kebencanaan Rencana penanggulangan bencana (RPB) masih dalam tahap legalisasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
			Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah provinsi = 3	3				
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	9	100.00	%	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	-
			Jumlah pengaduan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	9				
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	22	100.00	%	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	-
			Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	22				
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra	9	100.00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
			bencana pada tahun N					
			Jumlah target kabupaten/kota di provinsi yang direncanakan penanganan pra bencana dan terdapat pada rencana kerja perangkat daerah pada tahun N	9				
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	9	100.00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	-
			Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	9				
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pasca bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana	9	100.00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	-
			Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	9				
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	760	100.00	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	-
			Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial	760				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
			dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen					
1.f.2	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2.650	100.00	%	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	-
			Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen	2.650				
1.f.3	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	510	100.00	%	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	-
			Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen	510				
1.f.4	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	327	100.00	%	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	-
			Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti sesuai hasil asesmen	327				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
1.f.5	Sosial	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3.362	100.00	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	-
			Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	3.362				
1.f.6	Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	83.158	100.00	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	Sesuai pedoman LPPD Tahun ini disebutkan "Penerima Manfaat" dan dasar hukum merujuk pada Program Keluarga Harapan. Sementara Data Pembilang BNBA sangat sulit untuk dilengkapi karena Data Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan hanya ada di Pusdatin Kemensos, pendamping Provinsi tidak memiliki akses untuk BNBA sejak tahun 2025. Berdasarkan arahan dari tim penyusun LPPD pada rapat tanggal 11 Maret 2026 bahwa data BNBA tidak perlu di upload ke sistem karena bersifat sensitif dan rahasia yang hanya bisa diakses oleh PUSDATIN Kemensos yang
			Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah provinsi	83.158				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
								diupload, hanya data rekap saja. Terima kasih.
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	9	64.29	%	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Beberapa kegiatan yang direncanakan tetap dilaksanakan walaupun tanpa dukungan APBD, dioptimalisasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di provinsi	14				
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	457	0.37	%	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Sudah disesuaikan.
			Jumlah Perusahaan	124.217				
2.a.3	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	$\sum$ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun N	124.217	100.00	%	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	1). Nilai pembilang jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan sesuai data dukung yang terupload adalah 124.217 perusahaan pada data dukung yang berjudul 'Rekapitulasi Total Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan pada Tahun 2025 dan Total Perusahaan yang Terdaftar melalui Mekanisme Wajib Laporan
			$\sum$ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun N	124.217				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
								Ketenagakerjaan pada Tahun 2025 Provinsi Bali Tahun 2025'. 2). Nilai 182 perusahaan pada data dukung terupload adalah data dukung penyebut yang berjudul 'Rincian Total Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Pada Tahun 2025 dan Total Perusahaan yang Terdaftar melalui Mekanisme Wajib Lapo Ketenagakerjaan pada Tahun 2025 Provinsi Bali'. Karena data 124.217 maka disertakan rincian data pada link yang di akses : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QA1emiWLqvL8B3484H52mGFWS_vmU60z
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi	11.321	100.00	%	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Secara normatif, istilah "pekerja rentan" tidak didefinisikan secara eksplisit dalam satu UU khusus (Peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yaitu UU NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembaruannya dalam UU NO.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja).
			Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan	11.321				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
			jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi					
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	60	100.00	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	-
			Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	60				
2.b.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	144	100.00	%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	-
			Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	144				
2.c.1	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi	379.01	296.98	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	-
			Target jumlah cadangan pangan	127.62				
2.d.1	Pertanahan	Persentase ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah	13.289.711	69.23	%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	-
			Luas seluruh tanah yang masuk	19.196.974				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
			dalam aset pemerintah daerah					
2.d.2	Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada kondisi eksisting	5.531.64 8.131	98.95	%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	data perwujudan masih bersifat indikatif
			Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	5.590.51 9.716				
2.e	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12	100.00	%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Jumlah penanggung jawab usaha yang taat sebanyak 26, target tahunan pengawasan sebanyak 12 usaha dan/atau kegiatan, sehingga capaian 216,67%, namun hasil pada sistem tidak dapat melebihi 100%.
			Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	12				
2.f.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100.00	%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Desa, Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	Ketepatan dalam penyusunan Data Kependudukan Provinsi menunggu Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
			2 (dua) Dokumen	2				
2.f.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan	Pemanfaatan data kependuduka	Perangkat Daerah Provinsi yang telah	0	00,00	%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat,	Tidak semua Perangkat Daerah membutuhkan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
	Sipil	n	memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	akses data kependudukan, perlunya biaya dalam mengadakan Jaringan VPN, wajib menerapkan sistem keamanan bersertifikat ISO 27001 serta perlunya validasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
			Jumlah Perangkat Daerah Provinsi	1				
2.g.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa mandiri tahun N - Jumlah desa mandiri tahun N-1	524	-5.76	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	Terdapat perubahan parameter Indeks Desa Membangun (IDM) 2024 dengan tolak ukur 3 parameter menjadi Indeks Desa 2025 dengan tolak ukur 6 parameter. Desa-desa di Provinsi Bali masih dalam tahap penyesuaian terhadap 6 dimensi tersebut.
			Jumlah desa mandiri tahun N-1	556				
2.g.2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang di tindaklanjuti	1	100.00	%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	
			Jumlah kerja sama antar desa lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	1				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
2.h.1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun	Total Fertility Rate/TFR provinsi	2.01	98.05	%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Desa, Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	Tidak terdapat data jumlah kelahiran baik dari DPMD Dukcapil dan Kemendukbangga atau Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Data yang tersedia di Kemendukbangga/ Perwakilan BKKBN Provinsi Bali berupa angka ASFR. Data hasil TFR dirilis oleh pusat.
			Target Fertility Rate/TFR provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap provinsi yang bersangkutan	2.05				
2.h.2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	419.628	68.88	%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Desa, Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	Tidak terdapat permasalahan.
			Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun	609.258				
2.h.3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) provinsi	5.3	51.46	%	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat, Desa, Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	Definisi baku Unmeetneed dengan rumus Unmeetneed yang tertera di pedoman tidak sesuai. Untuk Penyebut di buku pedoman berdasarkan target dokumen daerah sedangkan di Kemendagri Nomor 100.2.1.7- 109 Tahun 2026 berdasarkan target yang ditentukan oleh daerah.
			Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan	10.3				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
2.i.1	Perhubungan	Konektivitas Provinsi	$Ktd = (Ktd \times Wtd) + (Ktl \times Wtl)$	0.75	0.75	Rasio	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	Terkait data yang disampaikan untuk pemenuhan IKK Rasio Konektivitas. Dinas Perhubungan Provinsi Bali hanya dapat memenuhi data KTD dengan kewenangan provinsi khususnya Dinas Perhubungan yaitu data Trayek Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP) dan KTL yaitu data trayek penyeberangan dan perintis. Untuk trayek Angkutan Kota antar Provinsi (AKAP) belum dapat dipenuhi, karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
2.i.2	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Volume/Capacity Ratio di Jalan Provinsi	0.66	0.66	Rasio	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	-
2.i.3	Perhubungan	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0	0.00	%	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	Terkait pemenuhan IKK Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan belum dapat dipenuhi, dikarenakan jumlah perusahaan
			Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	27				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
								angkutan umum yang terdata belum memiliki atau tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan. Hal ini berkaitan dengan belum adanya kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengeluarkan Ijin Angkutan Umum yang tersertifikasi melalui Sistem Manajemen Keselamatan.
2.j.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	33	97.06	%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali	-
			Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	34				
2.j.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	44	100.00	%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali	-
			Jumlah Layanan Publik	44				
2.j.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	2.848.038	100.00	%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	pemerintah daerah provinsi					
			Jumlah penduduk	2.848.038				
2.k.1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	($\sum$ Volume usaha koperasi tahun berjalan - $\sum$ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya)	17.151.947.524.993	11.45	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	Banyak Koperasi yang belum melaksanakan RAT dan melaporkan volume usahanya
			$\sum$ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	15.389.628.785.907				
2.k.2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	$\sum$ Usaha kecil yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	87	100.00	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	Usaha kecil pada dasarnya sudah lebih mampu dan mandiri dalam mengurus NIB sehingga dalam praktik kerjanya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali lebih menfokuskan pembinaan ke pada Usaha Mikro
			$\sum$ Usaha kecil keseluruhan	87				
2.k.3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase proporsi ekspor dari usaha kecil	Jumlah usaha kecil yang telah melakukan ekspor	58	66.67	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	Usaha Kecil lebih memilih untuk melaksanakan ekspor mandiri daripada menunggu rekomendasi dari Pemerintah Daerah dikarenakan Program pendampingan dari pemerintah biasanya melalui tahapan administrasi, seleksi, pelatihan, hingga kurasi produk, bagi Usaha Kecil yang sudah siap pasar, proses ini bisa terasa lama sehingga mereka
			Jumlah usaha kecil	87				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
								memilih langsung mencari buyer sendiri, sehingga data yang ditampilkan merupakan Usaha Kecil yang Melaksanakan ekspor secara mandiri bukan Usaha Kecil binaan Pemerintah Daerah
2.l.1	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Jumlah nilai investasi tahun N– Jumlah nilai investasi tahun N-1) di provinsi	42.816.2 82.670.9 20	17.25	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	-
			Jumlah nilai investasi tahun N-1 di provinsi	36.517.5 10.800.0 00				
2.l.2	Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi terhadap target investasi	Total realisasi investasi provinsi	42.816.2 82.670.9 20	93.85	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	-
			Target investasi provinsi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada provinsi yang bersangkutan	45.620.0 00.000.0 00				
2.m.1	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di provinsi	50	76.92	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-
			Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di provinsi	65				
2.m.2	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi	142	0.01	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi					
			jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	1.025.381				
2.m.3	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase atlet yang masuk Pemusatan Latihan Nasional	Jumlah atlet daerah yang masuk Pemusatan Latihan Nasional	71	31.28	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-
			Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat Provinsi (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	227				
2.m.4	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	221	57.40	%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	-
			Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	385				
2.n	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	627	100.00	%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali	-
			Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	627				
2.o	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	714	77.78	%	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali	-
			Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI)	918				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
			(918)					
2.p	Kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	394	100.00	%	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	-
			Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	394				
2.q.1	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	71.97	71.97	Nilai	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Nilai TKM untuk Tahun 2025 belum keluar dari Perpusnas
2.q.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	66.05	66.05	Nilai	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	Nilai IPLM untuk Tahun 2025 belum keluar dari Perpusnas
2.r.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$(a + i + s + j) / 4$	60.87	60.87	%	Biro Umum Setda Provinsi Bali	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
3.a.1	Kelautan dan Perikanan	Persentase produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	145.364,4	104.53	%	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	-
			Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	139.067,9				
3.a.2	Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N - Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N-1	351	-10.46	%	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Terdapat penurunan jumlah Unit Pengolahan (UPI) pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan jumlah UPI tahun 2024, hal ini dikarenakan sebanyak 41 UPI tidak melakukan produksi di Tahun 2025.
			Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya tahun N-1	392				
3.a.3	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Pelaku usaha yang patuh	32	80.00	%	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	-
			Pelaku usaha yang diawasi	40				
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	6.948.754	9.72	%	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	-
			Jumlah wisatawan asing tahun N-1	6.333.360				
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	9.612.511	-5.02	%	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	-
			Jumlah wisatawan tahun N-1	10.120.786				
3.b.3	Pariwisata	Rasio Produk Domestik Regional	Nilai tambah penyediaan akomodasi makan	72.199.800.000.000	22.27	%	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		Bruto penyediaan akomodasi, makan, minum	minum					
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto provinsi	324.148.930.000.000				
3.c.1	Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	871.142,19	-0.69	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	-
			Produksi tanaman pangan tahun N-1	877.203,39				
3.c.2	Pertanian	Persentase peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	723.874	-27.32	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	khusus komoditas tanaman hias tidak di jumlahkan hal ini dikarenakan oleh satuan pada masing - masing komoditas berbeda - beda, dan hanya yg bisa dijumlahkan hanya komoditas sayuran, buah dan obat nabati
			Produksi hortikultura tahun N-1	996.000				
3.c.3	Pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	362.103,23	5.20	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	pada indikator ini komoditas susu tidak terdapat datanya hal ini dikarenakan pada indikator ini di provinsi bali tidak membudidayakan sapi perah,sehingga data produksi susu tidak ada.
			Produksi komoditas peternakan tahun N-1	344.198,45				
3.d.1	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi	100	100.00	%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi =281,06 Ha, dan target tahunan =100 Ha, sehingga capaian 281,06%, namun hasil di sistem tidak dapat melebihi 100%.
			Luas target tahunan rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara dalam 1 provinsi	100				
3.d.2	Kehutanan	Persentase	Luas kawasan	1.912,7	382.54	%	Dinas	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan (Ha)				Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	
			Luas target tahunan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan (Ha)	500				
3.d.3	Kehutanan	Persentase penurunan kerusakan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi	Luas hutan yang rusak tahun N - Luas hutan yang rusak tahun N-1	135.685	-165.40	%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	Luas hutan yang rusak tahun N = 51,125 Ha, Luas hutan yang rusak tahun N-1 = 186,810 Ha
			Luas hutan yang rusak tahun N	51.125				
3.e.1	Energi Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	Ada/Tidak Ada Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada / Tidak Ada	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Provinsi Bali keseluruhan adalah masuk bagian dari wilayah strategis nasional, sehingga untuk saat ini masih berada kewenangan pusat di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
			jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	Tidak Ada				
3.e.2	Energi Sumber Daya Mineral	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan	25	92.59	%	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	Sudah di cermati kembali.

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		melanggar peraturan perundang- undangan	perundang- undangan					
			Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi	27				
3.f.1	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen per provinsi	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani pada tahun N	40	100.00	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	-
			Jumlah pengaduan konsumen yang masuk pada tahun N	40				
3.f.2	Perdagangan	Nilai ekspor barang per provinsi	Nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun	565.485. 842	87.38	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	-
			Target nilai ekspor barang ke negara lain dalam 1 tahun	647.186. 855,34				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
3.g.1	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto provinsi 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas provinsi	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Jumlah industri besar tahun n-1	93.63	93.63	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	-
3.g.2	Perindustrian	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	63	55.26	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	-
			Jumlah seluruh pelaku usaha industri besar	114				
3.g.3	Perindustrian	Persentase Pertambahan jumlah industri besar	Jumlah industri besar tahun N – Jumlah industri besar tahun N-1	18	-81.25	%	Dinas Perindustrian dan	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		di provinsi	Jumlah industri besar tahun N-1	96			Perdagangan Provinsi Bali	
3.g.4	Perindustrian	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	874.969.726.535	2.04	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	-
			Total investasi seluruh sektor	42.816.282.670.920				
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi	-	0	0.00	%		-

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
4.a.1	Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	17	100.00	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	-
			Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden	17				
4.b.1	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru,	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah	2.036.938.131.367,6	27.48	%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	(TKD)					
			Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	7.412.970.277.983,6				
4.b.2	Keuangan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	4.628.083.362.061,25	65.66	%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	-
			Realisasi pendapatan daerah	7.048.315.851.950,26				
4.b.3	Keuangan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	2.950.012.859.902,32	83.79	%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	-
			Alokasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	3.520.856.142.702				
4.b.4	Keuangan	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	2.138.615.498.744	35.24	%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	-
			Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	6.068.805.441.963,6				
4.c	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6.129	76.12	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	-

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
		(Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8.052			Manusia Provinsi Bali	
4.d	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	108	100.00	%	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang memiliki tugas menyelenggarakan Inovasi Daerah, Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Indeks Inovasi Daerah (IID)
			Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	108				
4.e.1	Pengawasan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	4	4.00	Nilai	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Pemantauan Pengendalian Intern belum optimal yaitu Evaluasi belum berkesinambungan dan belum berkala
4.e.2	Pengawasan	Kapabilitas Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	5	5.00	Nilai	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Rendahnya alokasi sumber daya, anggaran pengawasan dan peralatan yang memadai
4.e.3	Pengawasan	Manajemen risiko Indeks	Nilai 1/Nilai 2/Nilai 3/ Nilai 4/Nilai 5	4	4.00	Nilai	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Pemantauan Pengendalian Intern belum optimal yaitu Evaluasi belum berkesinambungan dan belum berkala
4.e.4	Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	1.465	98.45	%	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	1. Adanya mutasi pegawai 2. Saat klarifikasi renaksi tidak dihadiri oleh pejabat yang menangani 3. Pemenuhan Tindak Lanjut tidak berkelanjutan (masih banyak adanya
			Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	1.488				

No IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian	Satuan	Sumber Data	Keterangan
			Definisi Parameter	Nilai				
								tunggakan)
4.f.1	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	40	40.00	Poin	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	-
4.f.2	Pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	29.81	29.81	Poin	Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	-
4.f.3	Pengadaan	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	27.39	27.39	Poin	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	-
4.g.1	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1. Tepat 2. Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat/Tidak Tepat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	-
4.g.2	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	9	52.94	%	Biro Hukum Setda Provinsi Bali	-
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	17				
4.h	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	82.57	82.57	Nilai	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	-

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Sesuai dengan RPD 2024-2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2024, berikut Perjanjian Kinerja Provinsi Bali Tahun 2024.

Tabel Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali	1. Angka Kemiskinan	4,07	Persentase
2.	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,75	Persentase
3.	Meningkatnya Laporan Kerja dan Pemerataan Krama Bali	3. Angka Pengangguran	2,57	Persentase
		4. Indeks Gini	0,366	Poin
4.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	5. Laju Inflasi	3±1	Persentase
5.	Meningkatnya Pedapatan Daerah Provinsi Bali	6. Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,45	Persentase
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,50	Poin
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8. Usia Harapan Hidup (UHH)	72,60	Tahun
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9. Angka rata-rata lama sekolah	9,8	Tahun
9.	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	10. Indeks Daya Saing Krama Bali	63,189	Poin
10.	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	11. Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,97	Poin
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	12. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	71,81	Poin
		13. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,37	Persentase
12.	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	14. Persentase penyelenggaraan penataan ruang	92,45	Persentase
13.	Meningkatnya penggunaan energi bersih	15. Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan	8,45	Persentase
14.	Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	16. Persentase pengelolaan sampah	100	Persentase
15.	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	17. Persentase Desa Adat Mandiri	14,06	Persentase

No. 1	Sasaran Strategis RPD 2	IKU 3	Target 4	Satuan 5
16.	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	18. Indeks Pemajuan Tradisi	15,00	Poin
17.	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	19. Indeks Pemajuan Kebudayaan	65	Poin
18.	Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim	20. Indeks Provinsi Hijau	67,57	Poin
19.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	21. Indeks Infrastruktur	73,75	Poin
20.	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	22. Indeks Layanan Infrastruktur	76,18	Poin
21.	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	23. Rasio Konektivitas Transportasi	0,86	Rasio
22.	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	24. Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	79,85	Poin
23.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	25. Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	96,50	Poin
		26. Indeks Resiko Bencana	115,14	Poin
24.	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	27. Indeks demokrasi	76,00	Poin
25.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	28. Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	Poin
26.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	29. Indeks Merit Sistem	0,80	Poin
27.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	30. Nilai AKIP	81	Poin
		31. Opini BPK	WTP	Kategori
28.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	32. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,5	Poin
		33. Indeks Inovasi Daerah	65,75	Poin

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Satuan
1	2	3	4	5
		34. Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5	Persentase

Sumber : Bappeda Provinsi Bali Tahun 2025

Capaian Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Makro	Realisasi					Capaian Nasional 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	4,34	4,37	4,4	4,43	4,46	284
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,19	5,66	5,48	5,82	5,04
3	PDRB Perkapita/ADHK (triliun Rp)	36	38,17	40,21	43,83	44,75	83,7
4	PDRB Perkapita Nominal/ADHB (triliun Rp)	52,01	50,53	69,63	78,36	81,39	23,8
5	inflasi (%)	1,09	5,39	1,68	2,34	2,91	2,92
6	Tingkat Kemiskinan (%)	4,71	4,53	4,25	3,8	3,42	8,25
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	201,97	205,68	193,78	176,21	160,09	23.360
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37	4,8	2,69	1,79	1,49	4,74
9	Gini Ratio (%)	0,37	0,36	0,36	0,348	0,333	0,363
10	IPM	75,69	76,44	78,01	78,63	79,37	75,90
11	Investasi (triliun Rp)	21,15	23,52	26,46	28,1	42,81	1.931,2
12	Jumlah Ekspor (juta US\$)	113,87	156,16	138,71	158,14	196,23	256,56

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, 2025

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali tercermin dari capaian 25 Sasaran Strategis RPD dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 105,08 persen. Dari 34 Indikator Kinerja, Sebanyak 29 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, dan sebanyak 5 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali	1. Angka Kemiskinan	4,06	3,42	118,71
2.	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,75	5,82	101,22
3.	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Krama Bali	3. Angka Pengangguran	2,01	1,45	138,62
		4. Indeks Gini	0,364	0,333	104,50
4.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	5. Laju Inflasi	3±1	2,91	103,09
5.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Bali	6. Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	55,33	65.66	118,68
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,58	79,37	102,78
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8. Usia Harapan Hidup (UHH)	72,70	75,46	103,80
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9. Angka rata-rata lama sekolah	10	9,75	97,50
9.	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	10. Indeks Daya Saing Krama Bali	64,88	75.18	115,88
10.	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	11. Indeks Pembangunan Kebudayaan	68,47	71,36	104,22
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	12. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	76,19	77,23	101,36
		13. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13,26	-16,36	-123,38
12.	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	14. Persentase penyelenggaraan penataan ruang	94,34	94,34	100
13.	Meningkatnya penggunaan energi bersih	15. Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan	8,45	2,45	28,99
14.	Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	16. Persentase pengelolaan sampah	100	100	100

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
15.	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	17. Persentase Desa Adat Mandiri	15.07	15,41	102,22
16.	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	18. Indeks Pemajuan Tradisi	15,00	15,00	100,00
17.	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	19. Indeks Pemajuan Kebudayaan	66	71,36	109,78
18.	Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim	20. Indeks Provinsi Hijau	67,57	75,88	112,29
19.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	21. Indeks Infrastruktur	76,27	89,66	117,55
20.	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	22. Indeks Layanan Infrastruktur	78,34	79.58	101,58
21.	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	23. Rasio Konektivitas Transportasi	0,88	0,88	100
22.	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	24. Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82,07	93,10	113,43
23.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	25. Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	4,20	4.30	101,18
		26. Indeks Resiko Bencana	111,69	123,35	107,36
24.	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	27. Indeks demokrasi	77,00	88,34	114,73
25.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	28. Indeks Reformasi Birokrasi	75	95,05	126,73
26.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	29. Indeks Merit Sistem	0,83	0,94	113,25
27.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	30. Nilai AKIP	81	79,73	98,43
		31. Opini BPK	WTP	WTP	100
28.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	32. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	89	87,66	98,49
		33. Indeks Inovasi	66,75	77,04	115,41

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		Daerah			
		34. Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83	84.23	101.46

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2025, data diolah

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali	1. Angka kemiskinan (%)	4,07	3,8	106,63	4,06	3,42	118,71
2.	Meningkatnya PerekonomianKrama Bali	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,75	5,48	95,30	5,75	5,82	101,22
3.	Meningkatnya Laporan Kerjadan Pemerataan Krama Bali	3. Angka Pengangguran (%)	2,57	1,79	130,35	2,01	1,45	138,62
		4. Indeks Gini	0,366	0,348	104,91	0,364	0,333	104,50
4.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	5. Inflasi (%)	3±1	2,34	122,00	3±1	2,91	103,09
5.	Meningkatnya PendapatanDaerah Provinsi Bali	6. Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	60,45	68,76	113,74	55,33	65.66	118,68
6.	Terwujudnya Sumber DayaManusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,50	78,63	102,78	76,58	79,37	102,78
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8. Usia Harapan Hidup (tahun)	72,60	75,10	103,44	72,70	75,46	103,80
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,8	9,54	97,35	10	9,75	97,50
9.	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga KerjaKrama Bali	10. Indeks Daya Saing Krama Bali	63,189	71,33	112,88	64,88	75.18	115,88
10.	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	11. Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,97	71,36	104,99	68,47	71,36	104,22
11.	Meningkatnya KualitasLingkungan	12. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	71,81	75,02	104,47	76,19	77,23	101,36

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	12,37	10,60	85,69	13,26	-16,36	-123,38
12.	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	14. Persentase penyelenggaraan penataan ruang (%)	92,45	93,62	101,26	94,34	94,34	100
13.	Meningkatnya penggunaanenergi bersih	15. Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan (%)	8,45	2,45	28,99	8,45	2,45	
14.	Terkelolanya Sampah RumahTangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	16. Persentase Pengelolaan Sampah(%)	100	100	100	100	100	100
15.	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	17. Persentase Desa AdatMandiri (%)	14,06	15,07	107,18	15,07	15,41	102.22
16.	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	18. Indeks Pemajuan Tradisi	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00
17.	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	19. Indeks Pemajuan Kebudayaan	65	71,36	109,78	66	71,36	109,78
18.	Terwujudnya lingkungan hidupyang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim	20. Indeks Provinsi Hijau	67,57	72,36	107,09	67,57	75,88	112,29
19.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, lautdan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	21. Indeks Infrastruktur	73,75	86,63	117,46	76,27	89,66	117,55
20.	Meningkatnya kualitasinfrastruktur publik	22. Indeks Layanan Infrastruktur	76,18	77,53	101,77	78,34	79.58	101,58
21.	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	23. Rasio Konektivitas Transportasi	0,86	0,86	100	0,88	0,88	100
22.	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	24. Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	79,85	84,73	106,11	82,07	93,10	113,43
23.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	25. Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	96,50	59,90	137,92	4,20	4.30	101,18
		26. Indeks Resiko Bencana	115,14	111,28	103,35	111,69	123,35	107,36

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Meningkatnya kehidupandemokrasi masyarakat	27. Indeks demokrasi	76,00	85,13	112,01	77,00	88,34	114,73
25.	Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik	28. Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	93,46	126,29	75	95,05	126,73
26.	Meningkatnya PenerapanSistem Merit dalam Manajemen ASN	29. Indeks Merit Sistem	0,80	0,94	117,5	0,83	0,94	113,25
27.	Meningkatnya AkuntabilitasKinerja pemerintahan	30. Nilai AKIP	81	78,99	97,51	81	79,73	98,43
		31. Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
28.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	32. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	85,56	96,67	89	87,66	98,49
		33. Indeks Inovasi Daerah	65,75	69,92	106,34	66,75	77,04	115,41
		34. Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5	81,91	99,28	83	84.23	101.46

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2025, data diolah

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Indikator	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Tahun RPD 2024-2026	Capaian 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
Angka kemiskinan (%)	3,8	4,06	3,42	118,71	3,97	116,08
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,48	5,75	5,82	101,22	5,85	99,49
Angka Pengangguran (%)	1,79	2,01	1,45	138,62	1,41	97,24
Indeks Gini	0,348	0,364	0,333	104,50	0,362	108,71
Inflasi (%)	2,34	3±1	2,91	103,09	3±1	103,09
Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	68,76	55,33	65.66	118.68	54.34	120.84
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,63	76,58	79,37	103,64	76,65	103,55
Usia Harapan Hidup (tahun)	75,19	72,70	75,46	103,80	72,80	103,65

Indikator	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Tahun RPD 2024- 2026	Capaian 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,54	10	9,75	97,50	10,6	91,98
Indeks Daya Saing Krama Bali	71,33	64,88	75.18	115,88	66,45	113,13
Indeks Pembangunan Kebudayaan	71,36	67,97	71,36	104,99	68,98	90
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	75,02	76,19	77,23	101,36	72,04	107,20
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	12,37	13,26	-16,36	-123,38	14,58	-112,21
Persentase penyelenggaraan penataan ruang (%)	93,62	94,34	94,34	100	96,24	98,05
Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan (%)	7,04	8,45	2,45	28,99	9,85	24,87
Persentase Pengelolaan Sampah (%)	100	100	100	100	100	100
Persentase Desa Adat Mandiri (%)	15.07	15.07	15.41	102.22	16,74	92,05
Indeks Pemajuan Tradisi	15,00	15,00	15,00	100,00	20,00	75,00
Indeks Pemajuan Kebudayaan	71,36	66	71,36	108,22	67	106,50
Indeks Provinsi Hijau	72.36	67,57	75,88	112,29	80,72	94,01
Indeks Infrastruktur	86,63	76,27	89,66	117,55	78,46	114,27
Indeks Layanan Infrastruktur	77,53	78,34	79.58	101,58	80,10	99,35
Rasio Konektivitas Transportasi	0,86	0,88	0,88	100	0,9	96,70
Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	84,73	82,07	93,10	113,43	84,28	110,46
Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	59,90	4,20	4.30	101,18	4,30	100
Indeks Resiko Bencana	111,28	111,69	123,35	107,36	108,34	97,28
Indeks demokrasi	85,13	77	88,34	114,72	78,00	113,25

Indikator	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Tahun RPD 2024- 2026	Capaian 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Reformasi Birokrasi	93,46	75,00	95,05	126,73	76,00	125,06
Indeks Merit Sistem	0,94	0,83	0,94	113,5	0,85	110,58
Nilai AKIP	78,99	81	79,73	98,43	82	97,23
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
Indeks Kepuasan Masyarakat	85,56	89	87,66	98,49	89,5	97,94
Indeks Inovasi Daerah	69,92	66,75	77,04	115,41	67,75	113,71
Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	81,91	83	84,23	101,46	83,5	100,87

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, 2025

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Akuntabilitas anggaran adalah fondasi dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah yang baik. Melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, pengawasan yang ketat, dan pelaporan yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis daerah Provinsi Bali 2024-2026.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah	6.660.624.025.310,00	7.048.315.851.950,26	105,82
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.216.263.422.941,00	4.628.083.362.061,25	109,76
4.2	Pendapatan Transfer	2.438.603.330.369,00	2.414.142.690.695,00	98,99
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.757.272.000,00	6.089.799.194,01	105,77
	Jumlah Pendapatan	6.660.624.025.310,00	7.048.315.851.950,26	105,82
5	Belanja Daerah	7.412.970.277.983,60	6.554.652.991.551,62	88,42
5.1	Belanja Operasi	5.053.188.410.600,60	4.520.551.159.698,76	89,45
5.2	Belanja Modal	961.755.254.119,00	773.687.032.749,53	80,44
5.3	Belanja Tidak Terduga	53.861.777.244,00	14.075.388.800,30	26,13
5.4	Belanja Transfer	1.344.164.836.020,00	1.246.339.410.303,03	92,72
	Jumlah Belanja	7.412.970.277.983,60	6.554.652.991.551,62	88,42
	Surplus/Defisit	(752.346.252.673,60)	493.662.860.398,64	(65,61)
6	Pembiayaan Daerah	752.346.252.673,60	219.211.188.702,62	29,13
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.153.811.060.761,60	620.675.986.790,62	53,79
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088,00	401.464.798.088	99,99
	Pembiayaan Netto	752.346.252.673,60	219.211.188.702,62	29,13
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	712.874.049.101,26	0,00

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Bali berhasil menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dengan tercatatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 712.874.049.101,26 dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan adanya pengendalian yang ketat terhadap belanja yang tidak mendesak serta penundaan proyek-proyek yang bisa ditunda tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Sebagian besar penghematan anggaran berasal dari sektor belanja barang dan jasa, dimana pemerintah daerah berhasil mengurangi biaya administratif dan operasional yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak dan anggaran makan minum (rapat tatap muka diganti via zoom meeting).

Meskipun terjadi efisiensi belanja, hal ini tidak mengorbankan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Terbukti dari rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2025 rata-

rata sebesar 105,08 persen. Dari 34 Indikator Kinerja, Sebanyak 29 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, dan sebanyak 5 indikator tidak mencapai 100%.

Untuk jangka panjang ke depan, Pemerintah Provinsi Bali perlu terus memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien tetap sejalan dengan pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali

Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2025 tercatat sebesar 3,42%, atau turun 0,38 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 3,80%. Angka ini masih jauh berada di bawah rata-rata nasional tahun 2025 yaitu sebesar 8,25%, sehingga menempatkan Bali kembali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Secara nasional, Papua Pegunungan masih tercatat sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 29,45%.

Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 3,42 persen pada September 2025 dipengaruhi oleh perbaikan fundamental ekonomi makro dan efektivitas intervensi sektoral yang menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian faktor-faktor tersebut:

- a. Perekonomian Provinsi Bali tumbuh sebesar 5,88 persen secara y-on-y pada Triwulan III-2025. Akselerasi pertumbuhan ini terus terjaga hingga akhir tahun, di mana pada Triwulan IV-2025 ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,86 persen secara y-on-y, atau secara kumulatif tumbuh solid sebesar 5,82 persen sepanjang tahun 2025.
- b. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada PDRB Pengeluaran menunjukkan tren positif dan tumbuh stabil sebesar 5,20 persen secara y-on-y pada Triwulan III-2025. Komponen ini terus mendominasi struktur pengeluaran ekonomi Bali hingga Triwulan IV-2025 dengan kontribusi mencapai 51,68 persen terhadap total PDRB.
- c. Pada bulan September 2025, tekanan harga jauh lebih terkendali dengan angka inflasi kumulatif September 2025 terhadap Maret 2025 tercatat sangat rendah, yakni hanya sebesar 0,61 persen. Stabilitas ini

berperan penting dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat rentan.

- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali hasil Sakernas Agustus 2025 berhasil ditekan secara signifikan hingga tercatat sebesar 1,49 persen. Angka ini turun 0,30 persen poin dibandingkan dengan kondisi Agustus 2024 (1,79 persen) serta turun 0,09 persen poin dibandingkan Februari 2025, yang sekaligus menjadikannya sebagai rekor capaian TPT terendah setelah pandemi Covid-19.
- e. Hasil Sakernas Agustus 2025 mencatat total angkatan kerja di Bali mencapai sekitar 2,74 juta orang, yang mana jumlah penduduk bekerja menembus angka 2,70 juta orang. Jika dibandingkan dengan Agustus 2024 yang berjumlah 2,67 juta pekerja, telah terjadi penambahan puluhan ribu lapangan kerja baru yang diisi oleh penduduk Bali selama satu tahun terakhir.
- f. Pemulihan kesejahteraan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga menyentuh perdesaan. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada September 2025 yang mencapai angka 105,00. Nilai di atas 100 ini merepresentasikan bahwa keuntungan riil dan pendapatan yang diterima oleh petani lebih besar dibandingkan biaya usahanya. Di samping itu, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) petani juga meningkat mencapai 128,25.
- g. Sektor pariwisata kembali mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali masih didominasi secara mutlak oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada Triwulan IV-2025 memberikan sumbangan terbesar mencapai 22,10 persen.
- h. Kinerja pariwisata yang solid tecermin dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali. Selama periode Triwulan III-2025 saja, kedatangan wisman menembus 2.015.122 kunjungan. Capaian triwulanan ini tercatat jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.
- i. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bali pada September 2025 mencatatkan angka yang memuaskan, yakni mencapai 68,17 persen. Raihan ini merupakan tingkat hunian tertinggi secara nasional, membuktikan perputaran ekonomi yang terus berakselerasi kuat di sektor perhotelan. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang

sangat solid. Pada Triwulan III-2025, ekonomi Bali tumbuh mengesankan sebesar 5,88 persen (y-on-y). Tren positif ini terjaga hingga akhir tahun, di mana secara kumulatif selama tahun 2025 (c-to-c), ekonomi Bali berhasil tumbuh sebesar 5,82 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 (5,48 persen). Akselerasi ini didorong oleh ekspansi sektor pariwisata dan jasa lainnya yang berdampak luas pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Meningkatnya Perekonomian Krama Bali

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 101,22 persen. Angka capaian ini diperoleh dari realisasi pertumbuhan ekonomi kumulatif (c-to-c) sebesar 5,82 persen, yang berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebesar 5,75 persen.

Pertumbuhan ekonomi Bali terus menunjukkan tren peningkatan yang sangat impresif pada tahun 2025. Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Bali sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen, di mana pada Triwulan IV-2025 sendiri mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,86 persen secara year-on-year (y-on-y). Pertumbuhan Bali yang tetap kuat ini menjadi indikator penting akan ketahanan dan potensi ekonomi wilayah dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Dari sisi pengeluaran, peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Bali didorong oleh menguatnya investasi dan aktivitas ekspor. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menguat sebesar 6,03 persen (c-to-c) atau 5,47 persen (y-on-y pada Triwulan IV), sejalan dengan meningkatnya realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan Ekspor Luar Negeri mencatatkan peningkatan akumulatif tertinggi sebesar 8,22 persen (c-to-c). Adapun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah juga tumbuh dengan sangat kuat. Kuatnya Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh tingginya aktivitas belanja masyarakat terkait perayaan Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, serta momentum libur akhir tahun. Di sisi lain, Konsumsi Pemerintah melonjak signifikan sebesar 10,73 persen (y-on-y di Triwulan IV) seiring peningkatan realisasi belanja, sementara Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPR) justru mengalami kontraksi (minus 3,97% c-to-c) sejalan dengan berakhirnya momentum pesta demokrasi (Pilkada) di tahun 2024 lalu.

Terkait pergerakan harga, pada akhir Triwulan IV (Desember 2025), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,71 persen secara month-to-month (m-to-m). Dengan demikian, akumulasi inflasi Provinsi Bali sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 2,91 persen secara year-on-year (y-on-y). Berdasarkan wilayah cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Bali, pada akhir tahun 2025 inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Denpasar yaitu sebesar 3,45 persen, disusul Kabupaten Tabanan sebesar 2,70 persen dan Singaraja sebesar 2,51 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Badung sebesar 2,37 persen. Tekanan inflasi pada triwulan akhir 2025 ini terutama didorong oleh naiknya harga komoditas bahan makanan seperti cabai rawit, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Kondisi ini menunjukkan inflasi di Bali masih relatif terkendali sehingga turut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan anggaran daerah (APBD) maupun anggaran pusat (APBN). Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Secara makro, kondisi inflasi di Bali yang tetap terkendali dalam batas sasaran ini membuktikan efektivitas sinergi kebijakan daerah, sehingga mampu memberikan iklim yang suportif terhadap efisiensi pelaksanaan APBD maupun APBN.

3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Krama Bali

Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada November 2025 sebanyak 3,56 juta orang, meningkat 7,93 ribu orang dibanding Agustus 2025. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 2,71 juta orang (76,29 persen), sementara 0,84 juta orang lainnya termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau penduduk lainnya yang tidak sedang mencari pekerjaan. Apabila dibandingkan Agustus 2025, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 30,37 ribu orang (1,11 persen).

Komposisi angkatan kerja pada November 2025 terdiri dari 2,67 juta orang penduduk yang bekerja dan 39,25 ribu orang pengangguran. Penduduk bekerja mengalami penurunan 28,63 ribu orang (1,06 persen)

dan pengangguran berkurang sebanyak 1,74 ribu orang (4,24 persen) dibandingkan Agustus 2025.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK Provinsi Bali pada November 2025 tercatat sebesar 76,29 persen, mengalami penurunan 1,02 persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2025.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada November 2025 tercatat sebesar 84,59 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang sebesar 68,05 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2025, TPAK laki-laki mengalami peningkatan 0,75 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan 2,79 persen poin.

Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berhasil ditekan hingga level 1,45% pada November 2025, Pemerintah Provinsi Bali memfokuskan intervensi pada program yang berdampak langsung terhadap penguatan kapasitas tenaga kerja lokal. Strategi utama diimplementasikan melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dilaksanakan secara intensif di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah Provinsi Bali. Program ini difokuskan pada upskilling dan reskilling angkatan kerja pada kejuruan prioritas seperti pariwisata digital, teknisi, dan jasa kreatif, yang disesuaikan dengan peta kebutuhan industri terkini. Selain itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi program Pemagangan Dalam Negeri untuk memberikan pengalaman kerja riil dan mempercepat alih teknologi kepada tenaga kerja muda.

Sebagai upaya konkret mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja (supply and demand), Pemerintah Provinsi Bali secara rutin menyelenggarakan Bursa Kerja (Job Fair) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara hibrida. Kegiatan ini terbukti efektif mempercepat penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi lulusan baru (fresh graduate). Efektivitas intervensi ini tecermin secara statistik pada data Sakernas November 2025, di mana proporsi penduduk bekerja tamatan SMK—yang merupakan target utama program vokasi—mengalami perbaikan serapan yang positif menjadi 16,57%.

Dari sisi kebijakan strategis, peran Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Provinsi Bali terus dioptimalkan sepanjang tahun 2025. TKDV berfungsi menyinergikan unsur pentahelix guna memastikan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah selaras (Link and

Match) dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sehingga relevansi lulusan dengan pasar kerja terus meningkat.

Dalam konteks pemerataan pembangunan sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi guna menurunkan nilai Indeks Gini yang telah mencapai level 0,333, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan strategi pemerataan ekonomi yang inklusif melalui penguatan infrastruktur konektivitas dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meliputi:

- a. Akselerasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB): Mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bali Timur (Kabupaten Klungkung) melalui kelanjutan pembangunan zona inti PKB yang menyerap tenaga kerja lokal sektor konstruksi.
- b. Penyelesaian Shortcut Singaraja-Mengwitani: Meningkatkan efisiensi logistik dan menekan disparitas harga barang antara Bali Utara dan Bali Selatan, sehingga daya beli masyarakat di wilayah utara tetap terjaga.
- c. Pembangunan Turyapada Tower (KBS 6.0 Kerthi Bali): Membuka destinasi wisata kelas dunia baru di Kabupaten Buleleng serta mengatasi blank spot telekomunikasi untuk mendukung digitalisasi ekonomi di Bali Utara.
- d. Keberlanjutan Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi: Memastikan kelancaran progres konstruksi untuk membuka aksesibilitas ekonomi di wilayah Bali Barat (Jembrana) menuju pusat ekonomi (Badung/Denpasar).
- e. Optimalisasi Operasional Pelabuhan Segitiga Emas (Sanur - Nusa Penida - Nusa Ceningan): Memanfaatkan infrastruktur pelabuhan yang telah beroperasi penuh untuk meningkatkan volume kunjungan wisatawan dan distribusi logistik ke wilayah kepulauan (Nusa Penida), yang terbukti meningkatkan pendapatan asli daerah setempat.
- f. Penguatan Kapasitas UMKM Go Digital: Melakukan pembinaan UMKM secara end-to-end (Produksi, Promosi, Pemasaran) serta memfasilitasi adopsi pembayaran digital (QRIS) bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperluas akses pasar.
- g. Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa Adat: Mengoptimalkan potensi Desa Wisata di seluruh kabupaten/kota sebagai basis ekonomi inklusif agar kue pariwisata dinikmati langsung oleh masyarakat desa.

4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi khususnya di daerah, yakni dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Stabilitas harga mengacu pada tingkat inflasi yang rendah dan cukup stabil sehingga tidak akan memengaruhi proses pengambilan keputusan pelaku ekonomi.

Untuk inflasi Provinsi Bali pada Tahun 2025, tercatat sebesar 2,91 persen. Angka ini masih tergolong aman karena berada di dalam rentang target sasaran inflasi yang sudah ditentukan sebesar 3 ± 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum inflasi di Provinsi Bali masih cukup stabil dan terkendali, meskipun mengalami sedikit kenaikan dibandingkan capaian inflasi pada tahun 2024 yang sebesar 2,34 persen dan tahun 2023 yang sebesar 2,77 persen.

Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali sepanjang tahun 2025 diakselerasi melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan konsistensi pada strategi kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Adapun realisasi kegiatan strategis tersebut antara lain:

- 1) Intensifikasi Operasi Pasar Murah: Pelaksanaan operasi pasar dan pemantauan harga dilakukan secara terjadwal dan masif di seluruh kabupaten/kota, terutama untuk komoditas bahan pangan strategis seperti beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng guna menjaga ekspektasi harga di tingkat konsumen.
- 2) Keberlanjutan Program Genta Paten: Implementasi Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) terus diperluas untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur dan mempromosikan urban farming sebagai solusi mandiri pangan di tingkat rumah tangga.
- 3) Optimalisasi Rice Milling Unit (RMU) Jembrana: Pemanfaatan RMU milik anak perusahaan PT Mitra BUMDes Nasional (MBN) di Kabupaten Jembrana terus dioptimalkan dengan kapasitas penggilingan 2 ton per jam untuk menjamin ketersediaan serta stabilitas harga beras medium dan premium di wilayah Bali Barat.
- 4) Mitigasi Harga Daging Babi: Pemberian bantuan hibah bibit babi kepada kelompok ternak dilakukan secara berkala, khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Jembrana, untuk menjaga populasi dan memitigasi fluktuasi harga daging babi di pasar domestik.

- 5) Modernisasi Sarana Prasarana & Hilirisasi: Penyaluran bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) dan alat mesin pertanian (alsintan), termasuk optimalisasi pompa air untuk perluasan areal tanam sawah, serta penyediaan sarana pascapanen guna mendorong hilirisasi produk pangan agar memiliki nilai tambah.
- 6) Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Sepanjang tahun 2025, KAD terus diperluas untuk mengatasi defisit pasokan antarwaktu. Selain kerja sama Kabupaten Badung dan Bangli, telah diinisiasi perluasan rantai pasok komoditas pangan dengan daerah sentra produksi di luar Bali untuk menjamin stabilitas pasokan jangka panjang.
- 7) Fasilitasi Distribusi Pangan: Penguatan subsidi ongkos angkut melalui optimalisasi anggaran daerah (BTT), dukungan Bapanas, dan sumber pendanaan lainnya untuk menekan biaya logistik dalam pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.
- 8) Penguatan Peran Perumda sebagai Offtaker: Mendorong peningkatan peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stok pangan, mendistribusikan beras SPHP Bulog, serta bertindak sebagai pembeli siaga (offtaker) hasil panen petani lokal.
- 9) Transparansi Informasi Pasar: Penyebarluasan informasi jadwal operasi pasar dan edukasi harga secara real-time kepada masyarakat melalui kanal digital untuk memastikan akses pangan murah yang merata.
- 10) Edukasi Belanja Bijak: Sosialisasi masif mengenai pola belanja bijak dan diversifikasi konsumsi pangan non-beras melalui berbagai media sosial guna mengurangi tekanan permintaan pada komoditas tertentu.
- 11) Efektivitas High Level Meeting (HLM): Penyelenggaraan HLM TPID secara intensif dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Idul Fitri. Sepanjang tahun 2025, frekuensi koordinasi melalui HLM dan Rapat Koordinasi TPID ditingkatkan menjadi rata-rata 6 hingga 8 kali pertemuan per semester guna merespons dinamika harga secara cepat.
- 12) Digitalisasi Pemantauan melalui SIGAPURA: Optimalisasi pemanfaatan platform SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) sebagai basis data utama dalam memantau perkembangan harga harian dan neraca pangan wilayah

secara akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan (data-driven policy).

5. Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Bali s.d. triwulan III 2025 (kumulatif) sebesar Rp4,87 triliun atau mencapai 73,19% dari pagu anggaran. Nominal realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan kumulatif triwulan III 2024 yang sebesar Rp5,75 triliun. Penurunan realisasi pendapatan disebabkan oleh penurunan PAD khususnya pada komponen Pajak Daerah yang turun sebesar 35,45% (ctc). Penurunan Pajak Daerah sejalan dengan pelaksanaan kebijakan opsen PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 5 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Meski demikian, komponen penerimaan lain seperti retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.555,77% (ctc) dibandingkan dengan triwulan III 2024.

Pada tahun 2024, persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 60,45%, dengan realisasi mencapai 70,76%, menghasilkan capaian sebesar 117,06%. Sementara itu, pada Tahun 2025 target ditetapkan sebesar 55,33%, dengan realisasi 65,66%, dan capaian sebesar 118,68%. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana komposisi PAD mengalami penurunan karena sebagian komponennya telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator utama kemampuan keuangan daerah. Provinsi Bali telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD). Pada tahun 2025, persentase PAD terhadap PD mencapai 65,66%, jauh melampaui target akhir tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 54,34%. Dengan capaian sebesar 120,84% dari target, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Bali telah berhasil meningkatkan kemandirian fiskalnya lebih cepat dari proyeksi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing

Untuk IPM Provinsi Bali pada Tahun 2025 sudah melebihi target, yaitu 79,37 dari target yang sudah ditentukan sebesar 76,58. Bahkan target ini sudah melampaui capaian dalam dokumen RPD 2024-2026.

- 1) Keberhasilan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali pada tahun 2025 merupakan hasil nyata dari konvergensi berbagai program strategis lintas sektor. Intervensi kebijakan pemerintah daerah secara konsisten diarahkan pada tiga dimensi dasar pembentuk IPM, yakni dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, dengan rincian upaya sebagai berikut:
- 2) Mengoptimalkan rasio daya tampung peserta didik serta melakukan revitalisasi/peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar memenuhi standar pelayanan minimal.
- 3) Menyalurkan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) guna menjamin kelancaran pembiayaan operasional sekolah dan meningkatkan kualitas mutu proses pembelajaran.
- 4) Memperluas jaring pengaman sosial melalui pemberian bantuan biaya personal (subsidi pendidikan) bagi peserta didik dari kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, dan Sejahtera II guna menekan angka putus sekolah.
- 5) Menggalang kolaborasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR), salah satunya bersama Enesis Group, untuk mendukung upaya promosi kesehatan dan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui program “Bebas Nyamuk, Keluarga Sehat & Bebas Gerak” yang difokuskan di Kabupaten Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar.
- 6) Memperkuat penyebaran informasi Layanan Masyarakat guna mendorong partisipasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta langkah preventif dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM).
- 7) Menurunkan risiko stunting dan komplikasi kehamilan melalui penguatan program "Aksi Bergizi" dan "Gerakan Ibu Hamil Sehat" di seluruh wilayah.
- 8) Meningkatkan kualitas pemantauan pasien, khususnya kasus risiko tinggi, dengan menempatkan Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah yang terintegrasi dengan fasilitas layanan rujukan melalui

sistem rujukan balik dan pemanfaatan teknologi komunikasi (WhatsApp Group).

- 9) Mempercepat penyediaan infrastruktur strategis (transportasi darat, laut, dan udara) seperti jalan tol, pelabuhan, dan pengembangan destinasi pariwisata baru. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memacu pemerataan distribusi kue ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Bali.

7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pada tahun 2025, capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Bali tercatat mencapai 75,46 tahun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,36 tahun (0,48 persen) dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 75,10 tahun. Dengan realisasi sebesar 75,46 tahun tersebut, UHH Provinsi Bali terus konsisten melampaui target yang telah ditentukan sebesar 72,70. Bahkan, tren positif angka harapan hidup ini secara faktual telah melampaui target akhir yang dicanangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Sebagai wujud intervensi pencegahan dan peningkatan kualitas hidup, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan terus menggalakkan penerapan pola hidup sehat melalui 7 langkah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Langkah strategis tersebut meliputi rutinitas aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang (buah dan sayur), tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, serta penyediaan dan penggunaan jamban yang higienis. Melalui optimalisasi langkah-langkah preventif ini, diharapkan masyarakat Bali tidak hanya memiliki usia harapan hidup yang panjang, tetapi juga diiringi dengan kondisi fisik yang sehat dan berkualitas.

8. Meningkatnya kualitas pendidikan

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Bali pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan persentase capaian sebesar 97,50 persen. Hal ini didasarkan pada angka realisasi RLS tahun 2025 yang mencapai 9,75 tahun dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali yakni sebesar 10,00 tahun. Di samping itu, secara riil capaian ini juga mengalami peningkatan sebesar 0,21 tahun apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 yang berada di angka 9,54 tahun.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan akses, mutu pendidikan, dan angka rata-rata lama sekolah, di antaranya:

- 1) Pemberian bantuan dana pendamping BOSDA untuk pembiayaan operasional, perlengkapan sekolah, ATK, biaya personil siswa SMAN/SMKN Bali Mandara, serta bahan makanan/minuman siswa sekolah berasrama;
- 2) Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa kurang mampu oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendikdasmen;
- 3) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa melalui pelaksanaan aneka lomba di tingkat Provinsi dan Nasional (OSN, O2SN, FLS3N, Fiksi, dan LKS), serta penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembinaan karakter siswa;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan yang meliputi: pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pencegahan stunting, UKS, sekolah aman bencana, dan aman dari tindak kekerasan;
- 5) Pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi ke satuan pendidikan terkait revitalisasi sarana prasarana sekolah, pengelolaan dana BOSP, penatausahaan aset, pembinaan aparatur dan manajerial, serta reviu kurikulum dan rapor pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu, tata kelola, dan pemenuhan SPM Pendidikan;
- 6) Pelaksanaan digitalisasi sekolah yang meliputi pelatihan penyusunan materi pembelajaran berbasis TIK bagi Guru dan pembinaan penggunaan aplikasi digital di Satuan Pendidikan;
- 7) Revitalisasi SMK yang meliputi pembuatan peta jalan pendidikan vokasi SMK, penyelarasan kurikulum dengan dunia industri, peningkatan sarana praktik siswa, pemagangan siswa, dan peningkatan akses sertifikasi kompetensi;
- 8) Memprogramkan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat (orang tua) yang memiliki anak berkebutuhan khusus terhadap pentingnya layanan pendidikan bagi anak dalam mendukung kemandirian;
- 9) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) jenjang SMA dan SMK sebagai upaya perluasan akses pendidikan, yang mana pada tahun

2025 telah direalisasikan pembangunan sebanyak 8 unit sekolah baru untuk jenjang SMA dan 4 unit sekolah baru untuk jenjang SMK; dan

- 10) Revitalisasi sarana prasarana pendidikan yang meliputi pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium, pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan, pembangunan/rehabilitasi ruang serbaguna/aula, sarana utilitas lainnya (toilet, pagar, tempat suci), serta pengadaan media pembelajaran, pengadaan alat praktik siswa, dan pengadaan mebel sekolah.

9. Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali

Capaian Indeks Daya Saing Krama Bali pada Tahun 2025 baik, tergambar pada perbandingan realisasi pada tahun 2024 ke 2025 dengan peningkatan sebesar 3,85%.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan daya saing Krama Bali antara lain sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Pendidikan Vokasi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- 2) Revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengembangan pendidikan vokasi, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), peningkatan sarana dan prasarana praktik siswa, pelaksanaan program pemagangan di industri, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK. Langkah ini bertujuan agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Vokasi Berbasis Industri.
- 4) Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menyelenggarakan berbagai program pelatihan vokasi yang berorientasi pada peningkatan keterampilan kerja. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan kerja tenaga kerja lokal serta memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.
- 5) Pelatihan Bahasa Asing untuk Mendukung Sektor Pariwisata.

- 6) Mengingat Bali merupakan destinasi wisata internasional, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu kompetensi penting bagi tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pemerintah menyelenggarakan program pelatihan bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan Korea untuk meningkatkan kemampuan komunikasi tenaga kerja dengan wisatawan mancanegara serta memperluas peluang kerja di sektor pariwisata.
- 7) Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) Bali.
- 8) Pemerintah Provinsi Bali juga memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi SISNAKER Bali yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan di bidang ketenagakerjaan, baik bagi tenaga kerja, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait lowongan pekerjaan, program pelatihan, serta berbagai layanan pemberdayaan tenaga kerja secara lebih mudah dan cepat.

10. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali

Pada tahun 2025 merupakan momentum penting karena ada 2 capaian pemerintah dan masyarakat Bali dalam bidang kebudayaan. Capaian pertama adalah Provinsi Bali berhasil memperoleh nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tertinggi dengan nilai 71,36. Nilai ini jauh di atas rata-rata IPK Nasional yakni 57,13. Kedua, Provinsi Bali memperoleh Anugerah Kebudayaan Indonesia dari Kementerian Kebudayaan RI yang diserahkan pada 18 Desember 2024.

Dengan strategi yang semakin inovatif dan berbasis kolaborasi, diharapkan pelestarian cagar budaya di Bali tidak hanya mampu mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga menjadi bagian dari daya tarik budaya yang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat luas.

Pelestarian cagar budaya merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kebudayaan di Provinsi Bali. Kegiatan utama dalam upaya pelestarian ini meliputi Penetapan Cagar Budaya dan Pelindungan Cagar Budaya, yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna menjaga keberlangsungan warisan budaya bagi generasi mendatang.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menargetkan beberapa situs cagar budaya di seluruh wilayah Bali untuk didaftarkan ke dalam Register

Nasional Cagar Budaya. Proses ini diawali dengan inventarisasi, penyusunan berkas pendaftaran, hingga pengkajian oleh TACB sebelum akhirnya disidangkan dan direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai cagar budaya beserta pemeringkatannya. Pada tahun 2024, target penetapan ditetapkan sebanyak 2 cagar budaya baru yang akan mendapat status resmi dan perlindungan hukum.

Dalam upaya memajukan bahasa, aksara, dan sastra Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan berhasil mencapai target peningkatan sebesar 6% pada tahun 2025. Capaian ini terwujud melalui berbagai event seni dan budaya yang telah menjadi agenda tahunan, seperti Pesta Kesenian Bali (PKB), Bulan Bahasa Bali, Festival Seni Bali Jani, Jantra Tradisi Bali, Warisan Budaya Takbenda (WBTD), Penghargaan Seni, serta berbagai kegiatan lainnya. Event-event ini tidak hanya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal tetapi juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal, memahami, dan mencintai bahasa serta aksara Bali.

Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali pada tahun 2025 merupakan salah satu program strategis dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali di Provinsi Bali. Kegiatan ini diselenggarakan selama satu bulan penuh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan, hingga desa adat di seluruh Bali. Berbagai kegiatan inovatif dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, seperti festival menulis lontar massal, lomba komik daring berbasis bahasa dan aksara Bali, lomba pembuatan meme berbahasa Bali, serta berbagai lomba kreatif lainnya yang bertujuan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan budaya daerah.

Selain itu, partisipasi Bali dalam Utsawa Dharmagita Tingkat Nasional juga menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi seni sastra dan tradisi keagamaan Bali di tingkat nasional. Keikutsertaan dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk memperkenalkan kekayaan seni dan sastra Bali kepada masyarakat luas serta memperkuat jejaring budaya antar daerah.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada individu maupun kelompok yang berprestasi dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan juga melaksanakan berbagai program penghargaan kebudayaan.

Penghargaan tersebut antara lain Adi Sewaka Nugraha, Dharma Kusuma, Bali Jani Nugraha, Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha, serta Parama Bhakti Budaya sebagai bentuk apresiasi tertinggi Pemerintah Provinsi Bali di bidang kebudayaan. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para pelaku seni dan budaya agar terus berkarya serta berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali.

Secara keseluruhan, pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat pelestarian bahasa, aksara, dan tradisi budaya Bali. Hal ini turut mendukung peningkatan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bali, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjaga keberlanjutan budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program ini antara lain adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan, dukungan lembaga adat dan komunitas budaya, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, pemerataan pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah, serta tantangan dalam meningkatkan minat generasi muda terhadap penggunaan bahasa dan aksara Bali dalam kehidupan sehari-hari.

11.Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Bali terus menunjukkan tren peningkatan. Capaian IKLH pada Tahun 2019 tercatat sebesar 63,09, Tahun 2020 sebesar 71,98, Tahun 2021 sebesar 70,70, Tahun 2022 sebesar 70,89, Tahun 2023 sebesar 71,38, Tahun 2024 sebesar 75,02, dan pada Tahun 2025 kembali mengalami peningkatan mencapai angka 77,23.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, di antaranya:

- 1) Pemantauan kualitas air dilaksanakan terhadap 3 sungai utama, yaitu Tukad Jinah, Tukad Unda, dan Tukad Melangit, yang mana masing-masing dilakukan pemantauan pada titik hulu, tengah, dan hilir sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Berdasarkan hasil pengukuran pemantauan kualitas air, sebagian besar titik pemantauan telah memenuhi baku mutu Kelas Sungai II. Namun demikian, masih terdapat 2 (dua) titik pemantauan dengan status cemar ringan, yaitu pada Tukad Melangit bagian hilir yang teridentifikasi pada Periode I dan Periode II.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara langsung dilakukan pada 17 perusahaan di Provinsi Bali.
- 3) Pelaksanaan pendampingan pengelolaan lingkungan hidup terhadap 30 sekolah Adiwiyata dan 9 Kabupaten/Kota.
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui gerakan kebersihan yang dilaksanakan di kawasan sekitar sungai, danau, pantai, dan mangrove.
- 5) Meningkatkan pengawasan perusahaan terhadap persetujuan lingkungan yang telah diberikan rekomendasi persetujuan lingkungan.
- 6) Melaksanakan verifikasi dan pendampingan secara terpadu bersama dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dari segi realisasi capaian kinerja, tingkat upaya penurunan emisi GRK di Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami tantangan yang cukup berat dan belum mampu melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil pengukuran, dari target persentase penurunan emisi GRK tahun 2025 sebesar 13,26%, capaian yang terealisasi justru berada di angka minus, yakni sebesar -16,36%. Kegagalan melampaui target ini diakibatkan oleh terjadinya lonjakan total emisi GRK di Provinsi Bali yang meningkat tajam menyentuh angka 12.972,38 Gg CO₂Eq dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menurunkan emisi gas rumah kaca terus diupayakan secara berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang kini diperkuat dengan lokakarya penguatan kapasitas implementasi pembangunan rendah karbon menuju "Bali Emisi Nol Bersih 2045". Pencapaian target jangka panjang ini dilakukan melalui mitigasi pada sektor-sektor krusial. Berdasarkan hasil inventarisasi, sektor energi teridentifikasi sebagai penyumbang emisi terbesar yang mencapai

95% (12.239,68 Gg CO₂Eq), diikuti oleh sektor pertanian sebesar 13% (1.577,48 Gg CO₂Eq), dan sektor limbah sebesar 3% (355,95 Gg CO₂Eq). Di sisi lain, sektor kehutanan berhasil menunjukkan fungsinya sebagai penyerap karbon dengan mereduksi emisi sebesar -1.200,73 Gg CO₂Eq.

Untuk mengendalikan emisi lintas sektor tersebut, berbagai kegiatan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim diimplementasikan. Pada sektor lahan dan kehutanan, kegiatan difokuskan pada upaya rehabilitasi lahan, perlindungan kawasan hutan, serta pengembangan pertanian organik yang terintegrasi di dalam Program Kampung Iklim (ProKlim). Pada sektor energi, kegiatan pembangunan rendah karbon didukung melalui pelaksanaan gerakan energi bersih di tingkat daerah serta langkah efisiensi dan konservasi energi. Pada sektor pengelolaan limbah, intervensi dilakukan melalui pengelolaan sampah domestik/rumah tangga yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara itu, untuk sektor kelautan dan pesisir, kegiatan difokuskan pada pemulihan ekosistem pesisir seperti pelaksanaan aksi penanaman mangrove.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 telah melakukan koordinasi, sinkronisasi, mitigasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, di antaranya:

- 1) Pelaksanaan pembinaan penyusunan dokumen inventarisasi emisi GRK kepada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, yang dibarengi dengan monitoring dan evaluasi pengisian data inventarisasi emisi GRK melalui platform SIGNSMART;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi data sumber emisi gas rumah kaca dan verifikasi data yang meliputi sektor energi, IPPU, lahan, limbah, pertanian, dan peternakan;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang bekerja sama dengan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Kegiatan verifikasi lapangan untuk ProKlim Kategori Utama dilaksanakan pada 2 (dua) desa/kelurahan secara online (Desa Tibubeneng dan Kelurahan Penatih), yang meliputi penilaian upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada sektor konservasi air, konservasi lahan, konservasi flora fauna, pertanian

organik, serta pengelolaan limbah dan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

- 4) Fasilitas penetapan penerima penghargaan ProKlim Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dengan rincian capaian: 1 (satu) desa/kelurahan penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat, dan Insentif ProKlim Utama; 1 (satu) desa penerima Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama; 19 (sembilan belas) desa/kelurahan penerima Piagam Partisipasi ProKlim Kategori Madya; dan 8 (delapan) desa/kelurahan penerima Piagam Partisipasi ProKlim Kategori Pratama; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi/lembaga terkait melalui Focus Group Discussion (FGD), rapat koordinasi, peningkatan kapasitas risiko perubahan iklim, workshop gerakan energi bersih di tingkat daerah, serta lokakarya penguatan kapasitas implementasi pembangunan rendah karbon menuju Bali Emisi Nol Bersih 2045.

12. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah

Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Bali pada Tahun 2025 sangat baik, yaitu sebesar 100 persen. Dengan realisasi sebesar 94,34 persen dari target 94,34 persen.

Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah di Bali pada tahun 2025 merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang di Bali sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi wilayah secara efisien tanpa merusak keseimbangan lingkungan dan sosial. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai kesesuaian peruntukan ruang wilayah di Bali pada tahun 2025:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang

Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat implementasi kebijakan tata ruang melalui penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai kabupaten/kota. Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan fungsi kawasan, seperti kawasan permukiman, pariwisata, pertanian, kawasan lindung, dan kawasan budaya.

2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Upaya pengawasan dilakukan secara berkala melalui evaluasi perizinan pembangunan, pemantauan kegiatan pemanfaatan lahan, serta penertiban terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan keselarasan kebijakan tata ruang di seluruh wilayah Bali.

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial

Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan teknologi informasi dan sistem geospasial untuk memantau penggunaan ruang secara lebih akurat dan transparan. Dengan dukungan peta digital dan data spasial yang terintegrasi, proses perencanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan terkait tata ruang dapat dilakukan secara lebih efektif.

4. Perlindungan Kawasan Lindung dan Lahan Produktif

Pemerintah terus menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mempertahankan kawasan lindung, kawasan hutan, serta lahan pertanian produktif seperti sistem subak yang menjadi warisan budaya Bali. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ketahanan pangan, serta keberlanjutan budaya masyarakat Bali.

5. Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan masyarakat, desa adat, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan. Melalui sosialisasi, konsultasi publik, serta forum koordinasi, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan peruntukannya.

6. Integrasi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal

Pemerintah Provinsi Bali juga mengintegrasikan prinsip kearifan lokal, seperti konsep Tri Hita Karana, dalam perencanaan tata ruang. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan, sehingga pembangunan dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan.

13. Meningkatnya penggunaan energi bersih

Bali juga mulai bergerak secara agresif ke arah energi bersih, tidak hanya sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, melainkan juga untuk mewujudkan visi Bali Mandiri Energi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menetapkan arah pembangunan rendah

karbon menuju "Bali Emisi Nol Bersih" (Net Zero Emission/NZE) pada tahun 2045. Upaya ini diwujudkan melalui prioritas pemanfaatan teknologi hijau untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mengurangi emisi dari sektor pembangkitan.

Pada tahun 2025, capaian indikator Porsi Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Bali tercatat sebesar 2,72%. Capaian yang disajikan tersebut masih menggunakan data kondisi tahun 2024, dikarenakan data riil porsi EBT untuk tahun 2025 masih dalam proses formulasi dan penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 3,36%, capaian bauran EBT Bali saat ini masih berada di bawah target. Meskipun persentasenya masih relatif kecil dibandingkan ketergantungan pada energi fosil, Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mempercepat transisi energi melalui program Percepatan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap serta pemberlakuan moratorium (penghentian) pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di Bali.

Beberapa kebijakan dan langkah strategis yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan pengembangan energi terbarukan antara lain:

- 1) Menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Kebijakan ini menjadi landasan utama yang mengamanatkan kewajiban pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap minimal 20% dari kapasitas listrik terpasang bagi bangunan komersial, industri, dan pemerintah, serta secara tegas memberlakukan moratorium (penghentian) pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di Bali.
- 2) Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali Tahun 2020-2050. Peraturan ini berfungsi sebagai dokumen induk (masterplan) perencanaan untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan (seperti surya, mikrohidro, angin, dan biomassa) secara berkelanjutan ke dalam bauran energi daerah.
- 3) Akselerasi Pemasangan PLTS Atap dan Pembangkit Ramah Lingkungan. Didukung oleh Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022, instalasi panel surya telah sukses diterapkan di berbagai fasilitas publik strategis (seperti RSUD Bali Mandara, IPAL Suwung, dan Tol Bali Mandara). Selain itu, inovasi juga dilakukan

melalui pengembangan PLTS 1 MWp di Kecamatan Kubu (Karangasem), PLTS Sumur Bor di Desa Bondalem, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Panji Muara Sukasada.

- 4) Mendorong Ekosistem Kendaraan Listrik (KBLBB). Sebagai upaya menekan emisi karbon, Bali memprioritaskan pengembangan dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil di sektor transportasi, yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD).
- 5) Meluncurkan Program Percepatan Pemanfaatan PLTS Atap (2025). Sebagai langkah terobosan mutakhir, Pemerintah Provinsi Bali secara resmi meluncurkan program percepatan ini pada 15 Mei 2025 guna memberikan stimulasi bagi sektor swasta (seperti pariwisata, hotel, dan restoran) serta rumah tangga agar lebih masif berinvestasi pada teknologi energi bersih.
- 6) Kolaborasi Edukasi dan Kampanye dengan Lembaga Non-Pemerintah. Menjalinkan kerja sama aktif dengan lembaga swadaya masyarakat dan think-tank seperti Institute for Essential Services Reform (IESR) untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi, workshop, dan penguatan pemahaman publik mengenai pentingnya transisi energi terbarukan.
- 7) Pengembangan Ekosistem Desa Mandiri Energi menuju NZE 2045. Mendorong transisi energi hingga ke tingkat akar rumput, salah satunya melalui pembinaan desa percontohan biogas di Payangan. Seluruh kerangka kerja ini bermuara pada pencapaian visi besar kemandirian energi dan target Bali Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2045.

14. Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga

Bali menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan sampah, terutama sampah plastik yang banyak ditemukan di sepanjang pantai dan wilayah pesisir. Sampah plastik yang mencemari laut menjadi masalah serius yang dapat merusak ekosistem laut serta mengancam keberlangsungan hidup berbagai biota laut. Sebagai destinasi pariwisata dunia, permasalahan sampah juga berpotensi mempengaruhi citra dan keberlanjutan sektor pariwisata di Bali.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai sekitar 1.254.235 ton per tahun atau rata-rata 3.400 ton sampah per hari pada tahun 2025. Komposisi sampah tersebut didominasi oleh sampah organik sebesar 64,86%, sedangkan sampah plastik sekitar 17,25% dari total timbulan sampah.

Namun demikian, kapasitas pengelolaan sampah yang tersedia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Dari total timbulan sampah harian tersebut, hanya sekitar 76,80 % yang dapat dikelola dengan baik, sementara sisanya masih belum tertangani secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur, serta perubahan perilaku masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah masih sangat diperlukan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat implementasi kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik yang sulit terurai serta mendorong penggunaan produk yang lebih ramah lingkungan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Dalam aspek penguatan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali terus mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain melalui pembangunan dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, penguatan jaringan bank sampah dan unit pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga terus didorong untuk meningkatkan tingkat daur ulang dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Pemerintah Provinsi Bali juga menginisiasi berbagai gerakan kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, salah satunya melalui program Gerakan Bali Bersih Sampah yang melibatkan pemerintah daerah, desa adat, komunitas, pelaku usaha, serta sektor pariwisata. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti aksi bersih pantai dan sungai, kampanye pengurangan sampah plastik, serta edukasi pengelolaan sampah di sekolah dan masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah,

mengurangi timbulan sampah yang tidak terkelola, serta mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang berwawasan lingkungan.

15. Meningkatnya Kemandirian Desa Adat

Pada tahun 2025, pengukuran kemandirian ini disempurnakan melalui indikator strategis Indeks Membangun Desa Adat guna mewujudkan visi Kasukretan Desa Adat. Indeks ini merefleksikan keberhasilan tata kelola pemerintahan, perekonomian, pemajuan hukum adat, hingga pembangunan desa adat. Pada tahun 2025, capaian Indeks Membangun Desa Adat di Provinsi Bali berhasil terealisasi sebesar 0,8020. Nilai tersebut secara mutlak memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2025 yakni sebesar 0,8020, sehingga tingkat ketercapaian kinerjanya menyentuh persentase sempurna sebesar 100% dengan kategori "sangat baik". Lebih jauh, apabila capaian ini dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) di tahun 2029 yang dipatok sebesar 0,8400, maka tingkat kemajuan (progres) pembangunan kemandirian desa adat di Bali saat ini telah mencapai 95,48%.

Persentase Desa Adat Mandiri Provinsi Bali pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 15,07 persen. Hingga akhir tahun 2025, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar 15,41 persen, sehingga tingkat ketercapaian mencapai 102,22 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong peningkatan kemandirian desa adat berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang direncanakan.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kapasitas desa adat. Penguatan desa adat dilaksanakan melalui implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap desa adat serta memperkuat peran desa adat dalam kehidupan sosial, budaya, dan pembangunan masyarakat Bali.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Adat, yang dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan desa adat, pelestarian adat dan budaya, peningkatan kapasitas prajuru desa adat, serta pelaksanaan berbagai kegiatan adat dan sosial kemasyarakatan. Dukungan ini mendorong desa

adat untuk semakin mandiri dalam menjalankan fungsi pemerintahan adat serta pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan dan pendampingan juga dilakukan secara berkelanjutan melalui peran Majelis Desa Adat Provinsi Bali, yang berperan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa adat, memperkuat tata kelola organisasi, serta memastikan pelaksanaan adat dan tradisi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Dengan capaian realisasi yang melebihi target tersebut, menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan desa adat dan seluruh pemangku kepentingan telah berjalan efektif dalam mendorong terwujudnya desa adat yang mandiri, kuat secara kelembagaan, serta mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya Bali secara berkelanjutan.

16. Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali

Indeks Pemajuan Tradisi pada Tahun 2025 tercapai sebesar 15 persen dengan tingkat tercapaian sebesar 100 persen. Nilai ini merupakan komposit dari Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra, Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan, serta Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi yang diukur oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Persentase pemajuan bahasa aksara dan sastra, persentase peningkatan pemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan, serta persentase peningkatan pembinaan masyarakat tentang sejarah dan tradisi menunjukkan capaian yang optimal, dengan masing-masing mencapai 5 persen. Sehingga menghasilkan Indeks Pemajuan Tradisi di Bali pada tahun 2025 sebesar 15 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan aspek kebudayaan Bali secara konsisten.

Beberapa upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam memajukan tradisi Bali yaitu:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pelestarian budaya daerah, seperti pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang menjadi ruang ekspresi bagi seniman dan pelaku budaya untuk menampilkan serta melestarikan berbagai bentuk seni dan tradisi Bali.
- 2) Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali sebagai upaya memperkuat penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui berbagai

- kegiatan lomba, seminar, serta kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat dan generasi muda.
- 3) Inventarisasi dan dokumentasi tradisi serta warisan budaya tak benda, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendata, melindungi, serta memastikan keberlanjutan tradisi yang berkembang di masyarakat.
 - 4) Pembinaan dan fasilitasi sanggar seni serta komunitas budaya, melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan kegiatan seni tradisional guna meningkatkan kapasitas pelaku budaya dalam menjaga dan mengembangkan tradisi.
 - 5) Penguatan peran desa adat sebagai pusat pelestarian budaya, melalui dukungan program dan kegiatan adat yang berfungsi menjaga keberlangsungan tradisi, nilai-nilai budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali.
 - 6) Pelaksanaan festival, lomba, dan pertunjukan seni tradisional di berbagai daerah, sebagai sarana pelestarian sekaligus promosi tradisi kepada masyarakat luas.
 - 7) Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda, khususnya melalui lembaga pendidikan dan komunitas budaya, guna menanamkan nilai-nilai tradisi serta meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah.

17. Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali

Indeks Pemajuan Kebudayaan Provinsi Bali pada Tahun 2025 tercapai sebesar 71.36% telah mencapai target yang ditetapkan pada awal Tahun 2025 sebesar 66% dengan Tingkat tercapaian sebesar 109.78%, bila dibandingkan dengan ketercapaian target di akhir RPD sebesar 67% Tingkat ketercapaian sebesar 106.50% dengan kategori capaian kinerja “sangat baik”.

Bila dibandingkan dengan capaian Nasional pada Tahun 2025, Indeks Pemajuan Kebudayaan sebesar 55,13%, data Indeks Kebudayaan ini merupakan data Tahun 2023 dari Kementerian Kebudayaan, data Tahun 2024 s.d 2025 Kementerian Kebudayaan tidak lagi mengeluarkan data resmi terkait dengan Indeks Pemajuan Kebudayaan. Indeks Pemajuan Kebudayaan Bali lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan menempati peringkat 1 (satu) dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi seluruh Indonesia. Berikut disampaikan perbandingan Nilai per Dimensi Indeks Pemajuan Kebudayaan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Capaian Nasional.

Adapun langkah dilakukan untuk menjaga serta meningkatkan Pemajuan Kebudayaan antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap situs-situs budaya: Pemerintah memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan pemeliharaan situs-situs budaya dan cagar budaya di Bali, seperti Pura Besakih, Pura Tanah Lot, dan Pura Ulun Danu Beratan, serta berbagai bangunan bersejarah yang merupakan bagian dari identitas budaya Bali.
- 2) Pemeliharaan upacara adat: Kebijakan ini mendukung pelaksanaan berbagai upacara adat dan keagamaan Bali, seperti Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati, serta mendukung pemeliharaan tradisi-tradisi tersebut melalui pembiayaan dan organisasi acara adat.
- 3) Perlindungan seni tradisional Bali: Pemerintah provinsi mendorong pelestarian seni tradisional Bali, seperti tari Bali, musik gamelan, dan seni ukir. Program pelatihan dan pendidikan seni untuk generasi muda juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini.
- 4) Integrasi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan: Kebijakan ini memastikan bahwa pelajaran tentang seni, tari, musik, dan bahasa Bali dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Bali, sehingga generasi muda dapat mengenal dan menguasai nilai-nilai budaya Bali sejak dini.
- 5) Pendidikan seni dan budaya: Pemerintah Provinsi Bali menyediakan fasilitas pendidikan seni di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi untuk mengajarkan seni tradisional Bali. Selain itu, lembaga seni tradisional seperti Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar turut mendukung pelestarian budaya Bali.
- 6) Program pelatihan seni: Pemerintah juga mendukung program pelatihan seni, termasuk dalam bidang tari, musik gamelan, dan seni rupa, bagi anak-anak dan remaja yang berminat untuk melanjutkan tradisi budaya Bali.
- 7) Festival budaya: Bali memiliki berbagai festival budaya, seperti Pesta Kesenian Bali yang diselenggarakan setiap tahun, di mana berbagai jenis seni budaya Bali ditampilkan. Festival ini menjadi platform untuk menunjukkan keberagaman seni dan budaya Bali serta menarik wisatawan domestik dan internasional.
- 8) Partisipasi dalam event internasional: Bali juga aktif berpartisipasi dalam berbagai event internasional, baik di bidang seni, budaya, maupun pariwisata, untuk mempromosikan seni tradisional Bali ke

dunia internasional. Event seperti Bali Arts Festival menjadi ajang penting untuk memperkenalkan seni Bali kepada audiens global.

- 9) Digitalisasi budaya Bali: Pemerintah Bali juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya Bali. Ini termasuk pengarsipan dan publikasi karya seni, upacara adat, dan ritual keagamaan Bali dalam bentuk digital untuk mempermudah akses bagi generasi muda maupun masyarakat internasional.

18. Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim

Indeks Provinsi Hijau (IPH) Provinsi Bali pada Tahun 2025 tercapai sebesar 75,88 % telah mencapai target yang ditetapkan pada awal Tahun 2025 sebesar 67,57% dengan Tingkat tercapaian sebesar 112,29%, bila dibandingkan dengan ketercapaian target di akhir RPD sebesar 80,72% tingkat ketercapaian sebesar 94,01% dengan kategori capaian kinerja “sangat baik”. Berikut gambaran ketercapaian target pada tahun 2025.

Untuk mencapai kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang optimal, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya strategis melalui peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan secara terpadu. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Pengendalian pencemaran air melalui pengawasan kualitas air sungai, danau, serta sumber air lainnya, termasuk peningkatan pengelolaan limbah domestik dan limbah usaha/kegiatan agar tidak mencemari badan air.
- 2) Peningkatan kualitas udara dengan melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala, pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan industri, serta mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
- 3) Perlindungan dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan, termasuk upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penghijauan, serta penguatan tata kelola pemanfaatan ruang agar tidak merusak keseimbangan ekosistem.
- 4) Pengendalian pencemaran laut dan wilayah pesisir, melalui pemantauan kualitas air laut, penanganan sampah laut, serta

penguatan pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara berkelanjutan.

- 5) Penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber, termasuk implementasi kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.
- 6) Peningkatan peran serta masyarakat dan desa adat dalam pelestarian lingkungan melalui gerakan kebersihan lingkungan, konservasi sumber daya alam, serta penguatan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam Bali.
- 7) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, guna memastikan setiap kegiatan pembangunan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi

Pada tahun 2025, kondisi infrastruktur di Provinsi Bali menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari sisi infrastruktur darat, panjang jalan nasional di Bali mencapai sekitar 589,65 km dengan tingkat kemantapan jalan mencapai sekitar 99,03%, serta kemantapan jembatan sekitar 95,35%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan nasional di Bali berada dalam kondisi baik sehingga mampu mendukung kelancaran mobilitas antarwilayah dan distribusi logistik.

Dengan kondisi tersebut, peningkatan kualitas infrastruktur darat, laut, dan udara yang saling terhubung mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas wilayah, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah, mendukung sektor pariwisata, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Bali.

Capaian Indeks Infrastruktur Provinsi Bali Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dengan target sebesar 76,27, realisasi yang dicapai adalah 89,66, sehingga tingkat capaian mencapai 117,55%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali telah melampaui target yang ditetapkan.

Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan Indeks Infrastruktur dapat dilihat dari beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk memperbaiki serta mengembangkan berbagai sektor infrastruktur

guna mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas perekonomian. Beberapa upaya tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan provinsi guna memastikan konektivitas antar kabupaten/kota berjalan lancar serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
- 2) Pemerintah mendorong integrasi sistem transportasi melalui pengembangan akses menuju pelabuhan dan bandara serta peningkatan fasilitas transportasi yang mampu menghubungkan kawasan pariwisata, pusat ekonomi, dan wilayah perdesaan.
- 3) Mengingat pariwisata merupakan sektor unggulan Bali, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata, termasuk kawasan strategis pariwisata nasional dan desa wisata.
- 4) Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong peningkatan akses terhadap air minum layak, sanitasi, serta jaringan listrik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
- 5) Pembangunan infrastruktur di Bali diarahkan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya air, sistem drainase, serta pembangunan yang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
- 6) Pemerintah juga mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi dan digital untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan konektivitas informasi di seluruh wilayah Bali.

20. Meningkatnya kualitas infrastruktur public

Capaian Indeks Layanan Infrastruktur Provinsi Bali Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Dengan target sebesar 78,34, realisasi yang dicapai adalah 79,58, sehingga tingkat capaian mencapai 101,58%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan infrastruktur publik di Provinsi Bali telah berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Kualitas Infrastruktur Publik di Bali telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, Bali memerlukan infrastruktur yang baik

untuk melayani jutaan wisatawan serta mendukung aktivitas ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai kualitas infrastruktur publik di Bali:

- 1) Infrastruktur transportasi di Bali terus ditingkatkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan dilakukan guna memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Selain itu, peningkatan fasilitas transportasi udara melalui optimalisasi layanan bandara serta pengembangan transportasi laut melalui pelabuhan juga menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas Bali dengan daerah lain di Indonesia maupun internasional.
- 2) Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dan sistem sanitasi yang aman. Pengembangan sistem penyediaan air minum serta peningkatan pengelolaan sanitasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 3) Ketersediaan pasokan listrik yang stabil menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata di Bali. Pemerintah bersama pihak terkait terus meningkatkan jaringan listrik dan memastikan distribusi energi dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.
- 4) Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet di Bali. Hal ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas akses informasi bagi masyarakat.
- 5) Pemerintah juga terus meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata seperti fasilitas kawasan wisata, ruang publik, serta sarana dan prasarana pelayanan publik lainnya. Infrastruktur tersebut berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

21. Meningkatnya konektivitas transportasi public

Pada tahun 2025, Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Bali ditargetkan sebesar 0,88 dan berhasil direalisasikan sebesar 0,88, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan

keterhubungan jaringan transportasi antarwilayah telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Upaya mewujudkan konsep “Transportasi Untuk Semua” dilakukan melalui peningkatan kuantitas infrastruktur transportasi, penguatan integrasi antar moda, serta peningkatan konektivitas antarwilayah di Provinsi Bali. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa serta memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Beberapa infrastruktur transportasi yang menjadi prioritas penyelesaian dalam lima tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sistem transportasi massal perkotaan, termasuk rencana pembangunan Bali Urban Subway atau MRT Bali yang menghubungkan kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan berbagai pusat aktivitas di wilayah selatan Bali.
- 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi, terutama pada ruas jalan yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan pariwisata, serta wilayah Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur guna memperkuat pemerataan pembangunan wilayah.
- 3) Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pariwisata, termasuk penguatan fungsi Pelabuhan Sanur sebagai gerbang menuju kawasan kepulauan serta peningkatan layanan pelabuhan di wilayah pesisir Bali.
- 4) Peningkatan kualitas terminal dan simpul transportasi darat, sehingga mampu mendukung integrasi layanan angkutan antar kota, angkutan kawasan perkotaan, serta transportasi pariwisata.
- 5) Penguatan sistem transportasi kawasan metropolitan Sarbagita, yang meliputi wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan melalui pengembangan layanan transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

22. Meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Capaian Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali pada Tahun 2025 sangat baik, yaitu sebesar 113,43 persen. Dengan realisasi sebesar 93,10 persen dari target 82,07 persen. Nilai ini bahkan sudah melampaui capaian akhir tahun RPD 2024-2026.

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), antara lain:

- 1) Pengembangan Infrastruktur TIK yang Merata
- 2) Pemerintah Provinsi Bali terus memperluas jangkauan jaringan fiber optik dan konektivitas internet hingga ke wilayah desa dan kawasan terpencil guna mempercepat konektivitas antarwilayah. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, layanan publik, pendidikan, dan ekonomi digital.
- 3) Pengembangan Ekosistem Smart City dan Smart Province
- 4) Pemprov Bali mendorong implementasi konsep Smart City dan Smart Province di berbagai kabupaten/kota dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan transportasi, pengawasan lingkungan, pengelolaan energi, serta penguatan sistem keamanan wilayah.
- 5) Implementasi Transformasi Digital Bali (Bali Smart Island / Bali Digital Transformation)
- 6) Inisiatif transformasi digital Bali diarahkan untuk mempercepat integrasi sistem digital di sektor pemerintahan, ekonomi kreatif, pariwisata, pendidikan, dan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta daya saing daerah dalam menghadapi era ekonomi digital.
- 7) Penguatan Layanan Publik Berbasis Digital
- 8) Pemerintah Provinsi Bali terus mengembangkan berbagai aplikasi layanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan, seperti pelayanan perizinan usaha, pembayaran pajak daerah, layanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, serta layanan informasi pariwisata.
- 9) Penguatan Kapasitas Infrastruktur Internet Pemerintah Daerah
- 10) Pemerintah Provinsi Bali menyediakan layanan internet IP Transit internasional pada Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali dengan kapasitas bandwidth sebesar 4 Gbps yang digunakan untuk mendukung konektivitas internet terintegrasi bagi seluruh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan keandalan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 11) Penyediaan Layanan Wifi Gratis di Sekolah

- 12) Pemerintah Provinsi Bali menyediakan layanan wifi gratis untuk SMA/SMK/SLB Negeri se-Bali guna mendukung kegiatan pembelajaran digital dan peningkatan literasi teknologi bagi peserta didik. Setiap titik layanan wifi dialokasikan bandwidth sebesar 50 Mbps untuk mendukung aktivitas pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- 13) Program Wifi Gratis melalui BKK untuk Desa Adat dan Fasilitas Publik
- 14) Melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Pemprov Bali menyediakan layanan wifi gratis pada desa adat, objek wisata, dan puskesmas yang telah menjangkau sekitar 2.118 titik layanan. Program ini bertujuan memperkuat akses digital masyarakat serta mendukung pengembangan ekonomi desa dan sektor pariwisata berbasis digital.
- 15) Pelaksanaan Program Literasi Digital
- 16) Pemerintah Provinsi Bali secara rutin melaksanakan kegiatan literasi digital yang melibatkan berbagai komunitas dan organisasi masyarakat yang aktif dalam edukasi digital dan penanggulangan hoaks, seperti Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Provinsi Bali dan MAFINDO Wilayah Bali, guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif.
- 17) Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 18) Pemprov Bali telah menetapkan Roadmap SPBE Provinsi Bali serta memperkuat implementasinya melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendorong integrasi sistem pemerintahan digital, peningkatan efisiensi birokrasi, serta transparansi pelayanan publik.
- 19) Pembangunan Menara Turyapada sebagai Infrastruktur Telekomunikasi Terpadu
- 20) Pemerintah Provinsi Bali membangun Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali sebagai infrastruktur telekomunikasi multifungsi yang mengintegrasikan layanan siaran televisi digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet, serta komunikasi radio komunitas. Selain sebagai infrastruktur

telekomunikasi strategis, menara ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata teknologi berbasis kearifan lokal Bali.

23. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

Pada tahun 2025, Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Provinsi Bali ditargetkan sebesar 4,25, dan terealisasi sebesar 4,30, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,18 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Bali berada pada kategori sangat baik atau memuaskan, serta mencerminkan situasi wilayah yang relatif kondusif bagi masyarakat maupun aktivitas perekonomian dan pariwisata.

Untuk memperkuat dan mempertahankan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan berbagai upaya strategis melalui sejumlah langkah konkret, antara lain:

- 1) Penguatan penegakan peraturan daerah melalui peningkatan peran aparat ketertiban, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penegakan Perda guna menjaga ketertiban umum di ruang publik.
- 2) Peningkatan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan desa adat, termasuk optimalisasi peran pecalang dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di tingkat komunitas.
- 3) Pengembangan budaya tertib di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye kesadaran publik terkait pentingnya tertib berlalu lintas, tertib administrasi kependudukan, serta tertib dalam memanfaatkan fasilitas umum.
- 4) Penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan, melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, desa/kelurahan, serta komunitas lokal untuk turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan wilayahnya masing-masing.
- 5) Peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan potensi gangguan ketertiban umum.

Pada tahun 2025, capaian IRB Provinsi Bali sudah melampaui target dengan capaian sebesar 107,36%. Capaian ini menurun sebanyak 11.66 poin dari tahun 2024.

Dalam rangka mendukung penurunan risiko bencana tersebut, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan bencana dengan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya penanggulangan bencana yang tersedia, antara lain melalui beberapa langkah berikut:

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, melalui peningkatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, melalui sosialisasi, edukasi kebencanaan, serta pelaksanaan simulasi dan latihan penanggulangan bencana secara berkala kepada masyarakat dan komunitas lokal.
- 3) Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana secara mandiri.
- 4) Penguatan sistem peringatan dini bencana, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, termasuk penyediaan peralatan tanggap darurat, logistik kebencanaan, serta pengembangan jalur dan titik evakuasi di wilayah rawan bencana.
- 6) Penyusunan dan pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana serta rencana penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana.

24. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Demokrasi Provinsi Bali mencapai 85,13 yang sudah berada pada kategori baik. Nilai ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Bali berjalan cukup kuat, tercermin dari partisipasi politik masyarakat yang tinggi, kebebasan berpendapat yang relatif terjaga, serta berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi secara efektif.

Memasuki tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target sebesar 77. Namun realisasi yang dicapai justru 88,34, sehingga

tingkat capaian kinerja mencapai 114,72% dari target yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Bali tidak hanya mampu dipertahankan, tetapi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, antara lain:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk melalui peningkatan sosialisasi politik dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan kondusif.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk dalam pengambilan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat.
- 4) Memperkuat koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, guna memastikan pelaksanaan demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan.
- 5) Mendorong peran aktif organisasi masyarakat, media, dan lembaga sosial dalam mengawasi serta mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat.

25. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Bali mencapai 93,46, yang menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi telah berjalan sangat baik dan mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali menargetkan nilai indeks sebesar 75, namun realisasi yang dicapai meningkat menjadi 95,05 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 126,73 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 1,59 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan dan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali, yaitu:

- 1) Memperkuat pemahaman Perangkat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Bali melakukan penguatan kapasitas Perangkat Daerah dalam memahami dan mengimplementasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi, pembinaan, dan asistensi dalam penyusunan serta pengukuran kinerja dengan memperhatikan keterkaitan variabel pengukuran yang melibatkan perangkat daerah lainnya, sehingga tercipta sinergi dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah secara terpadu.
- 2) Penyederhanaan Prosedur Birokrasi berupa One Stop Service (OSS) dan berbagai sistem terintegrasi lainnya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai jenis perizinan dan administrasi.
- 3) Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN dengan mengadakan berbagai pelatihan pengembangan kompetensi melalui mekanisme pembelajaran blended melalui Kerthi Bali Sejahtera Corporate University (CORPU), Serial webinar dan dimana di tahun 2025 telah dikeluarkan 38.989 sertifikat pengembangan kompetensi.
- 4) Penguatan sistem whistleblowing dan laporan harta kekayaan untuk mencegah korupsi dalam birokrasi.
- 5) Pencegahan dan penanganan stunting melalui pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas untuk pemberian tambahan asupan pangan lokal pada balita bermasalah gizi serta ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).
- 6) Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2025 dengan menitikberatkan pada hasil LHE Reformasi Birokrasi yang dievaluasi pada Tahun 2024;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara maksimal dengan memaparkan langsung ketercapaian secara triwulan di depan Bapak Gubernur Bali;
- 8) Melaksanakan pendampingan terhadap penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan pada RB Tematik Pemerintah Provinsi Bali sehingga RB Tematik dapat berdampak pada masyarakat Provinsi Bali;
- 9) Menyusun Aplikasi Pemantauan Pencapaian Renaksi yang dapat dipantau langsung oleh Gubernur.

26. Meningkatkan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 190/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan bahwa penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan, pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 386,5 (tiga ratus delapan puluh enam koma lima), dan Indeks 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat). Capaian ini juga telah melewati target yang ditetapkan pada akhir tahun RPD 2024-2026.

Sebagai wujud penerapan sistem merit yang sangat baik, Pemerintah Provinsi Bali (BKPSDM) menjadi salah satu dari 22 Instansi Pemerintah yang telah disetujui untuk mengisi JPT melalui *Talent Pool*.

Pemilihan pembinaan kader potensial (*talent pool*) terjaring melalui kegiatan *assessment* pegawai. Pada Tahun 2025, BKPSDM telah melaksanakan *assessment* baik dari peserta internal maupun eksternal dengan total peserta 1.161 orang.

Perubahan lingkungan strategis saat ini masuk dalam ranah digital (arus revolusi industri 4.0) yang memaksa adaptasi pada sistem pemerintahan menuju birokrasi digital, dimana setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus smart terhadap teknologi untuk meningkatkan Pelayanan Publik dan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Profil smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa *hospitality*, berjiwa *entrepreneurship*, dan memiliki jaringan luas. Maka dari pada itu perlu dilakukan pengembangan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan.

Dalam rangka mengakselerasi pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN 20JP setiap tahunnya telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui mekanisme pembelajaran *blended* melalui Kerthi Bali Sejahtera Corporate University, Serial webinar dan kerjasama dimana di tahun 2025 telah dikeluarkan 33.951 sertifikat pengembangan kompetensi.

Pada Tahun 2025 BKPSDM memperoleh penghargaan dari LAN RI sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk Menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II dengan Kategori Akreditasi B dan Masa Berlaku 3 (Tiga) Tahun.

27. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur dan menilai sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan program pemerintah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pada Tahun 2024, Nilai AKIP Pemerintah Provinsi Bali mencapai 78,99. Selanjutnya pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 81, dengan realisasi kinerja sebesar 79,73, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 98,43% dari target yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah berjalan cukup baik dan relatif stabil, meskipun realisasi tahun 2025 masih sedikit berada di bawah target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan nilai sebesar 0,74 poin dari 78,99 pada tahun 2024 menjadi 79,73 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dalam mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, beberapa upaya Pemprov Bali dalam meningkatkan kualitas SAKIP antara lain:

- 1) Memastikan keselarasan kinerja yang dikawal pada dokumen perencanaan perangkat daerah khusus antara Renstra dan PK;
- 2) Melakukan revidi indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level pusat dan unit kerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART, cukup, dan memiliki formulasi perhitungan dan penetapan sumber data yang sesuai untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran;
- 3) Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
- 4) Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam Laporan Kinerja PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi,

serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang dimiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya, dan

- 5) Melakukan monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan secara lebih mendalam untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh pengawas internal sudah ditindakjuti oleh unit kerja.

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah penilaian atau evaluasi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Opini ini sangat penting sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Opini BPK dapat digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah instansi atau pemerintah daerah telah mengelola anggaran dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya berturut-turut, sejak tahun anggaran 2013 hingga 2024. Pencapaian opini WTP yang konsisten ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

28. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kualitas layanan publik adalah indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah yang baik harus mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, adil, dan memadai, serta mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik antara lain: peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, penggunaan teknologi digital, sistem pengaduan yang responsif, transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan standar dan kualitas pelayanan.

Pada Tahun 2024, realisasi IKM Provinsi Bali tercatat sebesar 85,56. Pada Tahun 2025 pemerintah menargetkan peningkatan nilai IKM menjadi 89, sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hingga periode pengukuran Tahun 2025, realisasi yang dicapai adalah 87,66 atau dengan tingkat capaian sebesar 98,49% dari target yang ditetapkan.

Secara kinerja, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Provinsi Bali mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Peningkatan dari 85,56 pada tahun 2024 menjadi 87,66 pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem pelayanan publik, baik dari aspek prosedur, kecepatan pelayanan, maupun peningkatan profesionalisme aparatur.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan langkah perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan desk atau asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) guna mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2024, realisasi kinerja Indeks Inovasi Daerah tercatat sebesar 69,92. Sementara itu pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 66,75, dan realisasi kinerja berhasil mencapai 77,04, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 115,41 persen dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja inovasi Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya mampu memenuhi target yang direncanakan, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan nilai sebesar 7,12 poin (dari 69,92 menjadi 77,04). Hal ini mencerminkan semakin kuatnya ekosistem inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam mendorong pengembangan dan implementasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam rangka mempertahankan kategori sangat inovatif dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Provinsi Bali, jumlah inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah terus ditingkatkan. Sesuai Pergub 80 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah, setiap Perangkat

Daerah di Lingkungan Provinsi Bali wajib mengusulkan sedikitnya 3 (tiga) inovasi. Terdapat 108 inovasi yang telah diterapkan di Tahun 2025, meningkat dari Tahun 2024 sebanyak 72 inovasi. Atas peningkatan jumlah dan kualitas inovasi yang diterapkan, Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai Pemerintah Daerah Dengan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Regional IV, Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai Provinsi Terinovatif.

Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita. Trans Bali/Trans Sarbagita adalah sistem angkutan umum bus rapid transit (BRT) yang beroperasi di wilayah Bali, khususnya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Diresmikan pada tahun 2011, layanan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan wisatawan dengan menyediakan alternatif transportasi yang efisien dan terjangkau. Trans Sarbagita memiliki beberapa rute utama yang menghubungkan berbagai titik penting di Bali.

Layanan ini mencakup area dari utara (Gianyar) dengan pemberhentian di Batubulan hingga selatan (Badung) dengan pemberhentian di Garuda Wisnu Kencana (GWK). Pemberhentian paling barat berada di Ungasan 1 (Badung), sedangkan pemberhentian paling timur berada di Batubulan (Gianyar). Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di pulau ini.

Pada Tahun 2024, realisasi kinerja Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita tercatat sebesar 81,91. Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target kinerja sebesar 83, dan hingga akhir tahun realisasi yang dicapai adalah 84,23. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 101,46%, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2025 berhasil terlampaui.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai indeks pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,32 poin dari 81,91 menjadi 84,23. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan transportasi publik, khususnya pada layanan Trans Bali/Trans Sarbagita yang semakin mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi.

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita Tahun 2025 yang mencapai 84,23 atau 101,46% dari target disebabkan oleh beberapa faktor peningkatan kualitas layanan

transportasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, melalui perbaikan kondisi armada bus Trans Bali/Trans Sarbagita sehingga lebih nyaman, bersih, dan aman bagi penumpang.
- 2) Perbaikan fasilitas halte dan titik pemberhentian, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan transportasi publik serta mendapatkan fasilitas yang lebih memadai saat menunggu kedatangan bus.
- 3) Peningkatan ketepatan waktu layanan, melalui pengaturan jadwal operasional dan pengawasan terhadap waktu keberangkatan serta kedatangan bus sehingga perjalanan menjadi lebih terjadwal dan dapat diprediksi oleh pengguna.
- 4) Pemanfaatan aplikasi pemantau bus (bus tracking system) yang memungkinkan masyarakat memantau posisi dan estimasi kedatangan bus secara real-time, sehingga pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan mengurangi waktu tunggu di halte.
- 5) Penerapan sistem pembayaran non tunai melalui QRIS, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran tarif angkutan secara cepat, praktis, dan aman. Sistem ini juga mendukung digitalisasi layanan transportasi publik serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan petugas, baik pengemudi maupun petugas lapangan, melalui pembinaan dan peningkatan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Optimalisasi pengelolaan operasional transportasi, termasuk peningkatan pengawasan dan pengendalian operasional sehingga layanan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penugasan ini disertai dengan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pihak yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2025 yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Bali yaitu:

- 1. Kementerian Pertanian.
- 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.1.1 Target Kinerja

a. Kementerian Pertanian

Total Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada Tahun 2025 adalah Rp2.739.971.000,00 dan realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp2.538.551.438,00 (92,65%) dengan sisa anggaran Rp204.419.562,00 (7,35%) dan realisasi fisik terealisasi 100%.

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan Tugas Pembantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali untuk kegiatan penanganan jalan dan irigasi. Pemberian Tugas Pembantuan ini bertujuan untuk mendukung penyelesaian pembangunan daerah yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh Pemerintah Pusat.

Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.735.567.000,00, dengan rincian pada SKPD-TP Sumber Daya Air sebesar Rp5.743.279.000,00 dan SKPD-TP Bina Marga sebesar Rp6.992.288.000,00. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran, dilakukan pemblokiran terhadap dua rekening belanja, yaitu Belanja Pelaporan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi berbasis SMOPI dan Sistem Pelaporan secara Elektronik, dengan total pagu blokir sebesar Rp39.090.000,00. Dengan demikian, pagu SKPD-TP Sumber Daya Air berubah menjadi Rp5.484.711.000,00, dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp5.484.711.000,00 (100%). Sementara itu, SKPD-TP Bina Marga memiliki pagu sebesar Rp6.992.288.000,00, dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.787.186.000,00 (99,97%) dan realisasi fisik mencapai 100%.

Rekapitulasi Tugas Pembantuan lingkup Provinsi Bali Tahun 2025

No	Kementerian	Perangkat Daerah	Total Dana TP (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik
1	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi	2,739,971,000.00	2,538,551,438.00	92,65%	201,419,562.00	100%

No	Kementerian	Perangkat Daerah	Total Dana TP (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik
		Bali					
2	Kementerian PUPR	Dinas PUPRPKP Provinsi Bali (SKPD-TP SDA)	5,484,711,000.00	5,484,711,000.00	100%	-	100%
3	Kementerian PUPR	Dinas PUPRPKP Provinsi Bali (SKPD-TP Bina Marga)	6,992,288,000.00	6,787,186,000.00	99,97%	205,102,000.00	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

3.1.2 Realisasi

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

1. Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pagu anggaran Rp1.055.261.000,00 realisasi anggaran Rp985.257.447,00 (93,37%), sisa anggaran Rp70.003.553,00 (6,63%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan pagu anggaran Rp913.470.000,00 realisasi anggaran Rp909.638.670,00 (99,58%), realisasi fisik 100%.
 - b) 1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan pagu Rp141.791.000,00 realisasi anggaran Rp75.618.777,00 (53,33%), realisasi fisik 100%.
2. Tanaman Pangan. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp205.440.000,00 realisasi anggaran Rp203.555.969,00 (99.08%), sisa anggaran Rp1.884.031,00 (0,92%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) 1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan Pasca Panen pagu anggaran Rp28.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.724.831,00 (95,45%) realisasi fisik 100%.
 - b) 1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu Rp126.450.000,00 realisasi anggaran Rp126.403.365,00 (99.96%), realisasi fisik 100%.
 - c) 1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp50.990.000,00 realisasi anggaran Rp50.427.773,00 (98,90%), realisasi fisik 100%.
3. Prasarana dan Sarana Pertanian. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Pagu Keseluruhan Rp1.479.270.000,00 Realisasi Anggaran Rp1.349.738.022,00 (91,24%) dan sisa dana Rp129.531.978,00 (8,76%).Realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) 1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan pagu anggaran Rp165.000.000,00 realisasi anggaran Rp161.721.059,00 (98,01%), realisasi fisik 100%.
- b) 3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida dengan pagu anggaran Rp714.270.000,00 realisasi anggaran Rp669.941.945,00 (93,79%), realisasi fisik 100%, dengan realisasi fisik 100%.
- c) 1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran Rp600.000.000,00 realisasi anggaran Rp518.075.018,00 (86,35%), realisasi fisik 100%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air. Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi dengan tetap menjaga agar sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik. Target kinerja program ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Ketahanan Sumber Daya Air adalah:
 - a) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana melakukan operasi dan pemeliharaan pada Daerah Irigasi Tukad Ayung untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi;
 - b) Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air merupakan dukungan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan.
2. Program Penyelenggaraan Jalan. Program Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan dalam kondisi mantap. Target kinerja program ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Jalan adalah:
 - a) Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dilaksanakan bertujuan untuk merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan nasional lintas provinsi serta melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, perbaikan trotoar, perbaikan tebing, dan fasilitas keselamatan jalan dan jembatan. Target kinerja kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

secara umum dapat berjalan dengan baik. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD-TP Bina Marga yaitu secara umum Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada SKPD-TP Bina Marga dalam pelaksanaan selama 1 (satu) tahun tidak mengalami permasalahan/hambatan dan realisasi kinerja maupun keuangan sudah sesuai target capaian program.

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	REVISI PAGU	R E A L I S A S I			BLOKIR					SISA DANA
				S.D. NOVEMBER	DESEMBER	S.D. DESEMBER		FISIK		KEUANGAN		
								TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12=7/4*100	13=(4-7-8)
I	KEMENTERIAN PERTANIAN		2.739.971.000	1.627.790.582	431.768.409	2.059.558.991	109.320.000	100,00	100,00	79,43	75,17	571.092.009
1	229099	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	205.440.000	195.182.179	8.373.790	203.555.969	-	100,00	100,00	99,08	99,08	1.884.031
2	229102	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	1.055.261.000	462.750.000	43.515.000	506.265.000	59.320.000	100,00	100,00	47,98	47,98	489.676.000
3	229108	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	1.479.270.000	969.858.403	379.879.619	1.349.738.022	50.000.000	100,00	100,00	91,24	91,24	79.531.978
II	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		12.313.001.000	10.049.016.392	2.222.880.751	12.271.897.143	39.090.000	100,00	99,65	100,00	99,67	2.013.857
4	694103	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali	5.523.801.000	4.960.263.000	524.448.000	5.484.711.000	39.090.000	100,00	99,29	100,00	99,29	-
5	693772	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali.	6.789.200.000	5.088.753.392	1.698.432.751	6.787.186.143	-	100,00	100,00	100,00	99,97	2.013.857
III	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		248.120.000	-	-	-	248.120.000	-	-	-	-	-
6	691132	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali	248.120.000	-	-	-	248.120.000	-	-	-	-	-
IV	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		148.490.000	8.183.199	-	8.183.199	140.190.000	16,67	16,43	16,67	16,43	116.801
7	229110	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	8.300.000	8.183.199	-	8.183.199	-	100,00	98,59	100,00	98,59	116.801
8	691029	Dinas Kelautan dan						-		-		

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	REVISI PAGU	R E A L I S A S I			BLOKIR	FISIK		KEUANGAN		SISA DANA
				S.D. NOVEMBER	DESEMBER	S.D. DESEMBER		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
				5	6	7=(5+6)		9	10	11	12=7/4*100	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12=7/4*100	13=(4-7-8)
		Perikanan Provinsi Bali	140.190.000	-	-	-	140.190.000		-		-	-
V	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		547.801.000	-	-	-	547.801.000	-	-	-	-	-
9	690764	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali	547.801.000	-	-	-	547.801.000	-	-	-	-	-
TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI			15.997.383.000	11.684.990.173	2.654.649.160	14.339.639.333	1.084.521.000	43,33	43,22	39,22	38,25	573.222.667

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tahun Anggaran 2023 di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

3.3. Permasalahan dan Kendala

1. Kementerian Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya reconfusing anggaran berulang kali
- b. Adanya penambahan anggaran di triwulan III dan IV
- c. Terjadinya revisi anggaran berulang kali
- d. Adanya pemblokiran pagu anggaran di awal tahun

2. Kementerian Pekerjaan Umum

Secara umum Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada SKPD-TP Sumber Daya Air maupun SKPD-TP Bina Marga dalam pelaksanaan selama 1 (satu) tahun tidak mengalami permasalahan/hambatan dan realisasi kinerja maupun keuangan sudah sesuai target capaian program.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

1. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat koordinasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pada tanggal 15 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebagaimana Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dalam dimensi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dimana Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk

mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
3. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan standar teknis dan petunjuk teknis akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkaitan dengan SPM.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut: kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08003'40" – 08050'48" Lintang Selatan dan 114025'53" – 115042'40" Bujur Timur. Provinsi Bali memiliki beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km2 atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia, yang secara administratif dibagi menjadi 8 (delapan) kabupaten, 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.493 desa adat, 1.604 subak sawah, dan 1.107 subak abian.

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

- 1.Pelayanan pendidikan menengah;
- 2.Pelayanan pendidikan khusus.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	100 %	2025
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	100 %	2025

4.1.3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
JENJANG SMA					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	96,11	96,11	Profil Pendidikan 2025
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	90,68	90,68	BPS 2025
3	Kemampuan Literasi	80,61	80,01	99,26	Rapor Pendidikan 2025
4	Kemampuan Numerasi	68,26	66,65	97,64	Rapor Pendidikan 2025
5	Indeks iklim Keamanan	86,19	75,29	87,35	Rapor Pendidikan 2025

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
6	Indeks Iklim Kebinekaan	75,75	74,75	98,68	Rapor Pendidikan 2025
7	Indeks Iklim Inklusivitas	64,71	63,21	97,68	Rapor Pendidikan 2025
JENJANG SMK					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	96,11	96,11	Profil Pendidikan 2025
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	86,24	90,68	90,68	BPS 2025
3	Kemampuan Literasi	76,59	75,29	98,30	Rapor Pendidikan 2025
4	Kemampuan Numerasi	64,28	62,07	96,56	Rapor Pendidikan 2025
5	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	93,40	91,87	98,36	Rapor Pendidikan 2025
6	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja lulusan SMK	80,06	79,51	99,31	Rapor Pendidikan 2025
7	Indeks Iklim Keamanan	73,74	72,54	98,37	Rapor Pendidikan 2025
8	Indeks Iklim Kebinekaan	72,17	70,81	98,12	Rapor Pendidikan 2025
9	Indeks Iklim Inklusivitas	62,48	60,17	96,30	Rapor Pendidikan 2025
JENJANG PENDIDIKAN KHUSUS					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	100	135,72	135,72	Profil Pendidikan 2025
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun	100	67,96	67,96	Dinas PMD Dukcapil 2025
3	Indeks Iklim Keamanan SDLB	83,17	82,67	99,40	Rapor Pendidikan 2025
4	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	74,78	73,78	98,66	Rapor Pendidikan 2025

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
5	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	74,63	73,32	98,24	Rapor Pendidikan 2025
6	Kemampuan Literasi SDLB	72,83	71,23	97,80	Rapor Pendidikan 2025
7	Kemampuan Numerasi SDLB	76,77	76,17	99,22	Rapor Pendidikan 2025
8	Indeks Iklim Kean mana SMPLB	78,93	77,73	98,48	Rapor Pendidikan 2025
9	Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	76,53	74,73	97,65	Rapor Pendidikan 2025
10	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	75,13	73,73	98,14	Rapor Pendidikan 2025
11	Kemampuan Literasi SMPLB	85,73	85,23	99,42	Rapor Pendidikan 2025
12	Kemampuaan Numerasi SMPLB	80,45	80,20	99,69	Rapor Pendidikan 2025
13	Kemampuan Literasi SMALB	85,52	85,01	99,40	Rapor Pendidikan 2025
14	Kemampuan Numerasi SMALB	78,13	77,62	99,35	Rapor Pendidikan 2025
15	Indeks Iklim Keamanan SMALB	78,30	77,00	98,34	Rapor Pendidikan 2025
16	Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	78,80	76,79	97,45	Rapor Pendidikan 2025
17	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	78,10	76,50	97,95	Rapor Pendidikan 2025

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Kegiatan	Alokasi (Rp)	Sumber Dana
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	120,924.900.825	APBDP
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	108.164.355.870	APBDP
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	7.465.444.043	APBDP
4	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	60.319.100	APBDP
	Jumlah (Rp)	236.615.019.838	

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2025 total sebanyak 13.125 orang terdiri dari 7.548 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5.577 orang dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terdiri dari 4.912 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.636 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Tenaga ASN terkonsentrasi di lingkungan Kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 194 orang dan tenaga kontrak sebanyak 92 orang. ASN yang terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 12.839 orang terdiri dari 4.822 orang PNS, 2.532 orang PPPK serta 5.485 orang Non PNS dengan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 345 orang.

Secara administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memiliki tanggung jawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 345 sekolah, yang terdiri atas 90 SMA Negeri, 73 SMA Swasta, 58 SMK Negeri dan 109 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 3 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dibantu 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTEKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan, sebagai berikut :

- 1) Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun
- 2) Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk disabilitas usia 4-18 tahun
- 3) Sejumlah capaian realisasi indikator SPM tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel diatas masih ada yang belum tercapai.

2. Solusi

- 1) Memantapkan peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang meliputi unit sekolah baru, ruang kelas, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, sarana utilitas lainnya, media pembelajaran, alat praktek siswa, dan mebel sekolah, pemberian dana pendamping operasional sekolah (BOSDA), memberikan biaya personil bagi siswa kurang mampu dan penyaluran dana pendidikan bagi siswa kurang mampu (PIP) untuk menekan terjadinya siswa putus sekolah;
- 2) Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi, pemanfaatan media pembelajaran digital, forum guru mata pelajaran, dan pendistribusian yang lebih proporsional sesuai kebutuhan ideal Satuan Pendidikan
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan ke satuan pendidikan secara berkesinambungan terkait manajemen aparatur, sarana-prasarana, tata kelola sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah), pengelolaan dana sekolah, keselarasan kurikulum, penguatan kurikulum kuatan lokal, dan review capaian rapor pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung pemenuhan SPM Pendidikan
- 4) Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mendukung ketercapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Pendidikan Dasar, serta dapat mendorong dan menjaring siswa putus sekolah agar bersekolah kembali
- 5) Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan
- 6) Berkoordinasi dengan pihak Kemendikbudristek mengupayakan agar rilis Raport Pendidikan dapat lebih awal setiap tahunnya.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis Pelayanan Dasar untuk Daerah Provinsi terdiri dari 2 jenis layanan dasar yaitu:

- 1. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Daerah Provinsi;
- 2. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Daerah Provinsi.

Permendagri 59 Tahun 2021 memuat perhitungan mengenai penilaian pencapaian SPM, termasuk urusan kesehatan, yang berbeda dengan Pemendagri No. 100 Tahun 2019. Pada perhitungan penilaian sebelumnya, perhitungan penilaian pencapaian SPM tidak mengikutsertakan dimensi Mutu Minimal Layanan. Perhitungan Pencapaian SPM pada Permendagri baru melibatkan dimensi Mutu Minimal Layanan dan Penerima Layanan. Dimensi mutu melibatkan perhitungan kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis, sedangkan dimensi penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja. Untuk capaian mutu dilakukan pembobotan sebesar 20% (0,2) dan capaian penerima pelayanan dasar berbobot 80% (0,8). Berikut di bawah ini gambar yang menerangkan konsep penghitungan pencapaian SPM.

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan, sebagaimana yang tertera dalam Permenkes No. 6 tahun 2024, harus 100% (seratus persen) untuk setiap tahunnya. Tampilan target pencapaian SPM Kesehatan masing - masing jenis layanan SPM Kesehatan tampak pada tabel di bawah ini:

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Layanan	Target
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %

Sumber : Hasil Olahan Data Timker Suneva Dinkes Prov Bali Tahun 2025

4.2.3. Realisasi

Hasil capaian SPM kesehatan adalah hasil yang didapat sesuai dengan definisi operasional masing-masing kegiatan dibandingkan dengan sasaran yang sudah ditetapkan di awal tahun kegiatan. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			IP SPM Setiap Layanan	KATEGORI	IP SPM Bid Kesehatan	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			IP SPM	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	4.375.263	4.375.263	100%	100	83,34	83%	96,67	Tuntas Utama	91,47	Tuntas Utama
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar baisa (KLB)	64.242	53.319	83%	100	99,36	99%	86,27	Tuntas Muda		

Sumber : Hasil Olahan Data Timker Suneva Dinkes Prov Bali Tahun 2025

Secara keseluruhan perhitungan persentase IP SPM Kesehatan di Provinsi Bali pada tahun 2025 yang terdiri dari persentase IP penerima layanan dasar dan persentase IP mutu layanan dasar adalah sebesar 91,47% atau dikategorikan sebagai TUNTAS UTAMA. Penjelasan mengenai pencapaian IP SPM Bidang Kesehatan pada setiap layanan, sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi

Capaian Indikator Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada indikator Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana telah mencapai 96,67%, dengan

penerapan indikator layanan yang terdiri dari dua tahap yaitu Pra Krisis dan Tahap Tanggap Darurat.

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, klaster Kesehatan Provinsi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan tingkat daerah serta berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Bali. Pada saat tanggap darurat krisis kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan aktivasi klaster kesehatan daerah. Penanggulangan krisis kesehatan mengutamakan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan, penanggulangan krisis kesehatan diselenggarakan sesuai tahapan yang meliputi tahap pra krisis, tahap tanggap darurat dan tahap pasca krisis kesehatan. Untuk kegiatan pra-krisis meliputi upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan seperti peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan dan pengurangan kerentanan. Penanggulangan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan memastikan program kesehatan berjalan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Penanggulangan pada tahap pasca-krisis ditujukan untuk mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi prakrisis kesehatan dan membangun kembali lebih baik dan aman dan berkelanjutan (*build back better, safer, sustainable*).

Dinas Kesehatan Provinsi melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung penanggulangan krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana sebanyak 630 orang di 9 Kabupaten/Kota. Untuk Pra krisis terdapat penetapan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 terdiri dari :

1. Melakukan Sosialisasi Pedoman Krisis Kesehatan dan pedoman *Health Emergency Operational Center* (HEOC)
2. Melakukan Monitoring dan evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Aman Bencana)
3. Melakukan revisi SK Klaster Kesehatan
4. Menyusun pedoman Indikator Sertifikasi Kesiapsiagaan fasilitas Kesehatan Aman Bencana

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali tahun 2025 terdapat 14 risiko bencana di seluruh wilayah Provinsi Bali dan tidak ada satu wilayah pun yang tidak berisiko terdampak bencana/krisis kesehatan meskipun

potensi risiko dan jenis *hazard* berbeda. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Bali tahun 2024 sebanyak 4.375.263 jiwa yang artinya masyarakat yang berpotensi terdampak krisis kesehatan juga sejumlah tersebut. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan wajib menjangkau seluruh masyarakat dengan metode pelayanan langsung dan tidak langsung.

Melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor: 810/04-G/HK/2025 menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Bali terhitung sejak tanggal 11 sampai dengan 17 September 2025. Jenis bencana yang terjadi yaitu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Provinsi Bali menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor di 8 Kab/Kota dengan wilayah yang terdampak yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana. Jumlah penduduk yang terdampak sebanyak 620 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 18 orang, luka berat/rawat inap sebanyak 53 orang luka ringan/rawat jalan sebanyak 82 orang, dan korban masih dalam pencarian sebanyak 4 orang. Dan jumlah pengungsi sebanyak 157 orang. Pada penduduk terdampak telah diberikan kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (*individu kit*) untuk 223 orang. Dan fasilitas kesehatan yg terdampak yaitu RSUD Wangaya dengan rusak sedang dan masih berfungsi, RSK Bedah BIMC Kuta rusak berat dan tidak berfungsi, UPTD Puskesmas mengwi III, UPTD Puskesmas I Mendoyo, Puskesmas Selemadeg Barat, Puskesmas selemadeg, Puskesmas selemadeg Timur I dan pustu Tegal Mengkeb dengan rusak ringan dan masih berfungsi. Penanganan penduduk terdampak bencana dilakukan secara bersinergi antara Dinas terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta melibatkan relawan dari Yayasan terkait dan juga relawan individu. Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melakukan kegiatan yang terdiri dari:

- a) Melakukan pendampingan RHA (*Rapid Health Assesment*) dan manajemen krisis kesehatan.
 - b) Mengkoordinasikan PSC di Kab/Kota untuk melakukan pelayanan kesehatan dan evakuasi pasien
 - c) Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi terkait data jumlah korban dan posko pengungsian.
 - d) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota yang terdampak untuk pelayanan kesehatan di posko pengungsian dan ketersediaan logistic kesehatan
 - e) Melakukan pemantauan dan membuat laporan
- 2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

Capaian Indikator Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada indikator penerima layanan dasar bidang kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) menunjukkan bahwa persentase IP mutu layanan dasar mencapai 86,27%. Capaian ini mencerminkan bahwa mutu pelaksanaan layanan dasar telah berjalan dengan cukup baik, namun masih dipengaruhi oleh capaian imunisasi yang belum sepenuhnya optimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya KLB. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Untuk mencegah terjadinya KLB atau meluasnya KLB, diperlukan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berisiko terkena KLB. Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan mobilisasi penduduk yang tinggi memiliki potensi terjadinya KLB, khususnya KLB Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Ancaman KLB PD3I juga dipengaruhi oleh kondisi epidemiologis di Provinsi terdekat, yaitu Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, yang saat ini mengalami peningkatan kasus PD3I. Dalam upaya pencegahan KLB PD3I di Provinsi Bali, pelayanan kesehatan difokuskan pada kelompok risiko rawan, khususnya kelompok umur 0–2 tahun sebagai sasaran imunisasi dasar dan lanjutan, melalui pemberian imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata. Pemantauan potensi KLB di Provinsi Bali dilakukan melalui kinerja Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Pada tahun 2025 tidak terjadi KLB PD3I tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, hal ini didukung oleh penerapan SPM melalui pelaksanaan identifikasi dan pemetaan risiko penyakit berpotensi KLB di seluruh Kabupaten/Kota, penanganan kelompok risiko melalui pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, monitoring SKDR terhadap penyakit berpotensi KLB berdasarkan gejala suspek, verifikasi rumor termasuk penyelidikan epidemiologi serta pengambilan dan pengiriman sampel ke laboratorium rujukan nasional, serta monitoring dan evaluasi cakupan imunisasi rutin guna mencegah PD3I agar tetap tinggi dan merata di seluruh Kabupaten/Kota.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Pendanaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dihitung dengan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran. Penghitungan pendanaan Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan dilakukan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	186.176.380,-	165.773.290,-	89,04%	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	70.891.400,-	69.766.400,-	98,41%	APBD

Sumber : Hasil Olahan Data Timker Suneva Dinkes Prov Bali Tahun 2025

Anggaran 2025, alokasi dana untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk dalam kondisi kejadian luar biasa provinsi pada subkegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp186.176.380. Realisasi pengeluaran tercatat Rp165.773.290, atau 89,04% dari target. Capaian penyerapan dana ini tergolong baik meskipun belum mencapai 100%, yang dipengaruhi oleh fluktuasi dinamika kejadian luar biasa serta penyesuaian prioritas di lapangan.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi sebesar Rp70.891.400 terealisasi hampir sepenuhnya mencapai Rp69.766.400, atau 98,41% dari pagu. Capaian ini mencerminkan efisiensi pengelolaan dana serta responsivitas terhadap kebutuhan darurat kesehatan seperti wabah atau kondisi krisis lainnya. Kedua program sepenuhnya dibiayai dari APBD, yang menegaskan komitmen Provinsi dalam mengelola risiko kesehatan publik, dengan rata-rata realisasi keseluruhan 93,73% tergolong positif yang berpotensi ditingkatkan pada pelayanan bencana untuk mendekati 100% di periode mendatang guna optimalisasi dampak.

4.2.5. Dukungan Personil

Adapun dukungan personil untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang urusan kesehatan disampaikan sebagai berikut;

1. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Pada tahun 2025, fasilitas kesehatan di Provinsi Bali mencakup 84 rumah sakit, 120 puskesmas, 457 klinik, serta 9 public safety center di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Namun, data tersebut belum mencukupi untuk menggambarkan kapasitas layanan kesehatan, khususnya dalam masa tanggap darurat bencana. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan mengamanatkan penanganan krisis melalui

sistem klaster yang menekankan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi di tingkat daerah sebagai bagian integral dari penanggulangan bencana. Berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor: 720/03-B/HK-2025 Tanggal 08 Agustus 2025 tentang Klaster kesehatan Provinsi Bali terdiri dari sub klaster Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Reproduksi, Promosi Kesehatan, Pelayanan Gizi, Sub Klaster Identifikasi Korban mati akibat Bencana (*Disaster Victim Identification/ DVI*) sub klaster data dan informasi dan surveilans dan sub klaster logistik yang kegiatannya dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk selama Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di tingkat Provinsi difokuskan pada pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat melalui koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi. Sasaran Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang di gunakan adalah penduduk yang masuk dalam kelompok risiko rawan terkena KLB PD3I yaitu kelompok umur 0-2 thn yang merupakan sasaran imunisasi dasar dan lanjutan. Pelayanan kesehatan pada kelompok ini bertujuan untuk mencegah terjadinya KLB kasus PD3I di Prov Bali. Pelayanan kesehatan yang di berikan adalah memberikan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.

Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Pada proses penerapan dan pencapaian SPM kesehatan tahun 2025 masih menghadapi permasalahan dan kendala. Berikut uraian tentang permasalahan dan solusi yang dihadapi:

Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Provinsi Bali

No	Jenis Layanan	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk	1. Saat ini belum teridentifikasi kendala signifikan; penduduk	1. Koordinasi yang intensif dan berkelanjutan akan dilakukan

No	Jenis Layanan	Permasalahan	Solusi
	terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	terdampak krisis kesehatan dan/atau berpotensi bencana telah memperoleh pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. 2. Capaian mutu layanan pada Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana tidak mencapai target seperti obat dan bahan habis pakai, Pemberian Makan Bayi dan Anak, Makanan tambahan, individu kit karena pemberian disesuaikan dengan kebutuhan kondisi di lapangan. 3. Pada tahap pra-krisis kesehatan, kegiatan sosialisasi serta peningkatan kompetensi bagi petugas kesehatan di rumah sakit dalam penanganan krisis kesehatan telah terlaksana secara optimal.	dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, fasilitas kesehatan, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan secara rasional
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	1. Cakupan imunisasi dasar dan lanjutan belum merata Masih terdapat wilayah dan kelompok sasaran yang belum terjangkau secara optimal oleh pelayanan imunisasi, sehingga meningkatkan jumlah penduduk rentan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan berpotensi menimbulkan KLB. 2. Kepatuhan pelaporan surveilans belum optimal Pelaporan penyakit berpotensi KLB melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) belum sepenuhnya tepat waktu dan lengkap, terutama dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan praktik mandiri. 3. Keterbatasan sumber daya manusia surveilans dan imunisasi Jumlah dan kompetensi petugas surveilans serta imunisasi di beberapa kabupaten/kota masih terbatas, sehingga berdampak pada kualitas pemantauan, respons dini, dan pelaksanaan SPM secara menyeluruh. 4. Tantangan mobilitas penduduk yang tinggi Tingginya mobilisasi penduduk dan wisatawan di Provinsi Bali	1. Penguatan dan pemerataan pelayanan imunisasi Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan melalui pelayanan jemput bola, penguatan peran puskesmas dan posyandu, serta peningkatan advokasi dan edukasi kepada masyarakat. 2. Optimalisasi pelaporan dan pemantauan SKDR Memperkuat komitmen fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaporan SKDR secara tepat waktu dan lengkap melalui pembinaan, monitoring rutin, serta pemanfaatan sistem informasi surveilans. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Melakukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi petugas surveilans dan imunisasi untuk meningkatkan kompetensi teknis dan respons cepat dalam penanggulangan KLB. 4. Penguatan kewaspadaan dini terhadap risiko importasi kasus Meningkatkan pemantauan epidemiologi di wilayah

No	Jenis Layanan	Permasalahan	Solusi
		meningkatkan risiko importasi kasus PD3I dari daerah lain, yang dapat memengaruhi capaian IP SPM terkait pencegahan KLB. 5. Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum optimal Sinergi antara program imunisasi, surveilans, promosi kesehatan, serta lintas sektor terkait masih perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan SPM secara terpadu.	dengan mobilitas tinggi serta memperkuat koordinasi antarprovinsi untuk deteksi dini penyakit berpotensi KLB. 5. Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor Meningkatkan integrasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antara program imunisasi, surveilans, promosi kesehatan, serta lintas sektor terkait dalam rangka pencapaian target SPM.

Sumber : Hasil Olahan Data Timker Suneva Dinkes Prov Bali Tahun 2025

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bagian Kesatu SPM Bidang Pekerjaan Umum menyebutkan Pasal 5 ayat (1) Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota diberikan melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dan saat ini Provinsi Bali telah melakukan penyelenggaraan SPAM melalui 4 (empat) SPAM, yaitu:

- a. SPAM Regional Petanu yang melayani Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- b. SPAM Regional Penet yang melayani Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- c. SPAM Regional Telagawaja yang melayani Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.

- d. SPAM Regional Buleleng Jembrana (Burana) yang melayani Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
- e. SPAM Guyangan yang melayani Kabupaten Klungkung khususnya Pulau Nusa Penida.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diberikan melalui penyelenggaraan SPALD-S dan/atau SPALD-T. Saat ini Provinsi Bali telah melakukan penyelenggaraan SPALD-T melalui DSDP yang terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung untuk melayani Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum. Ukuran kuantitas air minum diukur dengan parameter sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) melalui SPAM.

Ukuran kualitas air minum diukur dengan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan, saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

- b. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.

Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diukur dengan parameter yaitu setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diukur dengan parameter terdiri atas:

- 1) pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan:
 - tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau
 - sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.
- 2) pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari

25 (dua puluh lima) jiwa per hektar di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah menggunakan lubang tanah atau cubluk kembar.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a) pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b) setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 adalah seperti tabel berikut:

Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025						
No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Capaian	
					2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan Umum	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100,00%	2025	63,33%	88,23%
		penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100,00%	2025	93,33%	100,00%

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali

4.3.3. Realisasi

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut:

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2025

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T 2025	R 2025	Alokasi Anggaran		Ket.
							APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pekerjaan Umum	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/	100,00%	2025	100,00%	90,17%	-	Rp77.042.322.826,00	Secara Kumulatif Kategori Indeks Capaian

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T 2025	R 2025	Alokasi Anggaran		Ket.
							APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kota							SPM: TUNTAS UTAMA (95,09 %)
		penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	100,00%	2025	100,00%	100,00%	-	Rp21.766.029.102,00	

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali

4.3.4. Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1	2	3	5	6	7
1	Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	74.279.328.526,00	62.877.892.177,00	84,65
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.517.285.649,00	1.373.224.943,00	90,51
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	29.543.323.255,00	23.189.545.990,00	78,49
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	43.218.719.622,00	38.315.121.244,00	88,65
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	21.766.029.102,00	17.780.040.383,00	81,69
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	3.167.010.552,00	2.229.748.415,00	70,41
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	258.946.400,00	240.206.137,00	92,76
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	18.340.072.150,00	15.310.085.831,00	83,48
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
		Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	78,82
		Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	2.762.994.300,00	2.177.847.786,00	78,82

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali

4.3.5. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Personil Pendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jabatan	Golongan	Jumlah
I	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
II	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
III	Bidang Cipta Karya		
1	Kepala Bidang	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi	Eselon IV	1 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	24 Orang
IV	UPTD PAM		
1	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi/Sub Bagian	Eselon IV	3 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	160 Orang
V	UPTD PAL		
1	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi/Sub Bagian	Eselon IV	3 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	78 Orang
Total			274 Orang

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali

- Bidang Cipta Karya berperan dalam aspek perencanaan, pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pengawasan SPAM dan SPALD.
- UPTD PAM berperan dalam aspek operasi dan pemeliharaan SPAM.
- UPTD PAL berperan dalam aspek operasi dan pemeliharaan SPALD.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dalam melakukan pengisian *form* 3.B.1 Rumah Terlayani SPAM Regional, sehingga poin-poin seperti Nama Kepala Keluarga, NIK, Jumlah Anggota Rumah, Kondisi Ekonomi Keluarga dan Status MBR/Non MBR belum bisa kami isi dengan data yang valid dan aktual.
2. Perbedaan penerima layanan dasar antara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, di mana pada Permendagri penerima layanan dasar adalah warga negara sedangkan pada Permen PUPR penerima layanan dasar adalah pelaksana Penyelenggaraan SPAM penerima air minum curah lintas kabupaten/kota. Perbedaan ini berdampak pada kesulitan kami dalam menghitung kebutuhan dan capaian.

3. Perhitungan kebutuhan menggunakan tren persentase kenaikan dari data serapan tahun 2023 dan tahun 2024, tidak berdasarkan kebutuhan riil dari *Off Taker* (pelanggan).
4. Sering terjadi permasalahan kebocoran jaringan transmisi utama (khususnya) SPAM Telagawaja, sehingga mengganggu pencapaian target kebutuhan khususnya SPAM Telagawaja.
5. *Off Taker* dalam melakukan penyerapan air curah juga sangat tergantung pada kondisi SPAM yang mereka miliki, *Off Taker* tentunya lebih memprioritaskan produksi SPAM sendiri dibandingkan menyerap air curah dari SPAM Regional.
6. Sering terjadi kebocoran jaringan distribusi utama SPAM Petanu, sehingga mengganggu pendistribusian dan tentunya pencapaian target kebutuhan.
7. Bocornya bendung karet di SPAM Petanu dan kempesnya bendung karet di SPAM Penet khususnya pada musim hujan mengganggu suplai air baku untuk produksi, sehingga mengganggu pendistribusian ke *Off Taker* (pelanggan).

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dengan sistem setempat sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kondisi prasarana instalasi pengolahan air limbah terpusat yang ada.
2. Pelanggan kategori rumah tangga untuk membayar tagihan langganan penyaluran air limbah masih sangat kurang (lebih kurang 40% yang aktif membayar tagihannya), sehingga sampai saat ini tunggakan yang menjadi piutang pada UTPD PAL masih cukup tinggi.
3. Kepedulian pelanggan untuk memelihara jaringan perpipaan air limbah dari rumah tangga masing-masing sampai ke *House Inlet* (HI) masih perlu ditingkatkan, mengingat kebuntuan atau sumbatan pipa akibat sampah masih sering terjadi yang berakibat meluapnya air limbah di areal rumah atau di jalan. Selain itu pada musim hujan, air hujan yang seharusnya tidak masuk ke dalam jaringan perpipaan air limbah sengaja dimasukkan untuk mengatasi genangan di areal perumahan dengan cara membuka bak kontrol atau *manhole* yang berakibat air meluap pada beberapa titik *manhole* di jalan.
4. Akibat masuknya sampah ke dalam saluran pipa air limbah, pompa-pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah mengalami kerusakan, seperti motor pompa terbakar akibat tersangkut sampah sehingga daya kerja pompa tidak optimal.

5. Kondisi kolam aerasi (*aeration pond*) dan kolam sedimentasi (*sedimentation pond*) sudah penuh dengan sedimen sehingga pengolahan air limbah tidak optimal.
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih menerima limbah Restoran yang cukup tinggi kandungan lemaknya, karena sampai saat ini belum ada instalasi yang khusus mengolah limbah lemak.
7. Pada beberapa jaringan pipa, baik pipa *force main* maupun pipa RC (beton) telah mengalami kebocoran akibat korosi oleh gas H_2S yang terkandung dalam air limbah itu sendiri.

Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota antara lain:

1. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida (BWS-Bali Penida) telah merencanakan penggantian karet bendung pada Long Storage Tukad Petanu.
2. Pelaksanaan optimalisasi SPAM Petanu melalui pengadaan dan pemasangan pompa *booster* di Ketewel dan pembangunan Reservoir Sanur (Tukad Bilok) dan jaringan pipa.
3. Perencanaan pemasangan Taping Brawa pada jaringan distribusi utama SPAM Penet untuk melayani wilayah Canggu, Brawa dan sekitarnya.
4. Pergantian beberapa aksesoris air valve di SPAM Petanu untuk mengurangi kebocoran di jaringan distribusi utama.
5. Optimalisasi serapan di SPAM Telagawaja melalui penjajakan taping baru, di Juntal, Griyana Kangin, Karanganyar.

Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan dalam penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota antara lain:

1. Mengantarkan *invoice* (tagihan) ke rumah masing-masing pelanggan (*door to door*) sambil memberikan sosialisasi/edukasi terkait fungsi dan kegunaan serta pemeliharaan jaringan pipa air limbah.
2. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan sampah pada *manhole* dan jaringan pipa secara rutin oleh petugas UPTD PAL.
3. Rehabilitasi/renovasi pada beberapa jaringan pipa yang mengalami kebocoran.
4. Mengganti beberapa komponen pompa maupun mengganti pompa yang mengalami kerusakan.
5. Perlu direncanakan pembangunan instalasi pengolahan untuk menyaring dan mengolah lemak sebelum masuk ke dalam IPLT.
6. Perlu direncanakan pembangunan permukaan bak kontrol di masing-masing rumah agar elevasinya dibuat lebih tinggi dari eksisting halaman untuk mengurangi lumpur atau sedimen masuk ke bak kontrol.

7. Perlu dilakukan pengurasan pada kolam aerasi dan kolam sedimentasi secara berkala.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilaksanakan melalui:

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah;
- c. pemukiman kembali; atau
- d. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan saat masa pasca bencana;
- b. terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah; dan
- c. sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
- b. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan

- b. sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pemenuhan terhadap Rencana Aksi yang dapat dilakukan secara bertahap dapat dihitung capaian SPM apabila, setidaknya telah dilakukan:

- a. penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*);
- b. proses sosialisasi kepada masyarakat; dan
- c. proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.

Program Pemerintah Daerah sebagaimana dilaksanakan dalam rangka:

- a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;
- b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
- e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana merupakan daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa meliputi:

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan pantai;
- c. sempadan rel kereta api;
- d. daerah saluran SUTET; dan/atau
- e. daerah berpotensi bahaya lainnya.

Daerah rawan bencana meliputi:

- a. letusan gunung berapi;
- b. gempa bumi;
- c. tanah longsor;
- d. gelombang pasang;
- e. banjir bandang; dan/atau
- f. bencana lainnya.

Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah; dan
- c. pemukiman kembali;

dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Penerapan SPM Perumahan Rakyat sesuai dengan kondisi pada tahun 2025 tidak ada Bencana tingkat Provinsi dan tidak ada relokasi program pemerintah sehingga untuk kegiatan ini tidak ada realisasi pelaksanaan. Akan tetapi sesuai dengan tahapan pelaksanaan penerapan SPM ini dilakukan kegiatan pendataan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam perencanaan penerapan SPM. Kegiatan pendataan yang dilakukan tahun 2025 merupakan langkah awal penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat. Hingga tahun 2025 data yang diperoleh adalah data jumlah rumah dan lokasi lahan potensial yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Lokasi Rumah di Kawasan Rawan Bencana

No.	Kabupaten	Luas Perumahan (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Klungkung	476,97	31.606	7.909	39.545
2	Karangasem	915,50	25.885	5.723	26.842
3	Buleleng	71.678,60	27.703	6.945	27.780
4	Jembrana	736,12	80.704	77.197	272.333
Total		73.807,19	165.898	97.774	366.500

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan tabel diatas, luas perumahan yang terbangun di kawasan rawan bencana di 4 (empat) kabupaten yang telah di data yaitu pada Kabupaten Klungkung, Karangasem, Buleleng dan Kabupaten Jembrana sebesar 73.807,19 Ha dengan jumlah unit rumah sebanyak 165.898 unit. Dari sekian rumah yang berlokasi di kawasan rawan bencana terdampak terhadap 97.774 kepala keluarga dengan total 272.333 jiwa.

Selain dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana, juga dilakukan pendataan lahan potensial apabila terdapat relokasi program pemerintah provinsi. Untuk lebih jelas akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel Lahan Potensial

No	Kabupaten	Luas Lahan (Ha)	Kepemilikan Lahan
1	Klungkung	2	Pemprov Bali
2	Karangasem	10,2	
3	Tabanan	8,3	
4	Gianyar	4,33	
5	Bangli	0,56	
Total		21,39	

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan tabel diatas, hingga tahun 2025 baru dilakukan pendataan lahan potensial di 5 (lima) kabupaten yaitu kabupaten Karangasem, Klungkung,

Tabanan, Gianyar dan Bangli dengan luas lahan potensial untuk dilakukan relokasi seluas 21,39 Ha. Peruntukan lahan tersebut sudah sesuai dengan kondisi RTRW setempat sehingga layak untuk digunakan untuk pengembangan permukiman dimana kepemilikan lahan juga merupakan aset Pemprov Bali.

4.4.3. Realisasi

Realisasi target dari penerapan SPM Perumahan Rakyat yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2025 adalah seperti tabel berikut.

Capaian Penerapan SPM Perumahan Rakyat Provinsi Bali Tahun 2025

NO	BIDANG /JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	KET.
					2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	100 %	2025	100%	100 %	Secara Kumulatif Kategori Indeks Pencapaian SPM : TUNTAS PARIPURNA 100%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	100 %	2025	100%	100%	

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2025

Dilihat dari tabel di atas, realisasi yang dicapai pada tahun 2025 mencapai 100% dengan data isian lengkap sehingga mendapat predikat **Tuntas Paripurna**.

4.4.4. Alokasi Anggaran

APBD Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2025 diketahui sebesar Rp6.917.008.137.900,- sedangkan Alokasi anggaran untuk Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat Provinsi Bali Tahun 2025

No.	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.266.060.330	1.236.495.427	97,66
		Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	200.230.925	196.086.810	97.93
		Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	88.481.225	88.418.525	99,93
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	111.749.700	107.666.286	96,35
		Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	1.065.829.405	1.040.408.617	97.61
		Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	1.065.829.405	1.040.408.617	97.61

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran pendukung untuk penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada tahun 2025 sebesar **Rp.1.266.060.330,-**. Alokasi anggaran penerapan SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp. 1.266.060.330,- jika dihitung hanya sebesar 0,12% dari APBD Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp. 6.027.724.313.823,-. Jumlah ini relatif kecil untuk anggaran penerapan SPM, akan tetapi dikarenakan tidak adanya Bencana Tingkat Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah, anggaran tersebut masih tergolong wajar untuk melakukan tahapan pendataan.

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil pada Instansi yang menangani Perumahan Rakyat di Provinsi Bali dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2025 yang mendukung pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			

1.	Kepala Bidang	Eselon III	1 Orang
2.	Kepala Seksi	Eselon IV	1 Orang
3.	Jafung Muda	PNS	1 Orang
4.	Staf teknis dan administrasi	PNS dan Non-PNS	18 Orang
Jumlah Total			23 Orang

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2025

Berdasarkan tabel diatas, jumlah personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pemenuhan Indikator adalah sebagai berikut :

- a) Pada indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, sepanjang tahun 2025 tidak ditemui adanya bencana skala provinsi, namun tetap dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana;
- b) Pada indikator Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, sepanjang tahun 2025 tidak dilakukan relokasi melainkan diberikan fasilitasi dengan pemberian ganti kerugian sesuai nilai *appraisal*.

4.5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

4.5.2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

4.5.3. Realisasi

Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	97	97	100%	0	0	100%	100%	Tuntas Paripurna

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2025 seluruhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

4.5.5. Dukungan Personil

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan PolisiPamong Praja Provinsi Bali tahun 2025, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 213 Orang, dengan status :

- PNS = 90 orang
- CPNS = 1 orang
- PPPK = 82 orang
- PPPK Paruh Waktu = 29 orang
- PJLP = 11 orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pengumpulan Data :
- Warga negara yang bermukim di sekitar arena penegakan Perda dan Perkada enggan menyerahkan identitas dirinya karena tidak merasa melakukan pelanggaran (walupun sudah dijelaskan secara humanis oleh petugas Satpol PP)
- 2) Penghitungan kebutuhan

- Juknis SOP sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 baru terbit TMT 23 Desember 2025

3) Pelaksanaan

- Tidak ditemukan adanya masyarakat yang terdampak penegakan Perda dan Perkada

b. Solusi :

1. Menyusun rencana aksi atas Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Trantibumlinmas dengan Kab/Kota se-Bali.
2. Melaksanakan patroli wilayah secara intensif baik secara mandiri maupun gabungan/bersama-sama dengan unsur instansi vertikal (TNI/Polri), unsur masyarakat (Pecalang) maupun dengan Satpol PP Kab/Kota untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali.
3. Memantapkan penegakan hukum (Penegakan Perda/Perkada) dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin;
4. Meningkatkan kemampuan Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP, sarana dan prasarana, serta anggaran
5. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 2025

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T
					2025
1	2	3	4	5	6
6	Bidang Sosial				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2025	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%
		b) Standar jumlah dan	100%	2025	100%

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T
					2025
1	2	3	4	5	6
		kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan			
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2025	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2025	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2025	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2025	100%

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 2025

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2025	2025
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%	100%
		c) Petunjuk teknis	100%	2025	100%	100%

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2025	2025
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
		atau tata cara pemenuhan standar				
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2025	100%	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2025	100%	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2025	100%	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2025	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2025	100%	100%
		c) Petunjuk teknis	100%	2025	100%	100%

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2025	2025
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
		atau tata cara pemenuhan standar				

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosial terdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali pada Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Indikator yang Sesuai Target dan Tidak Sesuai Target:

6.1	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2025 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% capaian realisasi tersebut 100% dicapai melalui anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
	b.	Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2025 ditargetkan 100% dengan capaian 100%, SDM Kesejahteraan Sosial tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di 9 Kab/Kota.
	c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Tahun 2025 ditargetkan 100% realisasi capaian 100%.
6.2	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2025 target 100% capaian realisasi 100% capaian realisasi tersebut dicapai dari anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
	b.	Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2025 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
	c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti Tahun 2025 target 100% dengan realisasi capaian 100%.
6.3	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2025 target 100% dengan capaian realisasi 100%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta.
	b.	Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2025 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Asistensi Lanjut Usia, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
	c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti Tahun 2025 ditergetkan 100% dengan realisasi capaian 100%.
6.4	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2025 target 100% capaian realisasi 100%. Provinsi Bali belum mempunyai Panti Gelandangan dan Pengemis namun dalam penanganan orang terlantar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali menyediakan asrama untuk penampungan sementara sebelum dipulangkan ke Daerah asal. Penanganan Gepeng ditangani oleh Instansi Sosial Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3A Provinsi.
	b.	Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2025 ditargetkan 100% dengan realisasi capaian 100%. SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
	c.	Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti Tahun 2025 target 100% dengan realisasi capaian 100%.
6.5	a.	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi dengan target 100%

		telah memenuhi standar dengan realisasi 100%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD, Persediaan barang logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan melalui partisipasi masyarakat atau swasta.
	b.	Jumlah dan kualitas SDM kesos sudah sesuai target 100% dengan realisasi capaian 100%. SDM tersebut terdiri ASN pada instansi Sosial, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Pelopor Perdamaian, Tenaga Kesos dan relawan yang tersebar di 9 Kab/Kota.
	c.	Petunjuk teknis atau tata cara Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi Tahun 2025 target 100% telah tersedia dengan realisasi capaian 100%.

4.6.3. Realisasi

Realisasi SPM Bidang Sosial 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Tuntas Utama			100%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	760	760	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1. Penyediaan permakanan	55	55	0	100%
	2. Penyediaan sandang	20	20	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	8	8	0	100%
	4. Penyediaan alat bantu	20	20	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	30	30	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	580	580	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	30	30	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	5	5	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	16	16	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	2	2	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	0	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
		Dilayani			
	A. Jumlah yang harus dilayani:	2650	2650	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1. Pengasuhan	2650	2650	0	100%
	2. Penyediaan permakanan	757	757	0	100%
	3. Penyediaan sandang	45	45	0	100%
	4. Penyediaan asrama yang mudah diakses	40	40	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	45	45	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	40	40	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	45	45	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	20	20	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	45	45	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	45	45	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	0	100%
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	20	20	0	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	596	596	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	A. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1. Penyediaan permakanan	391	391	0	100%
	2. Penyediaan sandang	70	70	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	4	4	0	100%
	4. Penyediaan alat bantu	10	10	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	70	70	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	135	135	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-	70	70	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	hari				
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	1	1	0	100%
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	70	70	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	60	60	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	0	100%
	12. Pemulasaraan**	27	27	0	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	327	327	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1. Penyediaan permakanan	430	430	0	100%
	2. Penyediaan sandang	35	35	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	35	35	0	100%
	4. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	35	35	0	100%
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	35	35	0	100%
	6. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	35	35	0	100%
	7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar	35	35	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	35	35	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	35	35	0	100%
	10. Pemulangan ke daerah asal	327	327	0	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah TotalYang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	9010	9010	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
		mendapat layanan			
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1. Penyediaan permakanan	5845	5845	0	100%
	2. Penyediaan sandang	625	625	0	100%
	3. Peyediaan tempat penampungan pengungsi	1794	1794	0	100%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	151	151	0	100%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	593	593	0	100%

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial 2025

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	2.833.626.800,00	APBDP
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2.773.566.100,00	APBDP
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	5.249.379.400,00	APBDP
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	178.839.400,00	APBDP
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	341.811.800,00	APBDP
	Jumlah (Rp)	11.377.223.500,00	

4.6.5. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial berjumlah (seratus lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari:

Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	5 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	2 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	3 Orang
Fungsional			
1.	Pekerja Sosial	Golongan IV	2 Orang
2.	Arsiparis	Golongan IV	1 Orang
3.	Arsiparis (P3K)	Golongan IX	1 Orang
3.	Penyuluh Sosial	Golongan III	6 Orang
4.	Pranata Komputer	Golongan III	1 Orang
Staf			
1.	PNS	Golongan IV	12 Orang

2.	PNS	Golongan III	56 Orang
3.	PNS	Golongan II	13 Orang
4.	PPPK	Golongan IX	37 Orang
5.	PPPK	Golongan V	19 Orang
6.	PPPK	Golongan VII	3 Orang
7.	Tenaga Non ASN	-	45 Orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a) Kendala

Terbatasnya sumber daya manusia khususnya Fungsional Kesejahteraan Sosial yakni pekerja sosial dalam panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

b) Permasalahan

- Beberapa kegiatan yang capaiannya tidak bisa diprediksi seperti bencana, pemulangan orang terlantar, dan pemulasaraan. Penanganan layanan tersebut berdasarkan kasus yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, sehingga terkadang capaian tidak sesuai target awal.
- Belum tersedianya panti Gelandangan dan Pengemis milik pemerintah maupun swasta yang ada di Provinsi Bali menjadikan gelandangan dan pengemis yang terlantar sejauh ini kurang mendapatkan binaan.

c) Solusi

- Mengajukan perubahan target penerapan SPM.
- Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	• Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun • Indeks Iklim Keamanan SMA

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	• Indeks Iklim Kebinekaan SMA • Indeks Inklusivitas SMA • Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional • Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun • Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri • Indeks Iklim Keamanan SMK • Indeks Iklim Kebinekaan SMK • Indeks Inklusivitas SMK • Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional • Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK • Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	1. Pengelolaan Pendidikan Khusus	• Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun • Indeks Iklim Keamanan SDLB • Indeks Iklim Keamanan SMALB • Indeks Iklim Keamanan SMPLB • Indeks Iklim Kebinekaan SDLB • Indeks Iklim Kebinekaan SMALB • Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB • Indeks Inklusivitas SDLB • Indeks Inklusivitas SMALB • Indeks Inklusivitas SMPLB • Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
			- Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional - Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional
3	Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	- Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik - Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal

4.7.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2025 seperti yang tercantum dalam DPA Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sumber : Hasil Olahan Data Timker Suneva Dinkes Prov Bali Tahun 2025

4.7.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 2025

No.	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Layak
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak

4.7.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Tahun 2025 yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Program dan Anggaran Pendukung SPM Perumahan Rakyat 2025

No.	Jenis Layanan Dasar	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Penyediaan & rehatiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1. Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	2. Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2025

4.7.5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2025, yang melibatkan Stakeholder terkait, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2025, dimana untuk susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara eksisting tidak mengalami banyak perubahan dari tahun sebelumnya dimana terdapat 2 (dua) Program yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Penyediaan layanan dasar dlm rangka Dampak Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 laporan	19,993,200	APBD	26,32 %
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	42,720,905	APBD	90.63 %
						29,999,900		2.59 %
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 unit	20,450,348,273	APBD	99,97%
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 dokumen	81,949,400	APBD	64,68 %
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil	1 dokumen	87,277,405	APBD	71,88 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	190 kasus	3,648,199,507	APBD	94,64 %
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	131 orang	236,615,902	APBD	78,76 %
			Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia					
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 laporan	12,181,200	APBD	99,98 %
			Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 laporan	1,233,056,463	APBD	98,34 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 laporan	304,669,410	APBD	89,89 %
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	72,000,000	APBD	44,73 %
	TOTAL (Rp)					26,219,011,565		98,30 %

4.7.6. BIDANG SOSIAL

Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1.	Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :	
	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan:
		- Penyediaan permakanan - Penyediaan sandang - Penyediaan asrama yang mudah diakses - Penyediaan alat bantu - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
	b.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan:
		- Pengasuhan - Penyediaan permakanan - Penyediaan sandang - Penyediaan asrama yang mudah diakses - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti

		- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari - Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga - Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
	c.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti dengan sub kegiatan:
		- Penyediaan permakanan - Penyediaan sandang - Penyediaan asrama yang mudah diakses - Penyediaan alat bantu - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan - Akses ke layanan kesehatan dasar - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga - Pemulasaraan
	d.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dengan sub kegiatan:
		- Penyediaan permakanan - Penyediaan sandang - Penyediaan asrama yang mudah diakses - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial - Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari - Pemberian bimbingan keterampilan dasar - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar - Pemulangan ke daerah asal
	2.	Program Penanganan Bencana dengan kegiatan:
	a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan:
		- Penyediaan permakanan - Penyediaan sandang - Penyediaan tempat penampungan pengungsi - Penanganan khusus bagi kelompok rentan - Pelayanan dukungan Psikososial

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2025, maka secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat pula ditingkatkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2025 ini tidak hanya sekedar merekam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban, baik bagi pemerintah daerah maupun Kepala Daerah yang memimpinnya. Kinerja yang baik dan optimal akan membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada upaya-upaya pemerintah dalam berkinerja untuk menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan *Good Governance* dengan mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Bali, 26 Maret 2026